SELAYANG PANDANG
PARTAI POLITIK

ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Aditya Tirta L, Ahmad Alwi R, Andiani Eka,
Annisa Nur F, Ariansyah Nur F, Arif Ramadhan, Arina Marjany,
Atrasina Kiyasatina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Selayang Pandang Partai Politik Antara Harapan Dan Kenyataan

H. Cecep Suryana
Aditya Tirta Lukmana
Ahmad Alwi Ray
Andiani Eka
Annisa Nuur Fitriani
Ariansah Nur Fajar
Arif Ramadhan
Arina Marjany
Atrasina Kiyasatina

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Selayang Pandang Partai Politik Antara Harapan Dan Kenyataan

Penulis :
H. Cecep Suryana
Aditya Tirta Lukmana
Ahmad Alwi Ray
Andiani Eka
Annisa Nuur Fitriani
Ariansah Nur Fajar
Arif Ramadhan
Arina Marjany
Atrasina Kiyasatina

ISBN: 978-623-88132-5-4 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting :
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022
Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan buku ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. H. Cecep Suryana, M.Si. selaku dosen bidang mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang telah memberikan dukungan serta arahan, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan buku dengan judul "Selayang Pandang Partai Politik Antara Harapan dan Kenyataan" tepat pada waktunya.

Kami tentu menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan doa kepada kami. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Bandung, 20 Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I SISTEM POLITIK INDONESIA **1**
A. Pengertian Sistem 1
B. Karakteristik Sistem 2
C. Klasifikasi Sistem 3
D. Pengertian Politik 4
E. Landasan Sistem Politik Indonesia 8
BAB II PARTAI POLITIK DI INDONESIA **13**
A. Sejarah Partai Politik Di Indonesia 13
B. Awal Pergerakan Politik di Indonesia 24
BAB III PARTAI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA **30**
A. Partai-Partai Awal Masa Kemerdekaan Indonesia (Tahun 1955) 30
B. Partai-Partai Masa Orde Lama Indonesia (Tahun 1971) Masa Orde Lama/Orla atau Demokrasi Terpimpin 39
C. Partai-partai Masa Orde Baru Indonesia (1977 – 1997) Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 48
D. Partai-Partai Masa Reformasi Indonesia (1999) 60
BAB IV PARTAI PARTAI POLITIK YANG IKUT SERTA PEMILU **74**
A. Partai - Partai Pemilu Tahun 2004 74
B. Partai-Partai Pemilu Tahun 2009 87
C. Partai-Partai Pemilu Tahun 2014 102
D. Partai-Partai Pemilu Tahun 2019 118
DAFTAR PUSTAKA **134**
BIOGRAFI PENULIS **137**

BAB I SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Pengertian Sistem

Sistem disini mengacu pada segala hal yang bersifat teratur dan berkaitan dengan praktik kesosialan dan politik, bukan sistem dalam artian atau konteks dalam ilmu teknik atau matematika dasar. Dikarenakan konteks kesosialan, jadilah beberapa hasil *output* yang memungkinkan kita, untuk mengetahui definisi atau arti kata dari sistem itu sendiri, banyak para hali yang mengemukakan. Namun kami sendiri mendefinisikan sistem adalah sesuatu, yang bilamana kita ciptakan atau kita buat, haruslah berurutan. Entah itu dari urutan kecil sampai ke besar, urutan pendek sampai ke panjang, yang intinya pada urutan sesuatu yang masuk di akal untuk kita urutkan. Namun lain pendapat, lain juga tokoh yang mengemukakan, misalnya ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai pengertian sistem, di antaranya.

1. Pengertian Sistem Menurut Para Ahli

a. L. Ackof
   Sistem adalah satu kesatuan yang konseptual dan berdiri dari beberapa bagian dalam sebuah keadaan yang saling ketergantungan satusama lainnya.
b. John Mc. Manama
   Sistem ialah struktur yang terkonsep atau tersusun dari beberapa fungsi yang bekerja dan berkaitan untuk satu kesatuan untuk mencapai sebuah hasil yang di inginkan secara efektif dan efisien.
c. Henry Prat Fairchild
   Sistem merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan antara beberapa bagian dari hal yang terkecil, jika suatu bagian terganggu maka pada bagian yang lainnya akan merasakannya juga.
d. L. James Haver
   Sistem merupakan prosedur yang logis dan rasional, yang dapat berguna untuk melakukan atau merancang sebuah rangkian suatu komponen yang berkaitan satusama lain.
e. Djekky R. Djoht
   Sistem adalah agregasi atau pengelompokan objek-objek yang dipersatukan oleh beberapa bentuk interaksi yang tetap atau saling tergantung, sekelompok unit yang berbeda, yang dikombinasikan sedemikian rupa oleh alam atau oleh seni sehingga membentuk suatu

keseluruhan yang integral dan berfungsi, beroperasi, atau bergerak dalam satu kesatuan.

f. Azhar Susanto
   Sistem adalah kumpulan dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satusama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

g. Arifin Rahman
   Sistem merupakan suatu kumpulan pendapat pendapat, (collection of opinions), prinsip prinsip (principles), dan lain lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung hubungan satusama lain.

Adapun Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb.

B. Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang memiliki komponen (komponen), batas sistem (boundary), di luar lingkungan sistem (lingkungan), antarmuka (interface), masukan (input), keluaran (output), pengolahan (proses), dan tujuan (sasaran). Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Komponen (Komponen)
   Sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang berarti bahwa setiap bakerja bersama untuk membentuk serikat pekerja. Komponen sistem biasanya dikenal dengan subsistem. Subsistem memiliki hal sistem itu sendiri dalam fungsinya dan memiliki sistem keseluruhan.
2. Batasan Sistem (boundary)
   Pembatasan yang membatasi sistem merupakan daerah antara sistem dengan sistem lainnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Menunjukkan sistem membatasi ruang lingkup sistem.
3. Lingkungan Luar Sistem (environments)
   Lingkungan luar sistem di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bermanfaat serta merugikan sistem. Lingkungan eksternal yang menguntungkan merupakan energi

dari sistem dan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kehidupan kelansungan sistem.

4. Penghubung Sistem (Interface)
   Sistem link adalah media penghubung antara subsistem lainnya. Melalui interface ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya.
5. Masukan Sistem (Input)
   Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat pengobatan masukan (input pemeliharaan) dan sinyal input (sinyal input). Masukan energi pemeliharaan dimasukkan sehingga sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input diproses untuk mendapatkan keluaran energi.
6. Output System (Output)
   Keluaran sistem adalah hasil dari energi dalam meskipun dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Output dapat menjadi masukan bagi subsistem lain atau suprasistem.
7. Pengolahan Sistem (Proses)
   Suatu sistem dapat memiliki bagian pengolahan yang akan mengubah input menjadi output.
8. Sasaran Sistem (Objectives)
   Sebuah sasaran yang ingin dicapai untuk menentukan masukan yang diperlukan dari output sistem menjadi sistem yang dihasilkan.

C. Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, adalah sebagai berikut.

1. Sistem abstrak (abstract system) dan sistem (sistem fisik). Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik.
2. Sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (sistem yang dibuat manusia). Sistem sistem adalh alam yang terjadi melalui proses alam, tidak buatan manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi antara manusia dan mesin yang disebut sistem manusia-mesin.
3. Sistem tertentu (deterministic system) dan sistem tak tentu (probabilistic system). Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku

yang sudah dapat diprediksi. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depan tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

Sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka (open system). Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan eksternal. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan eksternal.

D. Pengertian Politik

Secara bahasa, sistem politik ialah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan dan kepastian yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang spesifik. Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian politik sebagai berikut.

1. Menurut Drs. Sukarno

   Sistem politik adalah gabungan ide, opini yang memformat satu kesatuan yang berinteraksi satu sama lain untuk mengelola pemerintahan dan melakukan dan menjaga kewenangan dengan cara mengelola seseorang ataupun suatu organisasi satu sama lain dengan Negara dan interaksi Negara dengan Negara lainnya.
2. Menurut Rusadi Sumintapura

   Sistem politik ialah prosedur selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam komponen politik dalam interaksi satu sama lain yang memberitahukan suatu proses yang tetap.
3. Menurut Gambriel Almond

   Sistem politik adalah sebuah sistem hubungan yang bisa dijumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian.
4. Menurut Samuel P. Huntington

   Sistem politik adalah makna, perilaku, penyesuaian, kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang bermakna dalam masyarakat.
5. Menurut Prayetno

   Sistem politik adalah sejumlah pemerintah maupun kegiatan politik di masyarakat yang berperan dalam transformasi input berupa prosedur yang berkuasa bagi masyarakat.

Perkembangan Ilmu Politik

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M., seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus, atau ilsuf-ilsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya.

Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan China, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 S.M. Di antara ilsuf China yang terkenal ialah Confucius (± 350 S.M.), Mencius (± 350 S.M) dan mazhab Legalists, antara lain Shang Yang (± 350 S.M.). Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme.

Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasan mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah Ilmu Negara (Staatslehre). Di Inggris permasalahan politik dianggap termasuk ilsafat, terutama moral philosophy, dan bahasannya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya

Ecole Libre des Sciences Politiques di Paris (1870) dan London School of Economics and Political Science (1895), ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, ilsafat, dan sejarah sampai Perang Dunia II masih tetap terasa.

Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak memengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik.

Pada tahun 1858 seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan kejadian ini di Amerika dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat, yang dapat dilihat juga dari didirikannya American Political Science Assosiation (APSA) pada tahun 1904. Sesudah Perang Dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) pada tahun 1947 (sekarang namanya Faculteit der Sociale Wetenschappen – Fakultas Ilmu Sosial) di Amsterdam.

Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama Ilmu Pemerintahan. Selain itu ada juga Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) seperti di Universitas Indonesia, Jakarta, di mana ilmu politik merupakan jurusan tersendiri. Akan tetapi, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada awal perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu. Namun demikian, dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal, dan sudah diterima baik oleh masyarakat. Sementara itu perkembangan ilmu-ilmu politik di negara-negara Eropa Timur

memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, Filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan, masih berlaku hingga dewasa ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990-an.

Ini dicirikan dengan masih berlakunya pendekatan tradisional tapi ditambah dengan pendekatan-pendekatan lain yang tengah berkembang di negara-negara Barat. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam Ilmu Politik, UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Proyek ini, yang dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University Amerika Serikat, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku Contemporary Political Science (1948). Sebagai tindak lanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang didirikan pada tahun 1949, menyelenggarakan suatu penelitian mendalam yang mencakup kira-kira sepuluh negara, di antaranya negara-negara Barat besar, di samping India, Mexico, dan Polandia. Pada tahun 1952 laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris, dan hasilnya disusun oleh W.A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Social Sciences: Political Sciences. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkaian penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi, dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Berkat berbagai usaha tersebut di atas, ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan (Science) Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan (science) atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu

pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan (science) itu? Karakteristik ilmu pengetahuan (science) ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol (controlled circumstances) misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia itu sangat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Oleh karena itu pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan deinisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu (the sum of coordinated knowledge relative to a determined subject) apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan.

E. Landasan Sistem Politik Indonesia

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan lonceng kematian bagi zaman kolonialisme Belanda maupun Jepang, dan dengan proklamasi pulalah roda sejarah mulai berputar. Seluruh kebijakan politik yang selama tiga setengah abad berjalan harus berhenti, bahkan ada bagian-bagiannya yang dengan serta merta harus dicampakkan. Diskriminasi perlakuan, seperti yang pada zaman Hindia Belanda menjadi kebijakan politik acuan, tidak pantas lagi dilanjutkan dan harus segera diganti dengan semangat egaliter, yaitu semangat persatuan dan persamaan kedudukan di antara segenap warga negara sehingga segenap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.

Setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, serta pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kaum nasionalis sekular yang keberadaannya merupakan warisan zaman penjajah. Belanda, demi mencegah terjadinya kevakuman, harus tetap bekerja untuk meneruskan fungsinya karena yang berubah hanyalah pemerintah dan pemerintahannya. Demikian pula, mereka yang semula menempati posisi sebagai elit bangsa belum berubah. Mereka yang sejak semula telah menjadi anggota PPKI, tetap menduduki posisinya pada badan tersebut yang setelah proklamasi dan disahkannya UUD 1945 berubah nama dan fungsi menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Untuk sementara, sambil menunggu diselenggarakannya Pemilihan Umum dalam pemilihan anggota-anggota MPR dan DPR, anggota komite diberi fungsi sebagai pengganti kedua lembaga tertinggi/tinggi negara tersebut dan merekalah yang menguasai mayoritas kursi di kedua lembaga tersebut.

Dengan demikian, baik dalam lembaga birokrasi maupun lembaga politik, komposisi kekuatan sosial politik sesudah proklamasi kemerdekaan mayoritas masih tetap dikuasai oleh golongan nasionalis sekular. Keadaan yang mulai berubah setahap demi setahap adalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di luar pemerintahan. Ketika perekonomian liberal menyebar tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa, administrasi politik atau pemerintahan penjajah masih terikat pada pendirian yang sangat menghindari perluasan kekuasaan (Onthoudings politiek).

Namun ketika tahun 1960-1965 mulai lahir generasi baru bangsa, yaitu generasi intelektual (semi intelektual) religius islami sebagai buah dari terjadinya mobilitas vertikal dari kalangan generasi anak-anak petani, pedagang, maupun buruh kecil yang mayoritas muslim. Iklim politik saat itu tidak memberi peluang bagi terjadinya mobilitas horizontal di kalangan generasi baru. Sistem politik yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang bersendikan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Beberapa tahun sebelum kewafatannya, mendiang Presiden Soekarno melontarkan gagasan tentang Nasionalisme-AgamaKomunisme (Nasakom). Gagasan itu, dalam waktu singkat cepat menjalar, karena didukung oleh kekuasaan beliau, namun tidak sedikit yang menentangnya. Landasan dari pemikiran beliau adalah kekhawatiran akan upaya mengadu domba antara golongan Nasionalis, Agama dan Komunisme. Golongan agama, di mata beliau hanya diwakili oleh dua kelompok, yakni Muhammadiyah dan

Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan kaum Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan terkadang Partai Murba juga digunakan beliau untuk menjadi penyeimbang dalam menghadapi golongan komunis tersebut.

Karena kesulitan dalam menyatukan sikap dan langkah internal golongan Nasionalis, ditambah keterpecahan sangat mendalam di tubuh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), maka mendiang Presiden Soekarno dalam tahun-tahun terakhir hidupnya memberikan tempat sangat besar pada PARTINDO (Partai Indonesia), yang sering dicemooh orang di belakang punggung beliau sebagai PARSOE (Partai Soekarno).

Dengan demikian, meskipun pada masa-masa itu hampir tidak terjadi mobilitas horizontal, namun tanpa sengaja telah terjadi mobilitas vertikal di kalangan umat Islam yang cukup besar dan sangat berarti. Bagi umat Islam terjadinya sumbatan politik pada masa itu, mereka menjadi bersih dari keterlibatannya dengan konspirasi yang dilakukan oleh golongan komunis dan nasionalis seular yang kemudian melakukan pemberontakan atau pengkhianatan terhadap negara dan pihak lain, karena relatif masih murahnya biaya pendidikan pada kala itu, mereka banyak yang berhasil melanjutkan studinya dan mencapai hasil-hasil yang cukup baik. Hal itu merupakan blessing in disguise yang kelak dapat dirasakan dampak positifnya, setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI.

Dalam aksi penumpasan spontan terhadap PKI dan para pendukungnya terjadi sebuah anomali (penyimpangan) karena penumpasan PKI tidak hanya dilakukan oleh kerjasama antara ABRI dan generasi baru muslim, tetapi juga oleh golongan nasionalis yang berusaha membersihkan dirinya dari pengaruh komunis dan golongan Nasrani yang pada masa-masa sebelumnya juga menjadi pendukung pemerintahan Nasakom.

Perlu dicatat, pada masa pemerintahan Nasakom kaum komunis berhasil menyelundupkan kader-kadernya ke dalam organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan yang berlabel nasionalis sekular yang baik pola pikir maupun sikap mereka menjadi sama dengan pola pikir dan sikap kaum komunis.

Nasionalisme sekular hanya merupakan hasil sampingan dari implementasi kebijakan politik Kolonialisme Belanda. Gagalnya pemerintahan kolonial melaksanakan kristenisasi untuk mewujudkan lapisan elit pendukung kolonialismenya pada satu pihak, dan keberhasilan pemerintah kolonial dalam melaksanakan deislamisasi pada pihak lain, telah melahirkan

lapisan kelas menengah baru di lingkungan penduduk bumiputra yang tidak menjadi Kristen tetapi telah berhasil dijauhkan dari Islam.

Mereka adalah penganut Sekularisme yang hendak secara tegas memisahkan seluruh aspek kehidupan dunia dari ajaran agama. Di negara-negara Eropa, paham sekularisasi telah berkembang dengan cepat dan berhasil memajukan negara-negara mereka dari keterbelengguan pemikiran para pemimpin gereja yang sangat bersifat doktriner karena perkembangan pemikiran di lingkungan bangsa-bangsa Eropa ketika itu memang terpasung oleh ajaran-ajaran agama Nasrani.

Bangsa Indonesia sudah meletakkan Indonesia di atas suatu fundamen yaitu Pancasila. Dan telah memilih Pancasila sebagai dasar yang fundamental bagi negara kita karena Pancasila itu sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno. Ernest Renan mengatakan bahwa "Setiap bangsa mempunyai suatu jiwa". (Une Nation, est Une ame). Jiwa bangsa yang satu berbeda dengan jiwa bangsa lainnya.

Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa, yang disebut Kepribadian Bangsa Indonesia. Lebih tegas, Pancasila itu adalah merupakan manifestasi dari Kepribadian bangsa Indonesia. Jadi tidak mungkin merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa lain, karena ini a priori akan ditolak oleh bangsa kita. Di atas dasar ini dapat menyatukan segenap unsur-unsur dari bangsa Indonesia. Tetapi pancasila itu tidak saja merupakan dasar yang statis juga merupakan tuntutan yang dinamis, seperti Bung Karno menyebutkan sebagai "leidster", bintang pimpinan, ke arah mana bangsa dan Negara Indonesia harus digerakkan. Pancasila tidak saja merupakan dasar dari Negara, tetapi juga merupakan jiwa dan pandangan hidup dari Bangsa Indonesia itu sendiri.

Prof. Notonagoro menjelaskan, bahwa yang dikemukakan bukanlah Pancasila dalam arti formal, tetapi sifat meterilnya yang dimaksud. Di sisi lain, Bung Karno mengatakan: "Bukankah saya selalu berkata, bahwa Pancasila itu bukanlah bikinan saya, saya gali sudah bertahun-tahun bahkan mulai tahun 1925, 1926 saya menggalinya.

Pancasila bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia. Jauh sebelum Bung Karno menemukan Pancasila, sila-sila dari Pancasila itu dalam pengertian materinya atau jiwanya sudah ada di dalam jiwa bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Dari hasil penggalian tersebut, Bung Karno merumuskan seperti apa yang dikemukakannya sendiri di muka Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dulu yang kemudian dikenal dengan nama

Bung Karno mengusulkan agar Negara Indonesia yang akan didirikan itu ditegakkan di atas kelima sila yang telah digalinya itu.

Karena kelima sila itu telah merupakan jiwa dan milik bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Dan menurut Bung Karno sendiri, atas petunjuk seorang ahli bahasa, kelima sia itu diberi nama Pancasila. Kemudian suara bulat sidang menerima Pancasila itu sebagai Dasar Negara yang kekal abadi, yang oleh Bung Karno sendiri disebut Philosophis Grondslag, dengan rumusan kalimat sebagai berikut.

1. Kebangsaan Bangsa
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila itu sudah menjadi milik dari Bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang, Pancasila itu telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan merupakan ilham yang timbul dari hati sanubari Bung Karno. Jauh sebelum Bung Karno menggalinya, Pancasila sudah terkandung di dalam jiwa bangsa Indonesia dan dari jiwa bangsa Indonesia itulah Bung Karno memperolehnya. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diposisikan sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia.

Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik maupun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

BAB II PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Sejarah Partai Politik Di Indonesia

Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik bermunculan dengan pengertian yang luas bahwa rakyat merupakan faktor yang harus diikutsertakan dalam proses politik. Dengan demikian, partai politik menjadi penghubung atau jembatan antara rakyat di satu sisi dengan pemerintah di sisi lain. Di negara-negara yang menganut demokrasi, gagasan partisipasi rakyat memiliki dasar ideologis, dan rakyat berhak menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan untuk membuat kebijakan publik. Tetapi di negara-negara totaliter, gagasan partisipasi yang populer didasarkan pada pandangan elit politik bahwa orang harus dibimbing dan dipelihara untuk mencapai stabilitas yang langgeng.

Miriam Budiardjo melihat lahirnya partai politik sebagai awal perkembangan di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis. Kegiatan politik awalnya terfokus pada kelompok politik yang membela kepentingan bersama kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Secara bertahap, untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok orang, kelompok politik berusaha mengembangkan organisasi massa untuk membangun hubungan yang langgeng antara kelompok politik dan kelompok massa orang yang berpikiran sama. Partai politik Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan merupakan warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan keinginan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan memelihara keutuhan demi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah partai politik Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode. Ketiga periode tersebut adalah zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka.

1. Partai Pada Masa Penjajahan Belanda

Keberadaan partai politik di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke zaman penjajahan Belanda. Pada saat ini, kekuatan politik mulai berkembang pada tahap pengelompokan, dan terus terpolarisasi, diperluas, dan dilembagakan 407. Partai politik Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan nasional yang menandai era kebangkitan nasional.

Berbagai organisasi modern telah muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.

Berbagai organisasi pada awalnya tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai partai politik, tetapi mereka memiliki program dan kegiatan politik. Munculnya berbagai organisasi politik dapat dilihat sebagai akibat dari pendidikan modern ketika pedoman politik etis diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan tuntutan birokrasi kolonial rendah, tetapi melalui gerakan politik membangkitkan kesadaran masyarakat dan cita-cita kemerdekaan sawah. Salah satu yang menonjol dari perubahan pemerintahan kolonial Belanda adalah terbentuknya Volkslad pada tahun 1916.411. Dewan pada awalnya memiliki kekuasaan konsultasi, bukan kekuasaan legislatif. Baru pada tahun 1925 Volkslad memiliki wewenang untuk mengajukan petisi, membahas dan menyetujui undang-undang di bawah Hukum Hindia Belanda. Namun, Gubernur memiliki hak veto, sehingga hak ini tidak terlalu tersedia. 413 Organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu adalah koperasi, dan sebagian mengikuti jalan non-koperasi. Dasar hukum yang berlaku di Hindia Belanda pada waktu itu adalah regeerings-reglement (RR) 1854. Pasal 111 RR menyatakan bahwa Hindia Belanda melarang pertemuan dan rapat umum untuk membahas masalah pemerintah atau membahayakan keselamatan umum. Pada tahun 1919, RR digantikan oleh Peraturan Negara Bagian India (IS) 1918. Ini termasuk larangan organisasi dan kelompok politik dalam Pasal 165. Adanya ketentuan tersebut berarti bahwa suatu organisasi politik tidak secara terbuka menampilkan dirinya sebagai organisasi politik dalam tujuan, program, dan kegiatannya.

Hal ini terlihat dari berdirinya Budi Utomo (BU) pada tanggal 20 Mei 1908, dan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911. Kedua organisasi ini tidak secara tegas mengaku sebagai organisasi politik.417 Meskipun demikian, dalam perjalanan perkembangannya kedua organisasi tersebut, program dan kegiatannya telah memasuki ranah politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan kedua organisasi tersebut dalam Volksraad.418 Bahkan, pada tanggal 23 Juli 1916, BU dan SI melakukan kegiatan politik yang menuntut ketahanan Hindia Timur. Pikiran. . Tindakan ini disebut Weerbaar Actie. Perwakilan BU dan SI yang juga merupakan anggota koalisi radikal tersentralisasi di Volksraad

menuntut keberadaan DPR sebagai parlemen pendahuluan untuk menetapkan hukum dasar sementara bagi Hindia Belanda.

Adanya dua organisasi politik ini menyebabkan munculnya organisasi partai politik yang berbeda. Partai-partai tersebut antara lain Indische Partij (IP), Insulinde, Indische Sociaal Demokratische Vereeniging (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (P mera), Partai Indonesia (Partindo), Indische Sociaal Demokratische Partij (ISDP), Indische Katholijke Partij, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Partai Rakyat Indonesia (PRI).

Selain berbagai partai politik, federasi organisasi politik juga telah dibentuk. Pada tanggal 17 Desember 1927, Persatuan Politik Nasional Indonesia (PPPKI) didirikan oleh PNI, PSI, BU, Sarikat Pasundan, Sarikat Sumatra dan Betawi. PPPKI berusaha untuk mengatur arah tindakan dan kerjasama, dan menghindari perselisihan yang merusak tindakan nasional.421 Pada tahun 1939, Persatuan Politik Indonesia (GAPI) didirikan.

Salah satu persyaratan politik GAPI adalah pembentukan parlemen Indonesia, legislatif bikameral. Memang, pada akhir Desember 1939, GAPI menyelenggarakan kongres Indonesia, menyatukan GAPI, MIAI423 dan Serikat Pegawai Negeri Sipil Vakbonden (PVPN). Tidak semua partai politik yang ada sebelum kemerdekaan mendapat status hukum dari pemerintah kolonial Belanda. SI tidak diakui sebagai badan hukum sampai tahun 1923. Demikian pula dengan IP, permohonan mereka ditolak oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 4 Maret 1913 karena dianggap sebagai organisasi politik hibah, kemajuan dan merupakan ancaman bagi keselamatan umum.

2. Partai Pada Masa Penjajahan Jepang

Berbeda dengan zaman penjajahan Belanda, di Indonesia kegiatan partai politik dilarang selama Jepang berkuasa. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kelompok Islam yang tergabung dalam Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia. Partai Mashmi mendirikan pemerintahan di bawah UUDS (Konstitusi AS), yang didirikan pada tahun 1950 oleh Presiden Sukarno, selama periode dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, selama Era Demokrasi Bebas Indonesia. Partai Islam didirikan pada Secara politik, posisi umat Islam di Indonesia dalam beberapa bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan tidak terlalu menggembirakan. Masyumi, salah satu partai politik yang didirikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia, merupakan partai Islam yang pernah terlibat dalam pemerintahan. Dalam posisi ini,

Masyumi berpartisipasi dalam prinsip politik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa keterlibatan Masyumi memunculkan aspirasi umat Islam saat itu dan mampu mempersatukan hampir seluruh ormas Islam di Indonesia. Menurut M. Nazir, salah satu tokoh Masyumi saat itu, Islam dipandang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai falsafah hidup yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan politik. Majelis Ala Islam Indonesia (MIAI).

Pendahulu sejarah Partai Masyumi berasal dari MIAI, koalisi ormas Islam yang dibentuk 18-21 September 1937. MIAI mengoordinasikan berbagai kegiatan di Indonesia dan menyatukan Islam untuk menghadapi berbagai taktik politik Belanda seperti hukum perkawinan dan dinas militer MIAI terus berfungsi dengan baik hingga Jepang masuk ke Indonesia. Saat itu, pihak Jepang menangkap KH. Hasyim Asyari menolak tunduk pada matahari terbit untuk menghormati kaisar Jepang. Jepang yang dilanda gelombang protes besar akhirnya membebaskannya dan mulai mengubah kebijakan politik Indonesia terhadap Islam. Jepang ingin menjadikan Islam Indonesia bagian dari kebijakan masa perang yang disebut Asian Joint Welfare Circle, sehingga pada tanggal 13 Juli 1942, diberikan izin kepada MIAI untuk melanjutkan kegiatannya.

Namun, karena Jepang secara bertahap mulai melihat MIAI sebagai ancaman, MIAI dibubarkan pada 24 Oktober 1943, setelah mengizinkan Muhammadiyah dan NU untuk kembali beraktivitas sebulan yang lalu. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membentuk Dewan Palm Islam Indonesia (disingkat Masyumi) untuk mempertahankan kontrol atas Islam Indonesia. Jepang membutuhkan organisasi yang dapat memenangkan dukungan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Jepang mendirikan Masyumi karena upaya Jepang untuk mencari dukungan nasionalis dari Pusat Tenaga Rakyat (Putera) gagal. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Masyumi belum menjadi partai politik, tetapi merupakan penggabungan dari empat ormas Islam yang terakreditasi: Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno mengusulkan pembentukan organisasi resmi sebagai Kepala Staf Gedung Putih, tetapi menjabat sebagai partai dan parlemen, dan kemudian dikenal sebagai Komisi Nasional. Pada saat yang sama, Sukarno juga ingin mendirikan satu partai, Partai Nasionalis Indonesia, sebagai penggerak perjuangan rakyat di lapangan dalam segala situasi. Tokoh lain yang menginginkan kehidupan demokratis menolak gagasan itu.

Muhammad Shafrir kemudian berusaha menggalang dukungan dari anggota Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan menuntut perombakan untuk memberikan kekuasaan legislatif Komisi Nasional. Sekitar 50 orang Sukarno setuju dengan usulan Charil karena 150 anggota KNIP menanggapi positif usulan Charil. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Deklarasi No. X Republik Indonesia. Sistem parlementer mulai mengakar, membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung di parlemen. Suara terbanyak mendominasi kabinet. Pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan dekrit yang merekomendasikan pembentukan partai politik. Partai Mashmi adalah partai Islam terbesar yang didirikan pada Era Demokrasi Merdeka Indonesia dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, di bawah UUDS (UUD AS) Presiden Sukarno 1950. Mendirikan sebuah partai politik. Secara politik, status umat Islam di Indonesia pada bulan-bulan pertama setelah kemerdekaan tidak terlalu menggembirakan. Masyumi, salah satu partai politik yang didirikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia, merupakan partai Islam yang pernah terlibat dalam pemerintahan. Dalam posisi ini, Masyumi berpartisipasi dalam prinsip politik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa keterlibatan Masyumi memunculkan keinginan umat Islam saat itu dan mempersatukan hampir seluruh ormas Islam di Indonesia. Menurut M. Nazir, salah satu tokoh Masyumi saat itu, Islam dipandang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai falsafah hidup yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan politik.

Majelis Ala Islam Indonesia (MIAI) Pelopor sejarah Partai Masyumi berasal dari MIAI, koalisi organisasi sosial Islam (Ormas) yang didirikan 18-21 September 1937. MIAI mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam Indonesia untuk menghadapi berbagai taktik politik Belanda seperti hukum perkawinan dan dinas militer MIAI terus berfungsi dengan baik hingga Jepang masuk ke Indonesia. Saat itu, pihak Jepang menangkap KH. Hasyim Asyari menolak tunduk pada matahari terbit untuk menghormati kaisar Jepang. Jepang yang dilanda gelombang protes besar akhirnya membebaskannya dan mulai mengubah kebijakan politik Indonesia terhadap Islam. Jepang ingin menjadikan Islam Indonesia bagian dari kebijakan perang yang disebut Asian Joint Welfare Circle, sehingga pada tanggal 13 Juli 1942 diberikan izin kepada MIAI untuk melanjutkan kegiatannya. Namun, Jepang secara bertahap mulai melihat MIAI sebagai ancaman. Alhasil, MIAI dibubarkan pada 24 Oktober 1943, setelah

mengizinkan Muhammadiyah dan NU kembali beraktivitas sebulan lalu. Cari tahu juga tentang sejarah Partind Partai Indonesia, sejarah PNI Partai Nasionalis Indonesia, dan sejarah Partai Indonesia Raya.

3. Partai Pada Masa Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang memutuskan untuk mengesahkan UUD 1945444 sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia. UUD 1945 tidak mengatur partai politik. Klausul yang relevan adalah Pasal 28, yang menyatakan bahwa "kebebasan berserikat dan berkumpul, bahasa lisan dan tulisan, dll. Harus ditetapkan dengan undang-undang." Ada komentar bahwa klausul ini tidak memberikan jaminan konstitusional. Kebebasan berserikat dan berkumpul, dan penyampaian pendapat baru ada bila hal itu diatur dengan undang-undang. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. PNI merupakan satu-satunya partai politik atau partai dalam kehidupan bangsa Indonesia dan diharapkan menjadi pelopor 446. Menyusul keputusan ini, persiapan dilakukan untuk pembentukan Partai Nasional Indonesia di wilayah tersebut. Namun, pada tanggal 31 Agustus 1945, dikeluarkanlah surat keputusan untuk menghentikan semua kegiatan persiapan dan pendirian PNI sebagai partai politik tunggal. Kedudukan Komnas ini dianggap begitu penting sehingga dimaksudkan untuk memusatkan perhatian dan tindakan kepada Komnas. Dalam pandangan Sukarno, gagasan sistem satu partai sudah ada sebelum kemerdekaan. Sukarno menjelaskan perlunya partai avant-garde pada tahun 1933 melalui surat berjudul Mentjapai Indonesia Merdeka. Sukarno percaya bahwa satu partai pelopor diperlukan, bukan beberapa, untuk mencapai kemerdekaan skala besar. Karena banyak orang membingungkan massa. Menurut Maswadi Rauf, Sukarno adalah sistem multi-partai anti-Barat dan demokrasi parlementer. Partai politik dipahami telah melemahkan perjuangan melawan kolonialisme, dan upaya untuk mengisi kemerdekaan partai menjadi sumber perpecahan.

Pandangan Sukarno satu partai berbeda dengan pandangan Shafrir, yang menolak konsep satu partai, karena itu adalah alat untuk mengendalikan dan mendisiplinkan perbedaan pendapat. Pandangan perkembangannya ini mempengaruhi usulan BPKNIP yang diketuai oleh Shafrir. Pengumuman Pokja Komite Ketiga Panitia Negara menyatakan bahwa pembentukan satu partai, Partai Nasionalis Indonesia, sebenarnya diperlukan untuk menyatukan

semua denominasi masyarakat untuk melindungi negara. Namun, Komite Nasional yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, Komnas HAMlah yang menyatukan berbagai denominasi, dan sejak 16 Oktober 1945 telah berkembang menjadi DPR yang mengusulkan pemberian kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Kehadiran partai politik akan memudahkan mengukur kekuatan perjuangan dan meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Pengumuman Pokja Komite Nasional yang mengusulkan pembentukan partai politik adalah sebagai berikut.

Oleh karena itu, sejalan dengan tuan tanah yang memanfaatkan independensi pertemuan dan kerja sama, Panitia Kerja berpendapat bahwa sudah saatnya kelompok untuk mempertimbangkan dengan cermat pergerakan rakyat. Anda dapat mengajukan pertanyaan berikut: Apakah kita perlu mempertahankan hanya satu partai atau membiarkannya mempengaruhi banyak partai untuk meruntuhkan ideologi dan denominasi yang populer di masyarakat kita? Kami mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, jadi tentu saja kami tidak bisa membiarkan satu partai saja. Sekali lagi, dalam kasus Partai Ito, mudah untuk mengukur kekuatan perjuangan kita. Untuk pemerintah, Poen Moedah meminta Djoega Oentoek untuk merespon para pemimpin garis depan. Oleh karena itu, kesimpulan Panitia Kerja adalah, asalkan konflik-konflik ini didasarkan pada pembatasan, perjuangan para pihak saat ini dapat dengan mudah dimulai, memperkuat perjuangan untuk melindungi kemerdekaan kita dan sekarang sangat banyak, itu ada di tempat yang terganggu.

Dengan penyederhanaan ini, Panitia Kerja Pemerintah mengusulkan agar Soloas dan Royce membentuk partai politik. Namun, partai-partai ini tunduk pada dukungan mereka untuk perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat kita. Pada tanggal 3 November 1945, atas usul Komisi Negara Indonesia Pusat (BP KNIP), pemerintah mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Presiden Sukarno akan mendukung pembentukan partai politik sehubungan dengan pemilihan umum berikutnya. Saya sedang berkunjung ke luar negeri.

MAKLOEMAT PEMERINTAH

Berhoeboeng dengan oesoel Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloeas-loeasnja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itoe hendaknja memperkoeat perdjoeangan kita mempertahankan

kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktoe jang laloe bahwa:

1. Pemerintah menjoekai timboelnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itoelah dapat dipimpin kedjalan jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sebeloemnja dilangsoengkan pemilihan anggata Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946.

Djakarta, tanggal 3 Nopember 1945.
Wakil Presiden,
MOHAMAD HATTA.

Partai politik berdasarkan Deklarasi 3 November 1945 bertujuan untuk "memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat". Partai politik disediakan sebagai sarana negara dengan ketentuan ini. Namun partai politik, sebagaimana dilihat oleh paradigma manajemen, bukan sekedar alat untuk mencapai stabilitas politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi alat untuk menjaga kemandirian dan menjamin keamanan. Tujuan fasilitas pernyataan dinyatakan sebagai pembatasan atau pembatasan. Sebagai peringatan, ketentuan ini sebenarnya dapat menjadi dasar pembubaran partai politik yang mencampuri atau mencampuri perjuangan kemerdekaan.

Selain itu, mengarahkan pembentukan partai politik dikatakan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Kehadiran partai politik mengubah keinginan menjadi program yang diperjuangkan pemikiran dan kebijakan publik yang sistematis dan teratur. Oleh karena itu, partai berperan sebagai mediator ide dan pelopor dalam masyarakat, membantu mengatasi perbedaan yang ada. Ketetapan 3 November 1945 juga menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi politik kecuali jika prinsip atau tindakannya melanggar prinsip demokrasi yang sah. Ketentuan ini dapat dilihat sebagai pembatasan terhadap partai politik yang terdapat dalam berbagai konstitusi negara modern.

Pembatasan ini juga dapat digolongkan sebagai pembatasan substantif menurut klasifikasi Komisi Venesia, khususnya ketentuan bahwa partai politik menganut prinsip demokrasi dan tidak boleh bertentangan dengan perjuangan atau kemerdekaan nasional. Pasal 4 Konstitusi Jerman, yang menyatakan

bahwa organisasi internal harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, dan Konstitusi Prancis, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan demokrasi harus dihormati. Namun, masalah pembubaran partai politik tidak diatur lebih lanjut dengan Dekrit 3 November 1945, maupun oleh peraturan perundang-undangan lainnya hingga masa demokrasi terkendali.

Pada Pemilu 1955, lahir empat partai politik besar: Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Dari tahun 1950 hingga 1959, sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena mereka memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan negara melalui sistem parlementer. Sistem multi-partai tidak berfungsi. Partai politik tidak bisa menjalankan misinya dengan baik, kabinet bisa naik turun dan menjalankan program kerjanya. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan dengan baik. Ketika demokrasi parlementer berakhir dengan dekrit 5 Juli 1959, itu menandai masa demokrasi terkendali. Pada masa demokrasi yang terkendali ini, peran partai politik mulai berkurang, sedangkan peran presiden sangat kuat. Partai politik yang sekarang dikenal sebagai NASAKOM (Negara, Agama, Komunis) diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin, terlihat jelas bahwa peran PKI lebih besar, terutama dalam G30S/PKI pada akhir September 1965. Setelah itu, Indonesia memasuki era orde baru, dan partai politik mampu berdiri lebih bebas daripada di era demokrasi. Peringatan pada titik ini adalah munculnya organisasi politik baru, Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum 1971, Golkar menang dari sebuah partai yang terdiri dari tiga partai politik besar: NU, Palmushi (Persatuan Muslim Indonesia), dan PNI. Pada tahun 1973, penggabungan partai politik menyederhanakan partai politik. Empat partai Islam, NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam, dan Perti, bergabung membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya, PNI, Partai Kristen Indonesia, Palati Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Pada tahun 1977, Indonesia hanya memiliki tiga organisasi pemerintahan, yang berlanjut hingga pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Suharto, Indonesia kembali menggelar pemilu multipartai. Dan itu akan berlanjut hingga pemilu 2014. Setelah kemerdekaan, Indonesia memperkenalkan sistem multi-partai, sehingga jumlah partai politik terlalu banyak. Pada awal Orde Baru (1965-1998), Indonesia hanya memiliki tiga partai politik: Partai Persatuan Pembangunan, Grup Kariya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa

reformasi, Indonesia kembali ke sistem multipartai. Pada 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia semenjak ketika kemerdekaan adalah:

- Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955)
- Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Kelompok Karya
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Kelompok Karya
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku ketika ini)

4. Pembatasan dan Pembubaran Partai Politik

Kehidupan partai politik Indonesia sebelum kemerdekaan mulai menurun setelah tahun 1930. Hal ini terjadi akibat kebijakan represif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal British Columbia de Jonge (1931) dan A.W.L. Tjarda van Starkenborg Stachouwer (1936) menolak mengakui organisasi gerakan nasionalis. Kebijakan represif ini didukung oleh ketentuan Pasal 35, 36, 37 dan 38 SI yang memberikan kekuasaan selangit kepada Gubernur Jenderal, yaitu hak untuk mengasingkan mereka yang dianggap membahayakan keamanan dan ketenangan. Partai politik juga diawasi ketat oleh Politieke Inlichtingen Dienst, badan intelijen politik saat itu. Pada tahun 1935, sebuah peraturan diterbitkan Beperkt Vergader Verbod (BVV) 427, yang memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk, setelah mendengar ulasan Raad van Indie, menyatakan bahwa suatu perkumpulan bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, Gubernur Jenderal juga dapat membatasi hak untuk mengadakan rapat. Semua pertemuan politik harus diberitahukan lima hari sebelumnya kepada otoritas

lokal, yang memiliki kekuatan untuk melarangnya. Adanya peraturan ini mengurangi aktivitas organisasi politik. Di antara partai-partai yang ada pada masa penjajahan Belanda, yang dibubarkan adalah IP, PKI dan PNI.429 Pembubaran partai-partai pada masa penjajahan Belanda terjadi pada saat aktivitas partai politik dipandang membahayakan pemerintah dan merusak stabilitas. Pada bulan Maret 1913, menyusul berkembangnya ide-ide radikal serta aksi mogok dan boikot, khususnya oleh Serikat Pekerja Kereta Api (Vereeniging van Spoor-enTramweg-Persnel), hak kekayaan intelektual dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Tiga pendiri IP diasingkan, yang pertama adalah non-Jawa. Douwes Dekker di Kupang, Tjipto Mangunkusumo di Banda dan Suwardi Surjaningrat di Bangka. Ketiganya kemudian dipindahkan ke Belanda. PKI dibubarkan karena memimpin pemberontakan pada 13 November 1926 di Jakarta, disusul dengan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Sumatera Barat pada 1 Januari 1927.

Namun, pemberontakan itu berhasil dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda dan para pemimpin PKI melarikan diri ke luar negeri. Beberapa dari mereka yang ditangkap dijatuhi hukuman mati, dipenjara atau diasingkan ke Boven Digul, Papua. Setelah pemberontakan, PKI dan salah satu organisasinya yaitu Persatuan Rakyat dibubarkan pada tanggal 23 Maret 1928 dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sebaliknya, itu adalah sarana untuk memobilisasi dukungan Indonesia untuk perang yang dipimpin Jepang. Meskipun pada masa pendudukan Jepang keberadaan partai politik sebagai organisasi tidak diakui, namun tokoh-tokoh partai politik tetap memegang peranan penting dalam upaya kemerdekaan. Bahkan ketika BPUPK441 dan PPKI442 dibentuk oleh pemerintah Jepang, keanggotaannya masih termasuk tokoh-tokoh nasional yang pernah menjadi pimpinan partai politik.

Partai yang ada dan berkembang sebelum kemerdekaan secara umum dapat digolongkan sebagai partai ideologis (weltanschauungs). Partai-partai tersebut memiliki fungsi dan program utama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Partai-partai ini menjalankan fungsi menghimpun dan mengartikulasikan aspirasi dan pemikiran rakyat untuk memperoleh kemerdekaan. Selain itu, ia menjalankan fungsi seleksi politik, membantu mengangkat tokoh-tokoh nasional dan perwakilan dari mereka yang menjadi anggota Volksraad.

Pendirian Masyumi pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membentuk Dewan Palm Islam Indonesia (disingkat Masyumi) untuk mempertahankan kontrol atas Islam Indonesia. Jepang membutuhkan organisasi yang dapat memenangkan dukungan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Jepang mendirikan Masyumi karena upaya Jepang untuk mencari dukungan nasionalis dari Pusat Tenaga Rakyat (Putera) gagal. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Masyumi belum menjadi partai politik, tetapi merupakan penggabungan dari empat ormas Islam yang terakreditasi: Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno mengusulkan pembentukan organisasi resmi sebagai Kepala Staf Gedung Putih, tetapi menjabat sebagai partai dan parlemen, dan kemudian dikenal sebagai Komisi Nasional. Pada saat yang sama, Sukarno juga ingin mendirikan satu partai, Partai Nasionalis Indonesia, sebagai penggerak perjuangan rakyat di lapangan dalam segala situasi. Tokoh lain yang menginginkan kehidupan demokratis menolak gagasan itu. Muhammad Shafrir kemudian meminta dukungan dari anggota Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menuntut perombakan untuk memberikan kekuasaan legislatif Komisi Nasional. Soekarno setuju dengan usulan Syahrir, karena sekitar 50 dari 150 anggota KNIP menyambut positif usulan Syahrir. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Deklarasi No. X Republik Indonesia. Sistem parlementer mulai mengakar, membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung di parlemen. Suara terbanyak mendominasi kabinet. Pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan dekrit yang merekomendasikan pembentukan partai politik. Berbagai kalangan, termasuk umat Islam, yang menggelar Konferensi Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7 dan 8 November 1945, menyambutnya dengan antusias. Sekitar 500 selebriti dan perwakilan hadir di sini, dan sebagai hasilnya, disepakati untuk mendirikan sebuah partai Islam yang disebut Masyumi, partai Islam di Indonesia, pada tanggal 7 November 1945.

B. Awal Pergerakan Politik di Indonesia

Berkembangnya kehidupan politik di Indonesia saat ini, tidak terlepas dari politik yang ada sebelumnya. Perjalanan politik pada masa sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi Negara pada masa tersebut. Di Indonesia organisasi politik modern yang pertama yaitu Budi Utomo, mereka terdiri dari golongan pemuda keturunan Priyayi dan merupakan kaum pribumi setelah pemerintah

belanda menerapkan politik etis di Indonesia.Maka di awal tahun 1900 di kenal sebagai masa pergerakan Indonesia, banyak kalangan generasi muda yang membentuk organisasi-organisasi modern ada yang bergerak dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan juga politik.

1. **Politik Etis (Politik Balas Budi)**

Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi. Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat. Tujuan dan Tokoh Politik Etis Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” , sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863.

Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan. Isi Politik Etis Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.

a. Irigasi dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.

b. Edukasi Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.
c. Emigrasi Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk

Dampak Politik Balas Budi, awalnya kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Dampak Negatif Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain. Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik.

2. Terbentuknya Budi Utomo

Boedi Oetomo (Budi Utomo) disebut-sebut sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah. Maka, tanggal berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari berdirinya Boedi Oetomo (BO) di Batavia atau Jakarta. BO didirikan oleh beberapa siswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) atau sekolah dokter untuk bumiputera, cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI).

Beberapa tokoh pendiri Boedi Oetomo antara lain : Soetomo, Soeraji Tirtonegoro, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan lainnya. Pendirian BO dapat diwujudkan berkat gagasan Wahidin Soedirohoesodo.

Latar Belakang Sejarah Menjelang akhir abad ke-19, kondisi Hindia Belanda atau Indonesia mulai mengalami perubahan. Seiring dengan diterapkannya Politik Etis atau Politik Balas Budi, orang-orang Belanda yang mendukung kesetaraan semakin banyak yang muncul. Salah satu orang Belanda pendukung etisme, kalangan etis mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada bumiputera atau kaum pribumi alias rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya Belanda berterima kasih kepada rakyat Hindia (Indonesia) karena telah memperoleh keuntungan besar selama berpuluh-puluh tahun menduduki Nusantara. Maka dari itu, van Deventer menawarkan solusi kebijakan yang dikenal dengan sebutan Politik Etis. Politik Etis merupakan kebijakan politik balas budi yang mencakup tiga bidang, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Pada kenyataannya, penerapan Politik Etis masih belum sesuai dengan yang diharapkan kendati rakyat Indonesia mulai bisa mengenyam pendidikan. Hal ini nantinya berdampak terhadap munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Kalangan intelektual bumiputera ini nantinya memulai abad ke-20 dengan perjuangan gaya baru. Tidak lagi melalui kekerasan yang bersifat kedaerahan, melainkan berjuang dengan mengedepankan pikiran dan organisasi. Masa-masa inilah yang kemudian disebut dengan era pergerakan nasional dengan Boedi Oetomo sebagai salah satu perhimpunan kebangsaan yang mengawalinya.

Nyoman Dekker dalam Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (1993: 19), menyebutkan bahwa Dokter Wahidin Soedirohoesodo adalah orang yang mula-mula dengan giat menyebarkan cita-cita pendirian organisasi. Wahidin Soedirohoesodo ingin agar di Jawa (Indonesia) dapat dibentuk suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan dan

membiayai anak-anak yang tidak dapat bersekolah namun memiliki kemauan serta potensi kecerdasan. Gagasan tersebut mendapat sambutan dari para siswa STOVIA di Batavia, terutama Soetomo, Goenawan, dan Soeraji. Setelah melalui serangkaian diskusi, maka pada 20 Mei 1908 didirikan sebuah perhimpinan yang diberi nama Boedi Oetomo. Terdapat 9 orang yang disebut sebagai para tokoh pendiri BO, antara lain Soetomo, Soeradji Tirtonegoro, Goenawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Soelaiman, Gondo Soewarno, Raden Ongko Prodjosoedirdjo, Mochammad Saleh, dan Raden Mas Goembrek. Dalam perjalanannya, banyak tokoh nasional yang bergabung dengan BO, seperti Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara), Tjipto Mangoenkoesomo, Tirto Adhi Soerjo, Pangeran Noto Dirodjo, Raden Adipati Tirtokoesoemo, dan seterusnya Boedi Oetomo punya peran penting dalam mengawali era pergerakan nasional sebelum kemunculan beberapa organisasi lainnya seperti Indische Partij (IP), Sarekat Islam (SI), dan lain-lain. Riwayat Boedi Oetomo berakhir pada 1935 setelah perhimpunan ini melebur ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra) di bawah pimpinan Soetomo.

Tujuan Boedi Oetomo Boedi Oetomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta pada Oktober 1908. Pada kesempatan tersebut, dipilih Raden Adipati Tirtokoesoemo sebagai ketua umum dan Wahidin Soedirohoesodo sebagai wakil ketua. Tujuan didirikannya Boedi Oetomo yang tercetus dalam kongres pertama itu adalah adalah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus pergerakan Boedi Oetomo adalah dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Baca juga: Kontroversi Sejarah Pemberontakan Ra Semi di Kerajaan Majapahit Sejarah Pemberontakan Ranggalawe di Kerajaan Majapahit Pendiri Majapahit & Sejarah Raden Wijaya Sang Raja Pertama Para Tokoh Boedi Oetomo Beberapa tokoh Boedi Oetomo antara lain: Wahidin Soedirohoesodo, Soetomo, Soeradji Tirtonegoro, Goenawan Mangoenkoesoemo, Mohammad Soelaiman, Gondo Soewarno, Raden Ongko Prodjosoedirdjo, Mochammad Saleh, Raden Mas Goembrek, dan lainnnya. Beberapa anggota lainnya ada yang memutuskan keluar dari Boedi Oetomo untuk kemudian mendirikan perhimpunan lainnya. Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesomo, misalnya, membentuk Indische Partij (IP) bersama Douwes Dekker. Sedangkan Tirto Adhi Soerjo menggagas berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang nantinya menjelma menjadi Sarekat Islam (SI) saat dikelola oleh Haji Samanhoedi dan Oemar Said Tjokroaminoto.

BAB III PARTAI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

A. Partai-Partai Awal Masa Kemerdekaan Indonesia (Tahun 1955)

Masa Pasca Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Belanda enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang menang di Perang Dunia II pun, merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sempurna berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi, Indonesia merdeka dalam kondisi sosial ekonomi yang masih sangat memprihatinkan.

Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang peredaran mata uang asing karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Mata uang asing yang beredar adalah De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia, juga berlaku mata uang NICA. Kondisi perekonomian makin parah karena NICA melakukan blokade.

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Melalui Maklumat X yang diumumkan oleh Bung

Hatta pada 3 November 1945 menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaan.

1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955

Sebelum pemilu tahun 1955 dilakukan, tentunya terdapat proses pendaftaran yang bertujuan agar seluruh warga dapat memiliki hak suara yang sah sebagai pemilih. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 dibagi menjadi dua tahap. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu.

a. Tahap pertama merupakan pemilu untuk memiloh anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
b. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 September 1955.

Selain untuk memilih anggota DPR dan Konstituante, pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPRD. Tapi, pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1957. Pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Juni 1957 untuk wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan tahap kedua berlangsung pada bulan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu: Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

2. Partai Masyumi

Masyumi mengawali sejarah partai politik Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Parpol Islam yang dibentuk sejak zaman pendudukan Jepang ini memiliki sederet tokoh terkemuka sebelum akhirnya dibubarkan di era Presiden Sukarno tahun 1960. Pendirian Masyumi merupakan penganti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang sudah dibentuk pada 1937 untuk

menaungi berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya. Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943 karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Kegagalan Jepang mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis melalui Putera (Pusat Tenaga Rakyat) juga menjadi salah satu faktor dibentuknya Masyumi. Awalnya, Masyumi belum menjadi partai politik, melainkan federasi yang menaungi organisasi Islam yang diizinkan pada masa pendudukan Jepang. Masyumi mendeklarasikan diri sebagai partai politik setelah Indonesia merdeka.

Masyumi ditetapkan menjadi partai politik pada 7-9 November 1945 di Yogyakarta. Dalam kongres pertama itu, Masyumi mendeklarasikan diri sebagai partai Politik dan bukan lagi organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Salah satu alasan berubahnya haluan Masyumi disebabkan oleh keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik. Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat sejak berkat bergabungnya organisasi-organisasi Islam dari berbagai daerah. Tersebutlah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam, Persatuan Islam di Bandung, serta Jami'ah Al-Wasliyah dan Al-Ittihdiyah di Sumatera Utara. Menyusul kemudian Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Al-Irsyad, Mathul Anwar, Nahdatul Wathan, dan lainnya. Masyumi juga mendukung upaya diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang kemudian terwujud pada 27 Desember 1949 setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB).

Tahun 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi. NU sudah merasa tidak nyaman sejak pelaksanaan Muktamar Masyumi IV di Yogyakarta pada 15-18 Desember 1949. Salah satu alasan NU hengkang adalah adanya perubahan Majelis Syuro menjadi badan penasehat, serta kedudukan wakil NU di jajaran pimpinan partai tidak seimbang dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Tanpa NU, kiprah Masyumi jalan terus. Di Pemilu pertama tahun 1955, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI). NU yang juga ambil bagian dalam pesta demokrasi pertama di Indonesia itu menempati urutan ketiga, sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di posisi keempat. Banyak tokoh Masyumi yang menempati posisi penting di pemerintahan, bahkan perdana menteri, seperti Mohammad Natsir (6 September 1950-21 April 1951), Sukiman

Wiryosanjoyo (26 April 1951-1 April 1952), hingga Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956).

Dikutip dari M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia (1991), beberapa tokoh Masyumi dianggap terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958. PRRI disebut-sebut melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia di bawah rezim Presiden Sukarno. Meningkatnya aktivitas PRRI membawa dampak negatif bagi Masyumi, terutama di daerah-daerah yang bergolak. Pemerintahan Sukarno pun mengeluarkan peringatan tertanggal 5 September 1958 tentang larangan terhadap sejumlah partai politik atau organisasi, termasuk Masyumi, di Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, serta Sulawesi Utara dan Tengah. Akibatnya, pelaksanaan Muktamar Masyumi IX pada 23-27 April 1959 di Yogyakarta tidak melibatkan perwakilan partai dari daerah-daerah tersebut dan berdampak terhadap kemerosotan jumlah anggota.

Tahun 1960, tulis Mestika Zed dalam buku Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang (2001), Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden terkait kebijakan anti-multipartai. Presiden Sukarno menegaskan bahwa partai politik di Indonesia tidak usah terlalu banyak jumlahnya karena akan membuat rakyat bingung. Kebijakan inilah yang kemudian memungkasi riwayat Masyumi. Masyumi menghadapi keputusan ini dengan dua cara. Pertama, Masyumi dinyatakan bubar per tanggal 13 September 1960 untuk menghindari cap partai terlarang dan jatuhnya korban. Kedua, Masyumi melayangkan gugatan kepada Sukarno di pengadilan, namun usaha ini gagal. Adapun menurut Ken Ward dalam The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia (1970), Masyumi dibubarkan paksa karena menolak menyalahkan PRRI. Disebutkan pula, beberapa anggota senior Masyumi dipenjara dengan tudingan terlibat pemberontakan. Banyak tokoh Islam yang pernah bergabung dengan Masyumi, di antaranya adalah.

a. Hasyim Asy’ari
b. Sukiman Wiryosanjoyo
c. Wahid Hasyim
d. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)
e. Prof. Dr. KH. Aboebakar Atjeh
f. Mohammad Natsir
g. Burhanudin Harahap
h. Syafruddin Prawiranegara

i. Mohammad Roem
j. Muhammad Isa Anshari
k. Kasman Singodimedjo
l. Dr. Anwar Harjono

3. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, Sartono, Iskak Tjokroadisurjo, dan Sunaryo.

Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspreksikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno, membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928, terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan tujuh pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Sampai akhirnya, pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi Presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama partai pra-perang Soekarno. Tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia di antaranya.

a. Tjipto Mangunkusumo
b. Sartono
c. Iskaw Tjokrohadisuryo
d. Sunaryo
e. Soekarno
f. Moh. Hatta
g. Gatot Mangkoepradja
h. Soepriadinata

i. Maskun Sumadiredja
j. Amir Sjarifuddin
k. Wilopo
l. Hardi
m. Suwiryo
n. Ali Sastroamidjojo
o. Djuanda Kartawidjaja
p. Mohammad Isnaeni
q. Supeni
r. Sanusi Hardjadinata
s. Sarmidi Mangunsarkoro

Pada tahun 1929 PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan. Perintah tersebut diberikan pada 24 Desember 1929 dan penangkapan baru dilakukan tanggal 29 Desember 1929 terhadap para tokoh PNI di Yogyakarta. Mereka adalah Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata, dan Maskun Sumadiredja. Kemudian pada tahun 1930 Para tokoh diadili pada 18 Agustus 1930. Setelahnya mereka dimasukkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tahun 1931 Pimpinan PNI, Soekarno, diganti oleh Sartono. Kemudian Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada 25 April 1931. Namun, hal tersebut ditolak oleh Moh. Hatta, sehingga dibentuk kembali PNI-Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Tahun 1955 PNI memenangkan pemilu 1955. Kemudian di tahun 1973 PNI bergabung dengan empat peserta pemilu 1971 dan terbentuk Partai Demokrasi Indonesia 1999 PNI menjadi peserta pemilu 1999. Tahun 2002 PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme dipimpin oleh Sukmawati Soekarnoputri, anak dari Soekarno.

4. Partai Nahdlatul Ulama (NU)

NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis (sesuai dengan mazhab Syafi'i) dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pandangan keagamaan NU dianggap "tradisionalis" karena menoleransi Adat dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini membedakannya dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap "reformisme" karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

Beberapa tokoh NU adalah pendukung konsep Islam Nusantara, sebuah ciri khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribumisasi, interpretasi, dan vernakulariasi sesuai dengan kondisi adat istiadat dan sosial budaya di Indonesia. Islam Nusantara mempromosikan moderasi, anti fundamentalisme, pluralisme, dan pada titik tertentu, sinkretisme. Namun, banyak sesepuh, pemimpin, dan ulama NU telah menolak Islam Nusantara dan memilih pendekatan yang lebih konservatif.

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), dll. Agama diwakili Partai Nahdhatul Ulama, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dll. Dan Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.

5. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada 9 Mei 1914 Henk Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu pulang beberapa anggota ISDV juga

merupakan anggota Sarekat Islam (SI) yang popularitas sedang melejit. Salah satunya, Semaoen yang pada 1914, SI Surabaya yang dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto merupakan guru politik Semaoen.

Semaoen kemudian memimpin SI Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sneevliet sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda.

ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Semaoen dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Semaoen terpilih sebagai Ketua, Darsono Wakil Ketua, Piet Bergsma sebagai Sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai Bendahara. Adolf Baars, J. Stam, Dengah, C. Kraan, dan Soegono menjadi komisaris partai.

Harry A. Poeze dalam bukunya Tan Malaka: pergulatan menuju republik 1897-1925 menyebutkan Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusioner Indonesia.

Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian taktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun usul tersebut ditolak Semaoen. Tan Malaka sempat pula menggantikan Semaoen sebagai ketua PKI pada 1921.

PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tapi berhasil dipadamkan. Tokoh dan ribuan anggota PKI dibuang ke Boven Digul. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Tokoh-tokoh PKI diantaranya.

a. Henk Sneevliet
b. Musso
c. Dipa Nusantara Aidit
d. Amir Syarifuddin
e. Semaun
f. Njoto
g. Oetomo Ramelan
h. Abdul Latief Hendraningrat
i. Alimin Prawirodirdjo
j. Darsono
k. Misbach

Pada 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Sjarifuddin dan Muso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan Komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, di antaranya.

a. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Muso-Amir.
b. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri.

Kemudian pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Dalam operasi ini, Musso, Amir dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati.

6. Gerakan 30 September (G30S PKI)

Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari, saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa (pasukan pengawal Istana) memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

Adapun keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 S PKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya

menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, beberapa tujuan G30S PKI adalah sebagai berikut.

a. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis.
b. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan.
c. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis.
d. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.

Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.

B. Partai-Partai Masa Orde Lama Indonesia (Tahun 1971) Masa Orde Lama/Orla atau Demokrasi Terpimpin

Indonesia mengalami tiga era yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (Sekarang) setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Orde Lama/Orla atau Demokrasi Terpimpin merupakan masa kedua berdasarkan sudut pandang perkembangan sejarah Indonesia tahun 1959-1965 pada periode pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dimana saat itu, pemerintahan Indonesia mengalami masa peralihan dari sistem presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa Orde Lama ini partai politik sangat mendominasi, terdapat banyak sekali partai politik saat itu. Partai politik lahir di Indonesia pada dasarnya sebagai alat integrasi masyarakat untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, namun ternyata dengan banyaknya partai politik menjadikan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif. Dengan begitu melalui Demokrasi Terpimpin maka Soekarno mencoba menerapkan gaya represif dimana Demokrasi Terpimpin merupakan suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Hal tersebut menyebabkan beberapa partai politik ada pada status dibubarkan atau menolak tentang itu.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor X tanggal 3 November 1945 dimana di dalamnya berisi mengenai bahwa mengharuskan warga negara untuk membentuk sebuah partai politik. Tentu saja hal itu disambut baik oleh warga negara salahsatunya oleh umat Islam. Para tokoh-tokoh umat Islam

kemudian menggelar Kongres di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945. Lahir poin penting yaitu: "Pertama, pembentukan partai politik dengan nama Mayumi. Kedua, Mayumi menjadi salah satunya partai politik yang dimiliki umat Islam, tidak ada partai politik partai politik Islam lainnya" (Tim Litbang *Kompas*, 2016:178).

Pada masa ini terdapat beberapa partai politik di antaranya; pertama, PNI (Partai Nasional Indonesia) dipimpin oleh Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Mr. Sunaryo yang berdiri pada 4 Juli 1927 yang lahir dari penggabungan antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing masing telah berdiri antara November dan Desember 1945. Lalu kedua, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) didirikan oleh H. Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Ketiga, NU (Nahdlatul Ulama/Kebangkitan Ulama) dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ariy yang berdiri pada 31 Januari 1926. Dan terakhir keempat yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) didirikan oleh tokoh-tokoh dari Partai Masyumi.

1. **Partai Nasional Indonesia (PNI)**

Partai Nasional Indonesia atau disingkat menjadi PNI merupakan sebuah partai politik yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927, beliau mendirikan partai politik ini berawal dari Algemeene Studie Club atau tempat kelompok belajar umum yang didirikan olehnya pada tahun 1925 di Bandung untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia, berasakan berdiri di atas kaki sendiri, nonkoperasi dan merhainisme, terlepas dari segala penjajahan. PNI menjadi partai politik tertua di Indonesia didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia.

PNI didirikan untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita yang disebarkan, dihidupkan oleh Penghimpunan Indonesia di Nederland. Hal ini dikarenakan 5 dari 8 pendiri baru saja kembali dari Nederland dan semuanya bekas dari anggota PI di Nederland. Dengan tegas dikatakan bahwa tujuan dari PNI untuk mencapai Indonesia merdeka (Tirtoprojo, 1986 : 71).

Dalam peanggotaan PNI, disebutkan bahwa anggota PKI tidak diperkenankan untuk menjadi anggota. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Tokoh dari Partai Nasional Indonesia (PNI) di antaranya Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Mr. Sunaryo, Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Gatot

Mangkoepradja, Soepriadinata, Maskun Sumadiredja, Amir Sjarifuddin, Wilopo, Hardi, Suwiryo, Ali Sastroamidjojo, Djuanda Kartawidjaja, Mohammad Isnaeni, Supendi, Sanusi Hardjadinata, dan Sarmidi Mangunsarkoro.

Dalam meluncurkan partai dengan hati-hati dan dalam usahanya untuk memastikan suatu dasar organisasi yang kuat, pemimpin-pemimpin PNI tidak mengabaikan potensi politik organisasi-organisasi pemuda di Bandung, yan diberi nama Jong Indonesia (Indonesia Moeda), yang dalam bulan Desember berubah namanya menjadi Pemuda Indonesia. Jong Indonesia sebagian besar melayani murid-murid sekolah menengah dan menjadi sumber penting untuk mendapat calon-calon anggota PNI (Ingleson, 1988 : 36).

PNI lahir dari penggabungan antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing masing telah berdiri antara November dan Desember 1945. Pada tahun 1928 nama Perserikatan Nasional Indonesia diganti dengan Partai Nasional Indonesia. Karena memiliki tujuan untuk mecapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia, maka partai ini merupakan momok yang paling menakutkan bagi bangsa Belanda sampai pada 24 Desember 1929 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja setelah itu pada 18 Agustus 1930 diadili di pengadilan Belanda dengan dimasukkannya para tokoh negara pada jeruji besi Sukamiskin daerah Bandung selama 4 (empat) tahun. Saat sebelum itu, Soekarno melakukan pembelaannya dengan menulis pidato yang berjudul “Indonesia Menggugat” di dalamnya beliau menelanjangi kolonialisme Belanda secara terang-terangan yang membuat dirinya mendapat hukuman. Dengan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh anggota PNI, pada tahun 1931 Partai Nasional Indonesia memutuskan pembubaran dengan alasan dari segi keselamatan pemimpinnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, PNI bangkit kembali menjadi partai yang kuat pada masa pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1955 Partai Nasional Indonesia ini memenangkan Pemilihan Umum atau Pemilu akibat terpecahnya suara umat Islam, yaitu keluarnya NU dan PSII dari Partai Masyumi pada Pemilu Anggota DPR pada tanggal 29 September 1955. dan setelahnya 1973 bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia. PNI muncul kembali pada tahun

1998 dengan mengikuti pemilu tahun 1999 dengan nama PNI Soepani serta mengubah namanya kembali menjadi PNI Marhaenisme diketuai oleh Sukmawati Soekarno yang tidak lain anak dari Soekarno. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme bertujuan menjadi memberikan prioritas kepada perbaikan nasib buruh, petani, dan nelayan.

2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

Partai politik bernama Syarikat Islam Indonesia ini berdiri sejak era kolonialisme dan merupakan organisasi massa tertua serta salahsatu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia dan partai politik Indonesia yang berideologi Islam dengan begitu Syarikat Islam (SI) merupakan pelopor gerakan nasional Indonesia yang paling awal. Partai Syarikat Islam Indonesia atau disingkat PSII didirikan oleh H. Samanhudi pada 16 Oktober 1905 di Solo yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) namun pada 10 November 1912 berubah menjadi Syarikat Islam dan tahun 1929 SI kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan politik dan memanifestasikan dirinya menjadi partai politik. SI berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Tujuan dari partai ini untuk menyatukan para pedangan muslim dalam menjadikan ekonomi pribumi lebih maju guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu sebab saat itu perdagangan di Tionghoa dapat dikatakan lebih maju dibandingkan pedangan muslim pribumi dengan begitu mereka memiliki status lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya.

George McTurner Kahin berpendapat bahwa Syarikat Islam (SI) adalah organisasi nasionalis pertama di Indonesia yang bergerak di ranah politik. Dari "Rahim" gerakan SI lahir tiga gerakan politik yang kontribusinya sangat signifikan bagi Indonesia yaitu Partai Nasional Indonesia berdasarkan Nasionalisme dipimpin Soekarno (1927), Partai Komunis Indonesia pimpinan Semaun (PKI, 1920) dan gerakan Darul islam pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo.

Pada awal menjadi partai politik, PSII merupakan partai yang relative besar, disegani, dan memiliki banyak tokoh negarawan piawai. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, Partai Syarikat Islam Indonesia seiring bertambah waktu menjadi organisasi yang berkembang pesat dalam waktu yang singkat sebab identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis. Tokoh PSII yang dikenal sebagai negarawan terkemuka meliputi H. Agus Salim, Abdul Muis, Arudji Kartawinata, Mohammad Roem, Abu Hanifah, Anwar Tjokroaminoto, dan Harsono Tjokroaminoto. Setelah kepemimpinan

H. Samanhudi, Tjokroaminoto mendapatkan kepercayaan untuk meneruskan perjuangan dari beliau yaitu menjadi pemimpin baru dari Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada tahun 1913 tepatnya bulan Januari, Partai yang memiliki singkatan PSII ini menegaskan bahwa organisasinya bukanlah sebuah partai politik. Pada tahun ini pun awal mula didatangkan ajaran komunis yang mempengaruhi masyarakat oleh ajaran yang dibawa oleh Hendrio Joshepus Maria Sheevliet mengenai komunis, maka tidak lama dari itu organisasi ini mulai terjadinya perpecahan pada tahun 1929. Dengan begitu, terjadilah perpecahan yang terbagi menjadi dua yaitu SI Merah dan SI Putih. Dimana SI Putih merupakan organisasi berhaluan kanan yang diketuai oleh Tjokroaminoto sedangkan SI Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semau dari Semarang, menentang adanya percampuran antara agama dan politik dalam organisasi mereka. Disintegrasi ini disebabkan baik oleh pertikaian paham atau ideology yang mendasar seperti antara penganut aliran Marxisme melawan aliran Islam atau disebabkan oleh hal-hal yang tidak prinsipil dan emosional seperti pengaruh dan masalah pribadi.

Setelah perpecahan yang disebabkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), pada tahun 1923 Tjokroaminoto pada konferensi organisasi mendirikan Partai Syarikat Islam untuk menyingkirkan organisasi PKI. Setelah didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 oleh Soekarno untuk menyatukan organisasi-organisasi politik Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia mendukung hal tersebut. Dan dalam beberapa tahun ke depan menyerang nasionalisme pihak lain, mengklaim bahwa nasionalisme datang dari manusia bukan dari Tuhan. Saat pemimpin dari PSII yaitu Tjokroaminoto meninggal dunia serta kolonial Belanda menekan aktivitas yang dilakukan oleh mereka kemakmuran PSII memudar pada tahun 1934. Namun, pada tahun 1943 Jepang mendirikan sebuah organisasi bernama Masyumi dalam upaya untuk mengendalikan Islam di Indonesia.

Tahun 1953 terjadi pemecatan terhadap Abikusno Tjokrosuyoso dan pengikutnya, yang kemudian membentuk badan PSII baru dengan disebut “PSII Abikusno”. Kemudian tahun 1972 terjadi perebutan kekuasaan oleh Gobel dan kawan-kawan terhadap kepemimpinan PSII pilihan Kongres Majalaya tahun 1972. Terakhir pada tahun 1983 Syarifuddin Harahap kembali mengambil alih Gobel. Kejadian-kejadian tersebut merupakan suatu tragedi bahwa peranan PSII yang masa-masa permilaan kelahirannya merupakan

organisasi yang berpengaruh pada akhirnya terkotak-kotak akibat perpecagan demi perpecahan.

Kondisi PSII yang demikian rapuh mempengaruhi hubungan antara pemimin dengan massanya. Semuanya itu pada akhirnya berpengaruh terhadap PSII sebagai sebuah kekuatan politik karena jumlah kader dan massanya mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Dalam pemilihan umum 1971 sebagian besar partai berfusi dalam partai lain dan ada pula yang dibubarkan. Pada pemilihan ini, PSII kembali di urutan 5 dengan perolehan suara sebanyak 1.308.237 (2,39%) dan mendapatkan 10 kursi dari 360 kursi yang tersedia. Pada Januari 1973, partai ini bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama 3 (tiga) partai keagamaan yaiu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

3. Nahdlatul Ulama/Kebangkitan Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama/Kebangkitan Ulama atau lebih dikenal dengan sebutan NU didirikan pada 31 Januari 1926 yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ariy. Pada masa Orde Lama Nahdlatul Ulama termasuk partai politik yang berperan serta dalam arena politik di bawah payung anggota Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) yang bertindak sebagai federasi politik pan-Islam bahkan sebelum menjadi pemimpin NU, Hasyim Asy'Asy'ary menjadi ketua Partai Masyumi. Pada tahun 1952 dalam Muktamar NU ke-19 di Palembang, NU mengundurkan diri dari bayang-bayang Partai Masyumi yang pada awalnya menjadikan NU dan Muhammadiyah dalam satu kesatuan dengan alasan ulama NU sebagian besar tidak mendapat ditempatkan pada posisi penting dalam sistem kepengurusan dan setiap keputusan Partai Masyumi padahal sebelumnya menjadi salahsatu sayap terpenting dalam Masyumi pada 1952 dan adanya pembagian kursi cabinet yang dirasakan merugikan NU. Dengan begitu, lahir Nahdlatul Ulama dengan mendirikan partai politik tersendiri hingga pada tahun 1972. Nahdlatul Ulama/Kebangkitan Ulama menjadi bagian dari partai politik dari tahun 1952 hingga 1972 kurang lebih sekitar 20 tahun setelah itu tidak lagi berperan sebagai partai politik. Maka dari itu, NU memiliki pengalaman yang sangat banyak, dengan pengalamannya mengenai politik telah ikut andil terhadap budaya politik dan kepemimpinan organisasi dan persepsi mereka terhadap negara.

Puncak dari konflik di Masyumi ditandai dengan keluarnya unsur-unsur penting Mayumi seperti NU yang mendirikan Partai NU, juga PSII. Konflik internal Mayumi dengan tokoh-tokoh NU ditengarai oleh adanya perebutan kursi Menteri Agama di Kabinet Wilopo. Pada cabinet sebelumnya, NU memang mendapat jatah kursi menteri agama tiga kali berturut-turut. Oleh sebab itu, kelompok modernis dalam Mayumi menginginkan agar jabatan tersebut diberikan kepada Muhammadiyah, Fakih Usman. Akibat dari tidak terima atas hasil tersebut, pada Muktamar NU ke-19 di Palembang April 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi (Amir, 2003:41).

Jadi, faktor yang menyebabkan NU keluar dari Partai Mayumi bukan hanya karena tidak mendapatkan jatah kursi kabinet, tetapi juga diakibatkan sikap kelompok modernis di Partai Masyumi yang mengesampingkan ulama Nahdlatul Ulama.

Pada 1973, Suharto memaksa NU untuk bergabung bersama dengan 3 (tiga) partai politik lainnya dengan membentuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang secara apolitik tidak efektif. NU mengundurkan diri secara total dari arena politik pada 1984 agar organisasi ini dapat berkonsentrasi secara penuh dalam menyelenggarakan program dan kegiatan sosial dan keagamaan (Kingsbury, 2002:11).

Partai NU termasuk kepada salahsatu partai yang besar pada masa Orde Lama/Orla atau Demokrasi Terpimpin meskipun tidak sebesar Partai Masyumi, sebab ketika Partai Masyumi tidak bisa menyesuaikan diri dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno namun NU sebaliknya bersikap menyesuaikan diri dengan hal tersebut, bersikap akomodatif ini yang menjadikan mereka dapat bertahan dalam demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno. Dengan begitu, NU dianggap sebagai pendukung utama gagasan Soekarno. Tokoh-tokoh NU yang ikut andil bagian dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno antara lain adalah KH. Idham Chalid, beliau mengatakan bahwa “Masuk dalam sistem demokrasi terpimpin adalah sesuai dengan hukum Allah”, kemudian K.H. Achmad Sjaikhu, mengatakan bahwa “Masuk dalam sistem demokrasi terpimpin adalah ijtihad politik pihak pesantren”, dan K.H. Saifuddin Zuhri yang menjabat sebagai Menteri Agama pada masa Demokrasi Terpimpin.

Alasan NU memilih bergabung dengan DPR baru bentukan Presiden Soekarno tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik, tetapi berdasarkan pada kepentingan bersama umat Islam. NU menyadari bahwa

kekuatan Islam politik tidak mampu mengalahkan kekuatan Presiden Soekarno yang juga didukung oleh kekuatan politik (partai maupun militer). Oleh sebab itu, NU menggunakan dalil kaidah ushul fiqh dalam menempuh jalan politik "*dar al-mafasid muqoddamun ala jalbi al-masalih*" (menghindari kerusakan didahulukan daripada melaksanakan kebaikan).

Ketika sidang MPRS 18 Mei 1963 dimana saat itu mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, partai NU mendukung hal tersebut dan mencari dalil agama sebagai pembenaran atas sikap mereka meskipun hal tersebut tentu suatu bentuk penyimpangan dari UUD 1945. Ahmad Sjaikhu yang saat itu menjadi juru bicara pada sidang tersebut menggunakan beberapa pertimbangan; pertama, pertimbangan politik. Bagi NU, betapa luar biasanya jasa Soekarno bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan prestasi ini, sudah selayaknya Soekarno memperoleh kehormatan tertinggi. Kedua, pertimbangan revolusioner. Dalam hal ini, Sjaikhu membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad saw, yang telah memimpin revolusi di Jazirah Arabia.

Antara partai NU dan Soekarno seakan-akan menjadi membutuhkan antara satu sama lain, hubungan di antara keduanya pun terjalin sangat baik. Dimana saat sistem Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) diciptakan oleh Soekarno partai NU pun mendukung apa yang dilakukan bersama partai Islam lainnya yang mendukung demokrasi terpimpin serta pendukung-pendukung Soekarno dari pihak nasionalisme dan komunisme. Mengapa demikian, karena bagi NU apabila melawan kekuasaan Soekarno lebih berbahaya daripada menerima tanpa protes dan tindakan tersbeut akan sia-sia sebab saat itu Soekarno memiliki dukungan kuat dari militer angakatan darat.

Pada tahun 1971, Partai Nahdlatul Ulama unggul dengan peroleh suara sebanyak 10.213.650, dan menempatkan 58 wakilnya di DPR pada Pemilu tahun tersebut. Setelah Pemilu 1971 diselenggarakan, pemerintah mengambil kebijakan bahwa jumlah partai harus disederganakan. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan fusi partai. Partai NU salahsatunya difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Deklarasi yang dihadari oleh perwakilan tokoh-tokoh partai yang menjadi deklarator, KH. Idham Khalid dan KH. Masykur mewakili NU. Alasan utama penyederhanaan ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik. Dengan stabilitas politik, pemerintah menganggap bahwa pembangunan akan muda diwujudkan.

4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Masyumi dimana kalangan umat Islam melakukan berbagai pertemuan berupaya untuk mendirikan partai Islam baru pantang surut dengan membentuk Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM). Melalui BKAM yang dibentuk pada Desember 1965, mereka kemudian mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 7 April 1967. Pada 7 Mei 1967 terbentuk Panitia 7 (Tujuh), yaitu KH. Faqih Usman (Ketua), Anwar Harjono (Wakil Ketua), Agus Sudono (Sekretaris), dngan anggota Nj. RAB Sjamsuridjal, Marzuki Jatim, Hasan Basari, dan EZ Muttaqin. Disepatilah pembentukan Partai Muslimin Indonesia atau disingkat Parmusi dengan tujuannya untuk menjajaki pendirian partai politik Islam baru untuk mewadahi aspirasi umat Islam.

Organisasi Masyrakat Islam mendukung didirikannya Partai Muslimin Indonesia, mereka menunjukkan dukungan pada 17 Agustus 1967, di antaranya terdapat ormas Persatuan Islam (E. Sar'an, Sukajat), Muhammdijah (AR Fachrudin dan Djindar Tamimi), Al-Djamijatul Wahlijah (H. Udin Sjamsuddin), Al-Ittihadijah (M. Thabrani R), PUI – Persatuan Ummat Islam (A. Ridwan), dan ormas lainnya.

Parmusi secara resmi menjadi partai pada 20 Februari 1968, sebelum diadakannya Muktamar Parmusi keanggotaan atau kepengurusan sementara diketuai oleh Djarnawi Hadikusumo dan Jenderal Lukman Harun menjadi sekretaris Parmusi, hal ini ditegaskan melalui Keputusan Presiden No. 70/1958 tertanggal 20 Februari 1968.

Sampai tiba saatnya untuk Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi mengadakan Muktamar pertama yaitu pada 7 November 1968 di daerah Malang Jawa Timur. Kemudian terpilihlah Muhammad Roem sebagai ketua umum. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Presiden Soeharto bahwa keanggotaan atau kepengurusan Parmusi tidak boleh menggunakan tokoh Partai Masyumi, namun ketika Muktamar Muhmmad Roem terpilih menjadi ketua umum. Muhammad Roem sendiri merupajan tokoh eks-Masyumi yang berpengaruh. Sebenarnya keputusan tersebut tidak memuaskan sebab sebagian besar dari mereka yaitu anggota Partai Muslimin Indonesia tersebut adalah anggota eks-Masyumi. Akibatnya mengundang reaksi dari Presiden Soeharto, kepengurusan Parmusi diintervensi pemerintah melalui Jaelani Naro dan Imam dengan menciptakan konflik internal Parmusi yang berkepanjangan pada Partai Muslimin Indonesia. Melalui Surat Keputusan No. 77/1970 tanggal 20 November 1970, pemerintah menunjuk seorang tokoh yang lebih

kooperatif dari Muhammdiyah, H.M.S. Mintaredja, menjadi ketua umum Parmusi. Dengan begitu hasil akhir H. Muhammad Syafaat Mintareja terpilih menjadi ketua umum Parmusi.

Partai Muslimin Indonesia terikat oleh pemerintah, tidak bebas melakukan apa pun karena harus sesuai dengan perintah dari pemerintah. Oleh karena itu, Ahmaddan Martha selaku ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Jawa Barat merasa prihatin dengan pembentukan papol atau partai politik baru yang harus melalui Keputusan Presiden menyebabkan keterkaitan dan ketergantungan partai politik terhadap pemerintah.

Adjib Rosidi seorang sastrawan Adjib Rosidi mengatakan bahwa, "Partai politik hanya menjadi pelayan kepentingan-kepentingan pemerintah, bukan untuk memenuhi kepentingan umum". Terlihat bahwa partai politik dibawah naungan Keputusan Presiden hanya dijadikan atau hanya dipandang sebagai "wayang" yang dapat dimainkan oleh dalang sesuai selera sang dalang dan kehendak politik si dalang tersebut. Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi meraih peringkat empat dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 1971, memperoleh 5.36% suara dan 24 kursi dalam badan legislatif.

C. Partai-partai Masa Orde Baru Indonesia (1977 – 1997) Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai yang berpengaruh pada era Orde Baru bersama dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (sekarang PDI Perjuangan) sebagai tiga partai politik utama. Asal usul ketiga partai ini berawal dari Ketetapan MPRS no.XXII/MPRS/1966 yang isinya agar pemerintah bersama DPR-GR segera membuat UU yang mengatur kepartaian, ormas dan kekaryaan yang disederhanakan. Penyederhanaan ini merupakan solusi atas situasi politik Indonesia yang tidak stabil sejak tahun 1950an karena sistem multi partai yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.

1. Asal Usul Berdirinya PPP

   Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat sebagai PPP atau P3 dideklarasikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan hasil gabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)

dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Saat itu Mohammad Syafaat Mintaredja menjadi Ketua sementara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menghadapi Pemilu pertama di masa Orde Baru pada tahun 1973. Pendiri PPP adalah lima deklarator yang menjadi pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua dari kelompok persatuan pembangunan, salah satu fraksi di DPR. Para tokoh pendiri PPP tersebut adalah:

a. Idham Chalid, Ketua Umum PB NU
b. Mohammad Syafaat Mintaredja SH, Ketua Umum Parmusi
c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII
d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Perti
e. Haji Masykur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR.

2. Penggantian Lambang PPP

Tekanan politik yang didapatkan pada masa orde baru membuat PPP pernah mengganti asas dan lambang partainya. Pada awalnya PPP mempunyai asas Islam dan berlambang Ka'bah, namun pada Muktamar I tahun 1984 PPP meninggalkan asas Islam dan berganti menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Sejak itu secara resmi PPP menggunakan asas Pancasila dan mengganti lambangnya dengan gambar bintang dalam segi lima.

PPP kemudian kembali mengganti asas dan lambangnya setelah Orde Baru tumbang dan Presiden Soeharto lengser tanggal 21 Mei 1998 menjadi asas Islam dan lambangnya pun berganti kembali menjadi Ka'bah. Penggantian tersebut disahkan pada Muktamar IV di akhir tahun 1998. Walaupun demikian, komitmen PPP untuk kembali mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila tidak berubah. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang dibuat pada Muktamar VII di Bandung pada tahun 2011 bahwa tujuan PPP adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera secara lahir batin serta demokratis dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha dari Allah SWT. Ketahui juga mengenai faktor penyebab runtuhnya orde baru, sejarah MPR, sejarah DPR dan kerusuhan mei 1998.

3. Ketua Umum PPP

Ketua Umum DPP PPP pertama yaitu H. Mohammad Syafaat Mintaredja SH dengan masa jabatan yang berlangsung sejak tanggal 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Pada awal pendirian PPP juga dibentuk presidium yang terdiri dari KH. Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja SH, Drs.Th.M. Gobel. H. Rusli Halil dan H. Masykur sebagai wakil presiden.

Ketua Umum PPP kedua adalah H.Jailani Naro SH yang menjabat selama dua periode. Periode pertama adalah pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat M intaredja mengundurkan diri hingga Muktamar PPP tahun 1984. Ia kemudian terpilih lagi menjadi Ketua DPP PPP pada muktamar tersebut.

Ketua Umum ketiga adalah H.Ismail Hasan Metareum SH yang terpilih dalam Muktamar II PPP pada tahun 1989 dan kembali terpilih dalam Muktamar III tahun 19994. Sedangkan Ketua Umum PPP keempat adalah H.Hamzah Haz yang dipilih pada Muktamar IV tahun 1998 dan juga terpilih kembali pada Muktamar V tahun 2003. Hasil dari Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP yaitu H. Alimawarwan Hanan SH, yang merupakan mantan Sekjen PPP.

Ketua Umum PPP kelima adalah H.Suryadarma Ali yang dipilih dalam Muktamar VI tahun 2007, Sekjen H.Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Ketua Umum Drs. HA.Chozin Chumaidy. H. Suryadarma Ali lalu kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk masa bakti 2011-2015 pada Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung. Ketahui juga sejarah perumusan UUD 1945, sejarah partindo partai indonesia, dan sejarah indische partij.

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

a. Sejarah Awal Mula PDIP

Sejarah PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima partai politik berlangsung pada 10 januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI perjuagan. Seiring perjalanannya PDI terus bongkar pasang dalam

struktur pimpinan. Sampai pada suatu kepemimpinan Soerjadi yang saat itu dikecam oleh pemerintah di masa orde baru. Kehendak penguasa untuk mengakhiri karier Soerjadi sudah bulat. Sejumlah "dosa politiknya" terhadap Orba mengharuskan ia dikubur, sama dengan para senior sebelumnya. Kongres Medan dipersiapkan untuk itu. Tapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan. Akibatnya, "aklamasi" bagi kembali berkuasanya Soerjadi dilakukan tubuh ini. Tapi ini melahirkan penentangan luas, apalagi kehendak penguasa memang bergerak ke arah itu. Kontroversi yang terus berlangsung akhirnya ditemukan jalan keluarnya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum 45 bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nama PDIP semakin menggema di negeri ini, terutama ketika menjelang pemilu tahun 1999. Karena di tahun tersebut, PDI berubah nama menjadi PDIP dan partai ini pun siap menghadapi pemilu pertamanya. Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Dalam perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden RI ke-4.

b. Logo Gambar

Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncng putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih. Makna dari logo tersebut, yaitu:

1) Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.

2) Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat.
3) Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
4) Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
5) Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus tanpa terputus.

c. Visi dan Misi

1) Visi

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah.

a) alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
b) alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
c) alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
d) wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
e) wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2) Misi

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu.

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

a) mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
b) berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudaya.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

a) membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
b) membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
c) memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
d) berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat 49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
e) menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam

upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

a) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
b) melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
c) membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d) menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
e) menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan f) membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan.
f) berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 partai mempunyai tugas:

a) mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
c) menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d) menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

e) memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
f) mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
g) mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
h) sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Golkar adalah singkatan dari Partai Golongan Karya. Partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto ini sudah memulai kiprah politiknya sejak tahun 1964. Sejarah Partai Golkar menunjukkan bahwa partai ini selalu berpartisipasi sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

a. Sejarah berdirinya Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar berawal pada tahun 1964 dengan didirikannya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana, wanita, buruh tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Sekretariat Bersama GOLKAR berdiri pada 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber GOLKAR menjadi wadah dari golongan fungsional/ golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua pertama Sekber GOLKAR adalah Brigadri Jenderal Djuhartono. Semula anggotanya

berjumlah 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Jumlah ini bertambah pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi ini adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai organisasi yang terhimpun dalam Sekber GOLKAR ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1) KOSOGORO – Koperasi Serbaguna Gotong Royong
2) SOKSI – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri
3) MKGR – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
4) Organisasi Porfesi
5) HANKAM – Ormas Pertahanan Keamanan
6) GAKARI – Gerakan Karya Rakyat Indonesia
7) Gerakan Pembangunan

Demi menghadapi Pemilu 1971, KINO mengeluarkan Keputusan Bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini tetap dipertahankan hingga saat ini. GOLKAR keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 34.348.673 suara atau 62,79% dari total perolehan suara. Perolehan suara yang didapat pun cukup merata di seluruh provinsi.

Ketetapan MPRS menyatakan perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut menyebabkan Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan bahwa dirinya bukanlah partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

Golkar mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya pada September 1973. Myajen Amir Murtono pun terpilih sebagai Ketua Umum GOLKAR. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan bersamaan dengan dibentuknya wadah-wadah profesi seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

b. Visi Partai GOLKAR

Visi Partai GOLKAR yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

c. Misi Partai GOLKAR

1) Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demo.

d. Tujuan Partai GOLKAR

1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

a) Tugas Pokok Partai GOLKAR

Tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui

peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideology, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

b) Platform Partai GOLKAR

Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan faham, golongan, dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran, dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar. Mengembangkan cirri pluralism dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka Tunggal ika. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan penagngguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan. Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam scara efisien, berdaya guna dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan nasional.

c) Perjalanan Partai GOLKAR di Pemilihan Umum Indonesia

a) Pemilu 1971 – 1997
   GOLKAR menjadi salah satu peserta pada Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto) dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan tersebut berulang pada Pemilu di periode selanjutnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemerintahan Soeharto membuat kebijakan yang sangat mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS dan lainnya.
b) Pemilu 1999
   Setelah reformasi bergulir dan pemerintahan Soeharto dapat digulingkan, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR. Pada masa itu, GOLKAR mengikuti Pemilu tanpa bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Partai GOLKAR turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.
c) Pemilu 2004
   Partai GOLKAR kembali menjadi pemenang pada Pemilihan Legislatif pada tahun 2004. Partai ini meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. Jika dibandingkan dengan Pemilu 1999, Partai GOLKAR mendapat peningkatan suara sebanyak 738.999 suara.

d) Pemilu 2009
   Partai GOLKAR mendapatkan 15.037.757 suara sah atau 14,5% dari total suara secara keseluruhan. Perolehan suara tersebut menyebabkannya mendapat 107 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun

2009. Partai ini mendapatkan posisi kedua dalam Pemilu ini.

e) Pemilu 2014
Partai GOLKAR kembali mendapatkan posisi kedua pada Pemilu 2014. Pada Pemilihan Umum 2014, Partai GOLKAR mendapat 91 kursi (16,3%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. Partai ini mendapatkan suara sebanyak 18.432.312 (14.75%).

f) Pemilu 2019
Partai GOLKAR akan kembali mengikuti Pemilihan Umum di tahun 2019. Pada Pemilu kali ini, Partai GOLKAR menempati nomor urut ke-4. Partai GOLKAR mengusung pasangan Joko Widodo (Calon Presiden) dan Ma'ruf Amin (Calon Wakil Presiden) pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.

D. Partai-Partai Masa Reformasi Indonesia (1999)

Pada masa reformasi, di indonesia sendiri terbentuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang mencatat sejumlah poin penting dalam pelaksanaan pemilu 1999. Pertama, pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soeharto dikehendaki untuk sesingkat mungkin, dimana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999. Kedua, terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ketiga, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Keempat, peserta pemilu tidak hanya dua partai politik dan satu golongan, tetapi pemilu diiikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kelima, penyelenggara pemilu adalah suatu badan yang bebas dan mandiri yang terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah, serta diawasi oleh suatu badan pengawas yang mandiri.

1. Selayang Pandang Partai-Partai Pada Pemilu Masa Reformasi (Tahun 1999)

a. Partai Indonesia Baru

Ketua Umum: Dr. Syahrir
Sekretaris Jendral: Amir Karamoy
Calon Presiden 2004: Dr. Syahrir
Data Pendaftaran tahun: 2002
Pengesahan: SK. Menkehham NO. M.UM.06.08 - 199 Tgl. 28 Agustus 2002
Alamat : Jl. teuku cik ditiro no. 31 Jakarta 10310
Azas Partai : Keadilan, demokrasi, kemajemukan dan Pancasila sebagai landasannya.

Partai PIB yang dipimpin oleh Syahrir, seorang ekonom yang terkemuka, melihat bahwa faktor yang paling menentukan dalam usaha mensejahterakan rakyat adalah pembangunan ekonomi. Sesuai dengan azas yang dianutnya, partai ini mengedepankan keberagaman masyarakat Indonesia tanpa memandang etnis, agama maupun profesi. Keseimbangan dalam hidup berbangsa dan bernegara menjadi harapan yang tercermin dari yang menggambarkan kehidupan kosmik manusia dan alam. Dalam Pemilu 2004 mendatang, Partai PIB mentargetkan perolehan 7 juta suara terutama dari kalangan menengah. Untuk merekrut anggota DPR partai ini menggunakan proses penyaringan internal dengan sifat bottoms-up agar mendapatkan hasil yang terbaik.

b. Partai Kristen Nasional Indonesia

Ketua: Ny CML Sitompul Tambunan
Sekretaris jenderal: Raden Didiek Soegito SH
Didirikan: 20 Mei 1998
Kantor pusat: Jakarta
Ideologi: Pancasila dan Kristen

Partai Kristen Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat Krisna merupakan salah satu partai politik yang mempunyai di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1998. Dalam salah satu tujua perjuangan merupakan Krisna mencanangkan untuk mempertahankan Dwifungsi ABRI, sebagai stabilisator dan dinamisator dan dalam pembangunan bangsa dan negara untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara, dalam program jangka panjang, Krisna berupaya mengembangkan penelitian dan riset dalam berbagai anggota kehidupan. Selain itu, mereka pun berupaya mengadakan pengembangan dan pemberdayaan terhadap bidang-bidang kehidupan tersebut. Pada 1999 partai

ini mengikuti pemilihan umum dengan nomor urut 2. Partai ini mendapatkan suara sejumlah 369.719 suara atau 0,35% dari keseluruhan suara yang mempunyai. Partai ini tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Partai Nasional Indonesia – Supeni

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, Sartono, Iskak Tjokroadisurjo, dan Sunaryo. Baca juga: Partai-partai pada Masa Demokrasi Liberal Lahirnya Partai PNI Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspreksikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno, membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928, terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan tujuh pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Sampai akhirnya, pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi Presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama partai pra-perang Soekarno. Baca juga: Kabinet Indonesia Bersatu I dan II Tokoh Tjipto Mangunkusumo Sartono Iskaw Tjokrohadisuryo Sunaryo Soekarno Moh. Hatta Gatot Mangkoepradja Soepriadinata Maskun Sumadiredja Amir Sjarifuddin Wilopo Hardi Suwiryo Ali Sastroamidjojo Djuanda Kartawidjaja Mohammad Isnaeni Supeni Sanusi Hardjadinata Sarmidi Mangunsarkoro.

d. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

Ketua Umum: H Moh Bambang Sulistomo SIP
Sekretaris Jenderal: Drs Harry Ganda Asi
Alamat : Jl Pejaten Raya No 16 Jakarta Selatan

Pendiri Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI) ini terdiri dari kaum profesional, aktivis LSM, dan para dosen, yang selama ini belum pernah muncul dalam panggung politik. Mereka prihatin dengan kehidupan politik negara dan mencoba menggerakkan orang-orang yang punya kesadaran dan visi politik. Sebagai partai yang semua pengurusnya adalah generasi muda. PADI ingin mengajak generasi muda dari semua golongan dan semua pihak untuk bersama memperbaiki sistem politik.

PADI berpandangan bahwa partai politik merupakan bagian dari sistem politik yang harus dihidupkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Melalui program-programnya, PADI berusaha menyentuh sampai ke lapisan paling bawah. Hal ini dimungkinkan karena jaringan LSM yang dikelola para pendiri PADI sudah lama membantu dan bergerak di kalangan lapisan masyarakat yang paling bawah. Secara konkret, upaya tersebut akan dilakukan oleh PADI melalui kegiatan pendidikan khusus bagi para korban PHK atau anak-anak putus sekolah. Berbagai kajian dan forum diskusi juga diusahakan untuk kepentingan tersebut.

e. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

Ketua: Drs. H Syamsahril SH MM
Sekretaris jenderal: Djamhari Maskat
Diciptakan: 29 Agustus 1998
Kantor pusat: Jl Raya Kutabumi Blok CS5 No 9, Ruko Pondok Makmur Tangerang, Banten
Ideologi: Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW

Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Kami) diciptakan bagi menjawab tantangan yang sedang dijumpai bangsa Indonesia, terutama masalah disintegrasi bangsa. Di samping itu, partai ini juga bermaksud memperingatkan bangsa Indonesia supaya terhindar dari laknat Allah SWT yang sedang menggerogoti seperti krisis yang berkepanjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Partai ini mencantumkan asas berupa pedoman hidup umat Islam arti menegaskan bahwa partai ini menginginkan supaya Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Partai ini merupakan partai muslim Indonesia yang berhaluan meningkatkan peran aktif muslim Indonesia bagi menciptakan manusia seutuhnya dalam lembaga negara kesatuan Republik Indonesia. Partai ini mengikuti Pemilu 1999, akan tetapi

sebab perolehan suaranya kecil, partai ini pada tahun 2002 berfusi dengan sebagian partai islam lainnya menjadi Partai Bintang Reformasi.

f. Partai Ummat Islam

Ketua Umum: Prof Dr Deliar Noer

Sekretaris Umum: Fahmi Rahman

Alamat : Jl Raya Pasar Minggu Km 18 No 8 Blok 87, Jakarta Selatan

Partai Ummat Islam (PUI) berdiri didasari dua pertimbangan, yaitu segi ajaran dan historis. Dari segi ajaran, adalah ajaran agama Islam yang tidak memisahkan antara kehidupan agama dalam arti sempit dengan kehidupan bermasyarakat seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dari segi historis, umat Islam di Indonesia merupakan pelopor dalam mendirikan partai-partai politik. Kalau Budi Utomo masih bersifat nasionalisme Jawa, maka kehadiran Partai Serikat Islam 1912 tujuannya antara lain nasionalisme di Indonesia. PUI sama sekali tidak bermaksud membentuk negara Islam. Partai ini memandang pengalaman membuktikan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW yang bisa berdampingan dengan umat bangsa lain secara damai dengan menggunakan hukum masing-masing, yaitu Konstitusi Madinah. Partai yang didirikan oleh kalangan berlatar belakang dosen ini memiliki program utama pembangunan/pembinaan moral dari setiap aspek kehidupan bernegara dengan landasan moral Islam.

g. Partai Kebangkitan Ummat

Ketua: KH Yusuf Hasyim

Sekretaris jenderal: Drs H Asnawi Latief

Didirikan: 21 September 1998

Ideologi: Pancasila dan Aqidah Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah

Partai Kebangkitan Ummat yaitu salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan oleh sebagian tokoh Nahdlatul Ulama (NU) karena demikianlah keadaanya perbedaan visi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bentukan Pengurus Agung NU (PBNU). Pada pemilihan umum tahun 1999 partai ini mendapatkan suara sebanyak 300.064 suara atau 0,28% dari semuanya suara dan partai ini juga mendapatkan satu kursi di DPR.

h. Partai Masyumi Baru

Partai PersatuPartai Masyumi Baru adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini diketuai oleh Ridwan Saidi. Pada

tahun 1995 partai ini didirikan dengan nama organisasi Majelis Syarikat Umat Muslimin Indonesia. Pada tahun 1996 diikrarkan kembali sebagai wadah perhimpunan dan penampung aspirasi umat Muslimin dengan nama Masyumi Baru. Walaupun menggunakan nama "Masyumi", partai ini menolak dikatakan sebagai lanjutan dari Partai Masyumi (Majlis Syura' Muslimin Indonesia) yang pernah jaya pada masa Orde Lama. Pada pemilihan umum tahun 1999 partai ini mendapatkan suara sebanyak 152.589 suara atau 0,14% dari keseluruhan suara yang masuk. Partai ini sama sekali tidak mendapatkan kursi di DPR.

i. Partai Syarikat Islam Indonesia

PSII yang berawal dari syarikat Islam (SI) adalah organisasi pelopor gerakan kebangsaan pertama di Indonesia yang bergerak memperjuangkan kemerdekaan yang sifatnya lintas etnis, lintas kelas, dan berskala nasional. Sampai saat ini belum ada satu pun buku yang menggambarkan perjalanan politik PSII setelah kemerdekaan khususnya pada masa Orde Baru, yaitu ketika partai-partai harus berhadapan secara politik dan ideologis dengan pemerintah Orde Baru yang menghendaki restrukturisasi kepartaian melalui fusi tahun 1973. Seperti kita ketahui, periode Orde Baru dengan politik rejimentasinya yang intensif dan sistematis menjadi salah satu masa paling krusial dalam sejarah politik kepartaian, yang nantinya amat menentukan peran dan posisi partai dalam dinamika politik Indonesia. PSII dalam hal ini juga tidak luput dari terpaan torpedo rejimentasi politik Orde Baru.

Terkait persoalan struktural, partai-partai politik (Islam) di Indonesia sampai saat ini agaknya masih belum maksimal melaksanakan fungsi-fungsi kepartaian sebagai kontribusi untuk penguatan demokrasi substantif. Konflik internal partai yang berujung pada perpecahan partai, sistem rekrutmen dan kaderisasi yang belum terukur, kurangnya pemahaman dan kemampuan elite partai menyerap dan menyalurkan aspirasi anggota dan pendukungnya, menguatnya oligarki politik dalam kepemimpinan partai, tata kelola administrasi dan keuangan partai yang kurang transparan, adalah beberapa hal yang memperlihatkan partai belum terkonsolidasi dengan baik.

Konflik kepemimpinan PSII yang terjadi 40 tahun lalu yang menjadi fokus buku ini rupanya masih tetap menjadi fenomena kepartaian kita sampai hari ini. Konteks politik internal PSII agaknya masih relevan dengan persoalan struktural dan kultural yang dihadapi partai-partai politik kita saat ini.

j. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Singkatan PDI-P/PDIP, PDI Perjuangan
Ketua umum: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Dibentuk 10 Januari 1973; 49 tahun lalu (sebagai PDI)
15 Februari 1999; 23 tahun lalu (sebagai PDI Perjuangan)
Kantor pusat: Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
Sayap pemuda: BMI (Banteng Muda Indonesia)
Sayap Islam: BAMUSI (Baitul Muslimin Indonesia)
Ideologi Pancasila, Nasionalisme, Ekonomi Nasionalisme Indonesia, Populisme Nasionalisme, Sayap-kiri, Sukarnoisme
Posisi politik: Kiri tengah
Afiliasi internasional: Aliansi Progresif, Dewan Liberal dan Demokrat Asia
Slogan: Kerja Kita, Kerja Indonesia
Kursi di DPR (2019): 128 / 575

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik Indonesia, dan partai dari Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. PDI-P saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Indonesia dan merupakan putri dari Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Ideologi partai didasarkan pada filosofi nasional resmi Indonesia, Pancasila.

Kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Pada Kongres Nasional 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, salah satu dari tiga partai politik yang diakui oleh pemerintahan "Orde Baru" Presiden Soeharto. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Harjono, calon ketua umum yang dipilihnya, untuk dipilih. Kongres Khusus diadakan di mana pemerintah mengharapkan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih. Posisinya semakin terkonsolidasi ketika Majelis Nasional PDI meratifikasi hasil kongres.Pada bulan Juni 1996, Kongres Nasional kembali diadakan di Kota Medan, di mana Megawati tidak diundang; anggota anti-Megawati hadir. Dengan dukungan pemerintah, Suryadi, mantan ketua umum, terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI. Megawati menolak mengakui hasil kongres ini dan terus memandang dirinya sebagai pemimpin sah PDI.

Pagi 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta.[6] Para pendukung Suryadi (kabarnya dengan

dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana sejak Kongres Nasional di Medan. Dalam bentrokan berikutnya, pendukung Megawati berhasil bertahan di markas. Kerusuhan pun terjadi—pada tahap yang dianggap terburuk yang pernah dilihat Jakarta pada masa "Orde Baru"—yang disusul dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menuding kerusuhan itu terjadi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Meski digulingkan sebagai ketua oleh Suryadi dan pemerintah, acara tersebut sangat mengangkat profil Megawati, memberikan simpati dan popularitas nasional.

PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, Megawati dan Suryadi. Yang pertama ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tetapi pemerintah hanya mengakui yang terakhir. Dalam pemilu, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan dan PDI hanya meraih 3% suara. Menyusul pengunduran diri Soeharto dan pencabutan batasan "Orde Baru" pada partai politik nasional, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, menambahkan sufiks "perjuangan" untuk membedakan fraksi partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP dan dinominasikan sebagai presiden pada tahun 1999.

k. Partai Abul Yatama

Ketua Umum: Dr H Rusli Bintang
Sekretaris Jenderal: Drs Agus Suarman Sudharsa
Address : Jl Jaya Mandala No 14, Pancoran Jakarta Selatan

Tidak seperti partai-partai lainnya yang selalu mengetengahkan nuansa demokrasi, persatuan, kerakyatan, ataupun keagamaan, berdirinya Partai Abul Yatama (PAY) justru diilhami oleh keinginan untuk menyadarkan semua orang agar lebih memperhatikan nasib anak yatim. Penekanan ini sesuai dengan arti abul yatama (ayah anak yatim), yang pada mulanya berupa yayasan penyantun anak yatim yang sejak tahun 1979 sudah berdiri di Daerah Istimewa Aceh.

Partai Abul Yatama ingin menyadarkan semua orang bahwa begitu banyak kepentingan politik telah merampas hak-hak anak yatim. Menurut PAY mereka harus diperjuangkan agar dapat memperoleh kehidupan yang layak. Di samping itu juga mendesak agar anak yatim tidak hanya memiliki wadah untuk menuntut ilmu, tetapi juga dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

l. Partai Kebangsaan Merdeka

Usai Presiden Soeharto lengser dari jabatannya pada 21 Mei 1998, lahirlah era baru yang disebut Reformasi. Ketika era baru Indonesia dimulai, ada salah satu partai politik yang lahir, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB didirikan pada 23 Juli 1998 oleh para kiai dari Nahdlatul Ulama (NU), seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, dan A Muhith Muzadi. Saat ini jabatan Ketua Umum PKB dipegang oleh Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil Cak Imin.

PBNU membentuk partai politik (parpol), mengusulkan nama parpol, lambang, hingga nama-nama pengurusnya. Tercatat, terdapat sekitar 39 usulan nama parpol, termasuk Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. PBNU menyikapi usulan-usulan tersebut dengan sangat hati-hati, karena berdasarkan hasil Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984, NU dinyatakan sebagai organisasi yang tidak melakukan kegiatan politik ataupun terkait dengan parpol. Karena PBNU dianggap belum bisa memenuhi keinginan masyarakat, sejumlah kalangan NU mulai mendeklarasikan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi masyarakat setempat.

Partai yang lahir seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Ummat di Cirebon. Baca juga: Sejarah Berdirinya Partai Golkar Merespons hal itu, pada 3 Juni 1998, PBNU melakukan Rapat Harian Syuriyah, yang hasilnya dibentuk Tim Lima dengan tugas untuk memenuhi berbagai aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin, dengan anggota, KH M Dawam Anwar, Dr KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja. Seiring derasnya keinginan masyarakat NU untuk membentuk parpol, maka dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 29 Juni 1998, Tim Lima diperkuat dengan dibentuk Tim Asistensi. Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), ditugaskan membantu Tim Lima.

Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi melakukan rapat untuk mengelaborasikan tugas-tugas mereka. Baca juga: Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kemudian antara 26-28 Juni 1998, kedua tim kembali melakukan rapat untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU, karena terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Oleh karena itu, Gus Dur bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jemaah. Keinginan Gus

Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, dan KH A. Muchith Muzadi.

Usai pembentukan partai dan pemilihan nama, maka pada 23 Juli 1998, deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilaksanakan di Jakarta. Pemlihan nama tersebut sesuai dengan sifat yang dijunjung dari parpol ini, yaitu kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis. Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur Pemilu 1999-2014 Pada 1999, PKB dalam pemilu perdananya berhasil mendapat perolehan suara sebanyak 13.336.982 atau 12,61 persen. Kemudian, pada pemilu 2004-2009, PKB kembali menduduki peringkat lima besar dengan perolehan suara 12.002.885 atau 10,61 persen. Sayangnya, pada pemilu 2009-2014, perolehan suara PKB mengalami kemerosotan. Hanya meraih 5.146.302 suara atau 4,95 persen.
Beberapa Tokoh-tokoh penting PKB:

1. Abdurrahman Wahid
2. Ma'ruf Amin
3. Mustofa Bisri
4. Cholil Bisri
5. Alwi Shihab
6. Yenny Wahid
7. Khofifah Indar Parawansa
8. Erman Soeparno
9. Ali Masykur Musa
10. Muhaimin Iskandar
11. Nashiruddin Al Mansyur
12. Ali Maskan
13. Moesa Agus Sulistiyono
14. Abdullah Azwar
15. Anas Saifullah
16. Yusuf Muhammad

m. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

Ketua Umum: Prof Dr Manase Malo
Sekretaris Jenderal: Seto Harianto
Alamat : Kompleks Widuri Indah Blok A-4, Jl Palmerah Barat 353 Jakarta

Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), ada tiga persoalan yang terlecehkan selama ini, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Demokratisasi, dan

Pelestarian Lingkungan. Para pendiri PDKB, yang sebelumnya merupakan anggota Golkar, merasakan ketiga persoalan di atas malah menjadi semakin buruk dalam rezim yang kala itu berkuasa. Karena merasa Golkar bukan lagi saluran yang tepat mengatasi persoalan, mereka membentuk partai ini

Partai yang dipenuhi oleh pengurus yang berasal dari kalangan perguruan tinggi ini menekankan program penegakan HAM, demokrasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Meskipun mengklaim berbasis pendukung utama penganut agama Kristen, Katolik dan etnis keturunan, partai ini mengaku tidak sektarian. Ciri khas yang dijunjung tinggi partai ini adalah mengutamakan kasih, kerendahan hati, keadilan, kebenaran, kejujuran, kesetiaan, ketulusan, kepeloporan, kesetaraan, kesetiakawanan, kerukunan, dan keberanian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

n. Partai Rakyat Demokratik

Ketua: Agus Jabo Priyono (sejak 2010)
Sekretaris jenderal: Dominggus Oktavianus Kiik
Didirikan: Kaliurang, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 15 April 1996; 22 Juli 1996 (Deklarasi PRD)
Kantor pusat: Jl Tebet Dalam IIG No 1, Jakarta Selatan, 12810
Ideologi: Pancasila

o. Pemilihan umum

Partai Rakyat Demokratik adalah suatu partai politik di Indonesia. Partai ini tidak memiliki wakil di parlemen; namun demikian, perannya dalam sejarah politik Indonesia sejak era Orde Baru sangatlah penting. Partai ini dikenal sbg partai gerakan yang aktif melakukan kaderisasi, penggalangan massa dan berjuang dengan cara ekstraparlementer.

p. Tujuan dan Pokok Perjuangan

Tujuan PRD yaitu mewujudkan masyarakat tidak berat sebelah dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa.

Adapun pokok-pokok perjuangan PRD yaitu.

1. Memimpin dan atau terlibat aktif dalam menuntaskan perjuangan demokrasi nasional.
2. Memimpin dan atau terlibat aktif dalam menggalang persatuan nasional melawan imperialisme.
3. Memimpin dan atau terlibat aktif dalam perjuangan anti korupsi.

Sejarah

Partai ini sebelumnya bernama Persatuan Rakyat Demokratik, dimana kemudian mengalami perpecahan. Organisasi ini menyatakan diri sbg partai pada pada bulan April 1996 dengan diprakarsai oleh sebanyak intelektual muda, termasuk ketua pertamanya, Budiman Sudjatmiko. Banyak dari bagiannya adalah intelektual dan aktivis muda, khususnya mahasiswa. Sebelum terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996, dimana PRD dikambing-hitamkan sbg dalangnya, Partai ini mendapat dukungan utama dari salah satu organisasi onderbouwnya, SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia sebagai Demokrasi).

Sejak awal, partai ini sudah menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru. Manifesto 22 Juli 1996 yang dideklarasikan partai ini pada tanggal tersebut, adalah deklarasi yang secara tajam menyerang dan mengkritik kondisi politik dan kondisi sosial-ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi politik yang dikritik adalah jauhnya model pemerintahan Orde Baru dari sistem yang demokratis. Sementara kondisi sosial-ekonomi yang dikritik adalah kesenjangan sosial dampak kebijakan berpandangan pertumbuhan, dengan mengalpakan pemerataan dan distribusi yang tidak berat sebelah.

Di samping itu, Manifesto ini juga menyinggung-nyinggung masalah korupsi dan kolusi yang menjamur di birokrasi pemerintahan. Di usia awalnya ini pula, partai ini mulai membela dan mengadvokasi petani-petani pedesaan dalam membela hak atas tanah. Urusan ini, secara umum ditangani oleh STN (Serikat Tani Nasional), onderbouw PRD. Mobilisasi massa sebagai demonstrasi dan protes pun tak jarang terjadi, yang tak hanya melibatkan petani, tetapi juga buruh, LSM, dan aktivis dari organisasi pautan.

Sejak 1997, karena popularitas PRD yang semakin meningkat, dan juga kondisi sosial-ekonomi serta politik yang mulai tidak stabil, pemerintah Orde Baru mulai melakukan penindasan terhadap bermacam gerakan politis yang diasumsikan subversif, apalagi yang diasumsikan kiri, dan komunis, termasuk salah satu korbannya adalah PRD.

Reaksi pemerintah Orde Baru

Setelah Peristiwa 27 Juli 1996, pimpinan-pimpinan utama PRD ditangkap dan dipenjarakan. Bagian PRD dan pihak-pihak yang diasumsikan memiliki kaitan dengan PRD menerima teror dan tekanan. Tak sedikit dari mereka yang ditahan tanpa argumen yang jelas di markas lembaga ekstrayudisial, Bakorstanasda (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah).

Menjelang runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, 1 orang bagiannya terbunuh, beberapa mengalami penculikan. dan sampai sekarang, sebagian ditengahnya, termasuk penyair Wiji Thukul, tidak dikenal nasibnya (menjadi bagian dari sekian banyak "Orang Hilang").

Di samping mengadvokasi dan mengorganisasi petani dan buruh, salah satu tindakan PRD yang menciptakan pemerintah semakin kebakaran jenggot adalah pernyataan dukungan PRD atas hak menentukan nasib sendiri (self determination) di Timor Timur. Budiman Sudjatmiko sendiri sempat hadir dalam satu penjara di LP. Cipinang dengan Xanana Gusmao, pimpinan gerakan pro-kemerdekaan CNRM (Conselho Nacional de Resistência Maubere) Timor Timur yang kelak menjadi Timor Leste atau Timor Lorosa'e.

Peran PRD dalam reformasi

Pada belakang 1997 dan awal 1998, peran partai ini dalam gelombang Reformasi dan dalam menumbangkan rezim Soeharto juga signifikan. Meski terpaksa berjuang secara bawah tanah, bagiannya membentuk atau menggabungkan diri dalam bermacam komite rakyat dan mahasiswa. Di tengah krisis ekonomi, gelombang tuntutan demokrasi serta terjadinya Peristiwa Mei 1998, Presiden Suharto kemudian mundur dan menyerahkan tampuk pemerintahan untuk wakilnya B.J. Habibie. Pada pemilihan umum (pemilu) pertama pasca-Reformasi 1998, PRD yang sebelumnya diberitahukan terlarang oleh Orde Baru, diakui dan ikut serta menjadi peserta Pemilu 1999. PRD menjadi organisasi peserta pemilu dengan pimpinan yang sedang di penjara.

Meski ditinggal sebagian akbar tokoh pendiri dan pimpinan awal, sampai sekarang, PRD sedang aktif dalam menggalang gerakan protes dan demonstrasi mengkritik bermacam kebijakan yang diasumsikan neoliberal. PRD juga gencar mengkampanyekan kedaulatan nasional dan Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP33) UUD 1945. Masa ini PRD dipimpin Agus Priyono, bagian pendiri dan salah satu pimpinan utama PRD pasca tertangkapnya Budiman Sudjatmiko,cs pada tahun 1996.

Partai Pekerja Indonesia.

Partai Pekerja Indonesia adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1998.

Ketua: H. Saleh Said Harahap

Sekretaris jenderal: H. Salam Sumangat

Pemilihan umum 1999

Pada pemilihan umum tahun 1999, partai ini mendapatkan 63.934 suara atau 0,06% dari suara yang masuk. Partai ini sama sekali tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai Amanat Nasional Partai Abul Yatama Partai Aliansi Demokrat Indonesia Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Buruh Nasional Partai Cinta Damai Partai Daulat Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Kasih Bangsa Partai Golongan Karya Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Partai Indonesia Baru Partai Islam Demokrat Partai Katolik Demokrat Partai Keadilan dan Persatuan Partai Keadilan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Muslim Indonesia Partai Kebangkitan Ummat Partai Kebangsaan Merdeka Partai Kristen Nasional Indonesia Partai Masyumi Baru Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Nahdlatul Ummat Partai Nasional Bangsa Indonesia Partai Nasional Demokrat Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen Partai Nasional Indonesia - Supeni Partai Pekerja Indonesia Partai Persatuan Partai Persatuan Pembangunan Partai Pilihan Rakyat Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Partai Rakyat Demokratik Partai Rakyat Indonesia Partai Republik Partai Solidaritas Pekerja Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 Partai Ummat Islam Partai Ummat Muslimin Indonesia Partai Uni Demokrasi Indonesia.

BAB IV PARTAI PARTAI POLITIK YANG IKUT SERTA PEMILU

A. Partai - Partai Pemilu Tahun 2004

1. Pemilihan Umum Tahun 2004

Transisi politik yang dilakukan dari pemerintahan rejim Orde Baru ke pemerintahan transisi pasca-Soeharto, sampai kini belum juga menghasilkan konsolidasi demokrasi yang mampu mengatasi krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Banyak sekali kendala yang dihadapi baik bersifat struktural dan juga kultural yang dihadapi rakyat Indonesia. Dibanding segera beranjak ke sistem politik yang demokratis, pengikut Orde Baru masih cukup kuat bercokol dalam struktur politik dan mereka masih memimpikan kembali ke masa lalu. Birokrasi sebagai salah satu pihak yang penting dalam sebuah sistem politik demokratis masih lembam untuk perubahan. Di kepartaian para pengikut Orde Baru mulai lebih berani terang-terangan menampakkan diri. Salah satu tokoh partai pendukung Suharto, bahkan dalam masa kampanye Pemilu 2004 tanpa ragu mengajak rakyat untuk tidak malu-malu menjadi "antek Suharto". Menurutnya, menjadi antek Suharto baik, karena di jaman presiden Suharto lah kehidupan sejahtera, dimana Indonesia mampu melakukan swasembada beras.

Di arena kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, banyak masalah pokok belum terpecahkan akibat terjadinya distorsi-distorsi dalam pengambilan kebijakan politik. Partisipasi dan artikulasi kepentingan warga masyarakat belum cukup terakomodasi dalam sistem demokrasi yang sedang dibangun. Karena itu menjadi penting memperhatikan Pemilu tahun 2004. Pemilu kali ini diselengarakan di dalam konteks belum pulihnya Indonesia dari berbagai krisis. Juga karena adanya tantangan pelembagaan demokrasi, sementara ancaman terjadinya konflik dengan kekerasan tetap terbuka. Pengalaman berbagai negara menun-jukkan bahwa transisi demokrasi yang terlalu cepat yang tidak disertai dengan pelembagaan politik demokrasi yang memadai, justru bisa menghasilkan gejolak sosial-politik yang bisa menganggu jalannya proses demokratisasi. Ledakan partisipasi politik yang mencuat ke permukaan akibat terlalu lama hidup tertekan dibawah rejim otoritarian, disertai kekecewaan massa yang meluas akibat belum adanya perbaikan perbaikan kebijakan publik, bisa berubah menjadi kekerasan politik.

Potensi kekerasan politik pada pemilu 2004 demikian besar. Berbeda dengan pemilu tahun 1999, pemilu 2004 secara khusus ditandai oleh tahapan-

tahapan pemilu yang memberi peluang besar bagi terjadinya ledakan partisipasi politik masyarakat. Masa kampanye pemilu di Indonesia, merupakan masalah klasik yang sering menjadi ajang bagi munculnya ledakan mobilisasi dan partisipasi politik massa yang luas. Dalam Pemilu 2004 masyarakat akan memilih anggota parlemen, juga akan melakukan pemilihan presiden secara langsung. Karena itu perlu dipetakan secara cermat potensi kekerasan politik pemilu 2004. Dari situ akan ditentukan langkah-langkah pencegahannya, sehingga pemantapan kelembagaan demokrasi bisa dicapai. Pemetaan harus dilakukan atas potensi-potensi dan sumber-sumber konflik secara cermat di berbagai daerah dan sektor kehidupan di masyarakat. Langkah-langkah peringatan dini, pencegahan dan transformasi konflik, diperlukan tidak hanya untuk kepentingan lancar dan amannya pemilu 2004, tapi juga untuk kepentingan pemilu-pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan pemilu benar-benar menjadi solusi damai masalah berbangsa.

Pemilu 2004 merupakan eksperimen demokrasi baru di Indonesia. Pemilu 2004 adalah yang kedua sejak Presiden Suharto lengser, namun pemilu kedua ini sangat berbeda dengan pemilu 1999 dalam banyak hal. Itu karena Pemilu 2004 merupakan yang pertama sejak Amandemen Keempat UUD 1945. Perubahan struktur politik Indonesia telah mempengaruhi proses rekrutmen elit politik. Beberapa perubahan penting terkait amandemen pemilu adalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden serta pembentukan badan baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan juga terjadi pada model rekrutmen kepala daerah yang mulai berlaku setelah pemilihan umum tahun 2004.

Berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan. Dalam kasus DPP, keberadaan lembaga tersebut telah mengubah konsep keterwakilan yang dianut di Indonesia dari unikameral menjadi bikameral. Pada prinsipnya, konsep keterwakilan dalam DPD sesuai dengan namanya adalah representasi spasial/daerah. Ide representasi spasial dibentuk untuk mengimbangi kelemahan representasi politik yang demokratis. Ada ketimpangan antara perwakilan politik Jawa dan non-Jawa di dewan.

Akibatnya, DPR memiliki lebih banyak perwakilan dari wilayah Jawa daripada dari luar Jawa. Dengan DPD, ketimpangan ini coba diatasi.

Pemilu 2004 dapat dikatakan sebagai jalan baru bagi Indonesia untuk memulai demokrasi perwakilan. Kebaruan tersebut merupakan konsekuensi dari efek perubahan konstitusi tersebut di satu sisi, dan efek kebebasan pada aktor politik dan pendekatan politik masyarakat sipil di sisi lain.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan menggunakan sisitem proporsional semi terbuka. Dimana partai politik peserta pemilu menyusun daftar calon anggota DPR (D) dengan preferensi urutan "nomor jadi". Namun pemilih diharuskan memilih tanda gambar partai politik atau tanda gambar dan nama calon. Jika pilihan pada nama. calon tanpa disertai tanda gambar maka suara dinyatakan tidak sah. Tetapi pilihan pada tanda gambar tanpa nama calon adalah sah. Calon yang memperoleh dukungan suara ekuivalen dengan "harga kursi" (BPP) atau lebih otomatis menjadi anggota dewan. Kelebihan dukungan suara pada calon anggota menjadi milik partai politik. Partai Politik menentukan sendiri calon yang dikehendaki untuk menjadi calon anggota dewan berdasarkan dukungan suara yang dihimpun dari tanda gambar dan kelebihan suara pada "calon jadi" menurut nomor urut.

Dalam Pemilu 2004 jumlah pemilih terdaftar sekitar 146 juta dengan pemilih pemula sekitar 20 - 30 juta. Mayoritas calon pemilih menyatakan tidak mengetahui atau bahkan tidak berminat untuk mengetahui perbedaan pemilu-1999 dan 2004, jadual pemilu dan pemilihan presiden 2004. Proses pembentukan KPU dan Panwaslu di daerah pada umumnya diwarnai oleh pergulatan kepentingan partai politik. KPU dan Panwaslu di tingkat daerah memiliki pengalaman yang sedikit tentang penyelenggaraan pemilu dan menghadapi masalah koordinasi Sampai saat ini, belum diketahui format kartu suara pemilihan anggota DPR(D), DPD, dan Pilpres. Tata cara penggantian calon presiden/wakil presiden yang berhalangan tetap, meninggal, atau mengundurkan diri dalam putaran pemilihan kedua.

Dan mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan kekuasaan yang diakibatkan oleh penundaan pemilihan presiden/wakil presiden dan pada tanggal 5 April 2004, rakyat Indonesia secara serentak memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk periode 2004-2009. Saat itu, 24 partai politik ikut serta dalam pemilihan tersebut. Beberapa di antaranya, seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merupakan pemain baru. PKS sebenarnya

mencalonkan diri pada pemilu 1999 dengan nama Partai Keadilan (PK), namun partai tersebut harus berganti nama untuk mencalonkan diri pada pemilu 2004 karena ambang batas suara pada pemilu lalu tidak terpenuhi. Meski masih baru, Demokrat dan PKS masing-masing menempati peringkat ke-5 dan ke-6 dengan perolehan 8.455.225 suara atau 7,45% dari 113.462.414 suara sah. Sedangkan PKS berada di peringkat enam dengan 8.325.020 suara atau 7,34%. Dan posisi 1 hingga 4 ditempati oleh pemain veteran: Grup Karya, PDIP, PKB dan PPP.

2. Partai Politik Peserta Pemilu 2004

Seperti yang di ketahui bahwa pada pemilu ini terdapat 24 partai yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini tujuan penyaringan adalah memberikan status atau pengsahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan. Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk diketahui, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa partai politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM. Ke-50 partai yang lulus penyaringan tersebut kemudian mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu. Sesuai dengan amanat UU No. 12/2003, khususnya Pasal 7 – 10, yang kemudian dijabarkan di dalam Keputusan KPU No. 105 Tahun 2003 sebagaimana diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003, sebuah partai politik berhak mengikuti Pemilu apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, mempunyai pengurus lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 kabupaten/kota di setiap provinsi di mana ia mempunyai kepengurusan. Ketiga, semua kepengurusan tersebut harus mempunyai kantor. Keempat, mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap daerah di mana ia mempunyai pengurus. Pembuktian setiap partai yang mendaftarkan diri tersebut dilakukan melalui proses verifikasi. Ada dua tahap verifikasi di sini, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Hanya partai yang lolos verifikasi administratif yang bisa mengikuti penyaringan tahap selanjutnya (verifikasi faktual). Penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi faktual. Pada tahap ini yang diteliti adalah memastikan apakah benar dokumen-dokumen mengenai kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana di dalam verifikasi administratif tersebut mewujud di lapangan. KPU menyusun ketentuan mengenai tata cara dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No. 105/2003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615/2003. Sebuah catatan perlu ditekankan di sini bahwa 6 dari partai tersebut tidak melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik administratif maupun faktual. Sebab, keenam partai tersebut telah lulus electoral threshold (mempunyai 2% dari jumlah kursi di DPR) di dalam Pemilu 1999. Sedangkan menurut UU No. 12/2003 partai yang sudah memenuhi electoral threshold tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU. Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Oleh karena jumlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada 44. Setelah keseluruhan proses verifikasi selesai, ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan 6 partai yang lulus threshold, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24, berikut daftar partai yang mengikuti pemilu tahun 2004.

3. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

Partai ini didirikan pertama kali oleh Soekarno dan kawan kawan di Bandung pada bulan juli tahun 1927. Pada tahun 1998 PNI kembali dihidupkan dan ikut serta sebagai peserta pemilu tahun 1999 dengan nama PNI Soepeni dan mendapatkan 0,36 persen suara nasional.

4. Partai Buruh Sosial Demokrat

Awal mula partai ini berdiri adalah dari Organisasi Serikat Buruh Indonesia (SBSI) dengan dukungan dari beberapa organisasi masa yang lain, maka dari itu melalui kongres nasional II tahun 2000 serta raker nasional tahun 2001 partai ini terbentuk

5. Partai Bulan Bintang

Partai ini merupakan salah satu partai yang berasaskan islam berdiri sejak tanggal 17 juli tahun 1998 di jakarta dan dideklarasikan pada hari jumat 26 juli tahun 1998 bertempat di halaman masjid Al-Azhar Kemayoran Baru

Jakarta. Partai ini pernah mengikuti 3 kali pemilu yakni di tahun 1999, 2004 dan 2009.

6. Partai Merdeka

Partai ini didirikan oleh Adi Sasono pada tanggal 10 oktober tahun 2022, partai merdeka pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2004 dan partai ini dijadikan salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional yang diketuai oleh Oesman Sapta.

7. Partai Persatuan Pembangunan

Partai persatuan Pembangunan atau bisa disebut PPP merupakan partai politik di Indonesia yang pertama kali didirikan pada tanggal 5 Januari tahun 1973 yang mana merupakan hasil gabungan dari empat partai berbasis islam yakni partai nahdlatul ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

8. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

Partai yang sekarang bernama Partai Demokrasi Kebangsaan ini didirikan oleh dua orang pengamat politik yakni Prof.Dr.Ryaas Rasyid dan Dr. Andi Mallarangeng pada tanggal 23 Juli 2002.

9. Partai Perhimpunan Indonesia Baru

Partai ini diketuai oleh Dr. Syahrir yang dibentuk pada tanggal 23 September 2002, azas partai ini adalah keadilan, demokrasi kemajemukan dan Pancasila sebagai landasannya.

10. Partai Nasional Banteng Kemerdekaaan

Partai ini sekarang bernama Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia yang diketuai oleh Eros Djarot pada tanggal 27 Juli tahun 2002 partai yang berasaskan marhaenisme ini juga merupak salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN).

11. Partai Demokrat

Partai ini didirikan pada tanggal 09 september tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 27 Agustus 200. Partai ini sekarang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang mana beliau adalah putra dari Susili Bambang Yudhoyono. Pemilihan umum yang pertama diikuti yaitu pada tahun 2004 dan memeperoleh suara sebanyak 7,45% dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR.

12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai ini pertama kali di deklarasikan padatanggal 15 Januari 1999 dan pertama kali mengikuti pemilihan umum ditahun 1999. Saat ini partai diketuai oleh Yussuf Solichien sejak tanggal 26 Mei 2021 menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri.

13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Partai ini dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973 dan pada saat I I sudah berganti nama menjadi Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Partai ini pun menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN), dalam pemilihan umum 2004 partai ini berhasil mendapatkan satu kursi di DPR dan bergabung ke dalam Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

14. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Sebelumnya partai ini bernamaPartai Nahdlatul Ummat atau biasa disingkat PNU yang dibentuk pada tanggal 5 Maret 2003 dan saat ini ketua umum nya adalah Syukron Ma'mun.

15. Partai Amanat Nasional

Partai ini didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1998 yang saat ini diketuai oleh Zulkifli Hasan.Asas partai ini yaitu akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.

16. Partai Karya Peduli Bangsa

Partai yang didirikan pada tanggal 09 September 2002 di Jakarta ini sekarang diketuai oleh R. Hartono. Partai ini merupakan partai yang berasal dari Organisasi Masyarakat Peduli Bangsa yang mana pada saat itu mendeklarasikan diri menjadi partai politik.

17. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai yang berideologi moderat di Indonesia ini didirikan pada tanggal 23 Juli 1998, dan ketua umum pada saat ini adalah Muhaimin Iskandar. Pada pemilihan umum 2004 partai ini berhasil memperoleh suara sebanyak 10,57% dan mendapatkan kursi berjumlah 52 di DPR.

18. Partai Keadilan Sejahtera

Partai ini merupakan partaiyang berbasis Islam dan memiliki perwakilan di parlemen Indonesia, PKS berdiri pada tanggal 20 April 1998 yang mana awalnya berasal dai Gerakan aktivitas dakwah islam sejak tahun 1980-an. Saat ini ketua umumny adalah Ahmad Syaikhu, Ketika pemilu 2004 partai ini berhasil memperoleh suara sebanyak 7,34% dan mendpatkan 38 kursi di DPR.

19. Partai Bintang Reformasi

Partai yang dibentuk pada tanggal 20 Januari 2002 yang saat ini diketuai oleh Bursah Zarnubi, Partai Bintang Reformasi merupakan nama baru dari yang seblumnya yaitu Partai Persatuan Pembangunan Reformasi sebagai hasil gabungan dari partai Indonseia Baru dan lainnya.

20. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai ini biasa disingkat dengan nama PDIP yang dibentuk pada tanggal 10 januari 1973 dan saat ini diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Ideologi partai ini didsarkan pada ilosofi nasional resmi Indonesia yaitu Pancasila.

21. Partai Damai Sejahtera

Partai ini dibentuk pada tanggal 01 Oktober 2001 dan pendirinya mendeklarasikan oartai ini sebagia partai "dinamika kekristenan". Ketua umum saat ini adalah Tilly Kasenda. Pada pemlu 2004 partai ini berhasil memperoleh suara sebnayak 2,14 %.

22. Partai Golongan Karya

Partai yang biasa disebut dengan Partai golkar ini dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai ini merupakan partai politik yang berkuasa dari tahun 1971 sampai 1999, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan B.J Habibie. Ketua umum partai Golkar saat ini adalah Airlangga Hartarto.

23. Partai Patriot Pancasila

Partai ini didirikan pada tanggal 01 Juni 2001 yang mana kelahirannyadibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila yang optimis bahwa kehadirannya memperoleh sambutan yang baik dari masyarakat terkhusus kaum muda. Partai ini sekarang diketuai oleh Japto Soerjosoemarno.

24. Partai Sarikat Indonesia

Partai ini dibentuk pada tanggal 17 Desember 2002 yang telah resmi menyatakan bergabung dengan Partai Amanat Naional tetapi memilih untuk berpisah Kembali di tahun 2008, ketua umum saat ini adalah Rahardjo Tjakraningrat.

25. Partai Persatuan Daerah

Partai ini didirikan pada tanggal 18 November 2002 yang mana lahirnya dibidani oleh Sebagian tokoh-tokoh politik yang bernaung di dalam Fraksi Utusan Daerah MPR-RI masa bhakti 1999-2004, ketua umum PPD adalah Oesman Sapta Odang. Namun sayang partai ini telah dibubarkan pada tahun 2011.

26. Partai Pelopor

Tanggal berdiri partai ini yaitu 29 Agustus 2002 yang pada saat ini diketuai oleh Eko Suryo Satjojo dan partai ini menjadi saalh satu pendiri Forum Persatuan Nasional. Asas partai ini adalah Pancasila yang di inisiatori oleh Rachmawati Soekarnoputri.

27. Isu konflik Pemilu 2004

Konflik dalam pemilu 2004 dapat dipicu oleh aturan dan atau interpretasi atas aturan pemilu yang tidak jelas, penegakan atas pelanggaran aturan pemilu yang tidak konsisten, lemahnya infrastruktur dan kapasitas organisasi penyelenggara pemilu, penetapan daerah pemilihan yang dianggap tidak adil, pengaturan jadual kampanye yang dianggap tidak adil, dan proses penghitungan suara yang tidak transparan/ tidak akurat. Selain itu benturan fisik antar-massa partai dan perusakan atribut partai oleh massa dari partai lain, juga merupakan potensi konflik yang juga harus dicermati

Secara umum tema konflik akan bercampur aduk antara tema ideologis (ideological battlefield), kekuasaan (power struggle) dan politik kantor (office politics). Konflik berlatar ideologis akan muncul dari agak samar-samar hingga cukup jelas, utamanya dalam pemilu legislatif. Konflik bertajuk perjuangan kekuasaan (siapa mendapat apa, berapa banyak, dan kapan) utamanya akan mewarnai pemilu presiden. Dan tema politik kantor terjadi secara internal pada partai-partai gemuk. Sementara koalisi antar-partai cenderung dibangun atas dasar pertimbangan kepentingan kekuasaan yang bersifat tematis, tentatif, dan politis. Daripada atas dasar kesesuaian ideologis. Ketegangan politik semasa kampanye terutama terjadi di antara partai-partai yang memperebutkan dukungan dari kalangan massa kelas bawah dengan afiliasi kultural yang sama.

Kabar buruk bagi Pemilu 2004 adalah antusiasme rakyat pada pemilu legislatif relatif rendah, ikatan emosi antara rakyat dan (hasil) pemilu 2004 relatif rendah komitmen rakyat untuk mensukseskan pemilu relatif rendah, Pemilu 2004 lebih dilihat sebagai pesta pemimpin daripada pesta demokrasi, kampanye akan lebih dilihat sebagai kesempatan cuma-cuma meluapkan kepenatan hidup daripada partisipasi politik rakyat, dan secara relatif tidak terjadi pendidikan politik tentang demokrasi. Namun kabar baiknya adalah adanya harapan terhadap munculnya pasangan calon presiden wakil presiden yang membesarkan hati cukup berkembang walaupun tidak besar, antusiasme rakyat yang rendah cenderung membuat mereka mengambil jarak psikologis

pada semua partai (termasuk pada partai pilihan mereka sekalipun), jarak psikologis membuat rakyat tidak berminat untuk mengumbar permusuhan pada partai politik lain yang memicu konflik fisik secara terbuka dan luas, manipulasi atas tema kesenjangan kelas yang didasari oleh sentimen ras dan agama tidak populer (lagi), dan desentralisasi membuat elite politik lokal memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah terjadinya anarki yang meluas.

28. Skenario Politik Pemilu 2004

Membaca realitas fakta yang ada, sesungguhnya kemungkinan yang terjadi barangkali tidak seseram yang digambarkan banyak kalangan selama ini bahwa pemilu 2004 akan "berdarah-darah" atau akan menimbulkan "gejolak revolusi sosial", seperti dikemukakan Lemhanas beberapa waktu lalu.. Memang dalam pemilu nanti bisa saja terjadi kekerasan politik di berbagai daerah. Atau, terjadi distorsi, cacat, karena ketidaksiapan KPU dalam menjalankan target tiap tahapan yang ada, seperti dalam kasus kepanikan KPU dalam penyediaan logistik yang terjadi sekarang.

Tetapi, hal itu tidak otomatis menggagalkan pemilu. Pemilu bisa saja tetap berlangsung, meski dengan kualitas masih rendah, karena disertai distorsi dan tidak menutup kemungkinan menyulut kekerasan politik di berbagai tempat. Dalam kaitan dengan konflik kekerasan, sejatinya banyak kemungkinan bisa terjadi dalam pemilu 2004 nanti. Masing-masing daerah akan berbeda-beda, tergantung potensi konflik yang ada dan kelancaran penyelenggaraan pemilu yang dijalankan. Karenanya, kita perlu menyusun berbagai skenario kemungkinan itu untuk Langkah-langkah pencegahan. Tiga macam skenario bisa diajukan di sini apakah pemilu yang akan datang menimbulkan gejolak politik atau tidak.

Skenario Pertama: Pemilu sebagai Pemicu Konflik Kekerasan. Artinya, sebenarnya ada tidak ada pemilu potensi konflik sudah ada di masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menjadi konflik terbuka. Potensi konflik itu kemudian mencuat menjadi kekerasan politik menumpang pada pemilu. Skenario ini sejalan dengan teori konjungtur bahwa pemilu menciptakan terbukanya struktur peluang politik (political opportunity structure) dan mendorong kekecewaan yang ada selama ini mencuat ke permukaan manifes menjadi kekerasan politik (Kurth and Schock, 1999). Termasuk dalam kategori ini adalah daerah-daerah rawan konflik atau mengandung potensi konflik yang tinggi. Hal itu bisa dilihat dari indikator politik, ekonomi, sosial-

budaya, dan keamanan yang ada, seperti fragmentasi elit, polarisasi ideologi, kesenjangan sosial-ekonomi, ketegangan hubungan antar etnis agama, tingkat kriminalitas, dsb. Daerah-daerah seperti Jakarta, Solo, Mataram, termasuk dalam kategori ini.

Skenario Kedua: Pemilu Menciptakan Gejolak Politik. Disini, kekerasan politik muncul semata-mata bersumber dari distorsi-distorsi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Argumen ini didasarkan pada teori deprivasi relatif bahwa kekerasan politik muncul karena berkembangnya kekecewaan (discontent) dalam masyarakat karena realitas yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan (lihat Why Men Rebel?, R. Ted Gurr, 1977). Masyarakat sebenarnya damai-damai saja, tetapi karena pemilu diselenggarakan kurang baik, tidak sesuai yang diharapkan masyarakat, maka timbul kekecewaan yang kemudian manifes menjadi kekerasan politik. Kemungkinan ini bisa terjadi di daerah "damai" seperti Yogyakarta dan Bali. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilu yang tidak beres di daerah ini bisa mengubah daerah-daerah "normal" ini menjadi daerah konflik kekerasan dalam pemilu 2004.

Skenario Ketiga: Pemilu Sebagai Solusi Konflik. Hal ini seperti dikemukakan skenario transisi demokrasi masyarakat pasca-konflik. Di sini, kekerasan politik justru akan minimal dalam pemilu karena berbagai alasan seperti sudah "capek" dengan konflik, elit politik ingin menyelamatkan muka melalui pemilu, kekecewaan elit politik terobati oleh adanya harapan baru dari pemilu, atau dominasi politik berlangsung di daerah bersangkutan karena golongan mayoritas telah memenangkan pertarungan dalam konflik. Termasuk dalam skenario ini adalah daerah-daerah pasca-konflik di beberapa daerah di luar Jawa seperti Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Meski daerah-daerah ini sebagian masih dalam kategori daerah konflik, tetapi situasinya bisa jadi akan semakin membaik setelah melampaui pemilu nanti.

29. Memetakan Potensi Kekerasan Politik Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan sarana paling baik untuk mengganti atau memperbaiki pemerintahan menjadi lebih baik dan efektif untuk mengatasi krisis nasional. Karenanya, segala faktor yang bisa menggagalkan pemilu, atau mengurangi kualitas pemilu perlu dicegah, agar pemilu berjalan demokratis, bisa menghasilkan pemerintah yang baik sesuai kehendak rakyat. Bila ini tidak tercapai ongkos sosial-politiknya terlalu mahal, kita akan semakin terpuruk dan butuh waktu lebih lama untuk bangkit dari krisis nasional.

Salah satu kendala penting penghalang terwujudnya pemilu demokratis adalah kemungkinan munculnya kekerasan politik. Kekerasan politik yang muncul perlu dicegah, karena hal itu akan merusak demokrasi dan menjadikan hasil pemilu tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Pemilu 2004 masih berlangsung dalam konteks transisi politik nasional. Transisi politik dari rejim Oder Baru ke peme-rintahan demokrasi pasca Seharto hingga kini belum menghasilkan konsolidasi demokrasi yang kuat. Pengikut rejim Orde Baru masih kuat bercokol dalam struktur politik. Sementara, pemerintahan demokratis belum terkonsolidasi, sangat lemah, belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan gejolak politik nasional. Di sisi lain, bangsa ini masih menghadapi berbagai masalah sosial yang akut, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan praktek korupsi yang semakin merajalela di masyarakat

30. Proses, Tahapan, Dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004

Dalam tataran yang paling minimal, pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (votes) menjadi wakil rakyat (seats). Pemilu diharapkan mampu menghasilkan seats yang mereepresentasikan suara rakyat. Pemerintah yang dihasilkan juga harus menjadi pemerintah yang terpercaya dan mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Oleh karena itu, dalam standar normal, isu keterwakilan, kepercayaan dan kepercayaan dan kepertanggungjawaban merupakan parameter utama dalam melihat keberhasilan pemilu.

Pemilu yang distortif adalah pemilu yang keluar dari parameter ini. Namun, dalam konteks perkembangan politik di Indonesia sekarang ini, pemilu tidak bisa dilihat dari parameter standar di atas. Pemilu bukan hanya harus dilihat sebagai mekanisme politik yang memungkinkan membangun pemerintahan yang reperesentatif, terpercaya dan akuntabel. Tetapi, pemilu 2004 sekarang ini (pemilu jurdil kedua pasca Orba) juga harus dilihat sebagai parameter penting proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, sejauh mana pemilu 2004 mampu menjamin dan mengindikasikan kesepakatan semua pihak untuk menjadikan “democracy as the only game in town”.

31. Distorsi Pemilu

Distorsi terhadap apa? Sebagai telah saya sampaikan secara sepintas, pemilu 2004 tidak cukup hanya dilihat sebagai mekanisme politik untuk

mengkonversi suara rakyat menjadi pemerintah yang representatif, terpercaya dan akuntabel. Namun, pemilu 2004 harus pula dilihat dalam konteks transisi menuju konsolidasi demokrasi. Artinya, proses dan praktek politik dalam pemilu 2004 yang mengindikasikan konsolidasi demokrasi menjadi parameter yang mendasar pula. Pemilu 2004 dijalankan setelah hampir lima tahun jatuhnya Presiden Suharto, pemimpin dan simbol otoritarianisme Orde Baru.

Walaupun kebanyakan kita sepakat bahwa kejatuhan Suharto tidak identik dengan kejatuhan otoritarianisme, namun saya kira kita sepakat kejatuhan Suharto bisa diartikan dengan mulai terbukanya ruang bagi proses transisi menuju konsolidasi demokrasi Kalau konsolidasi demokrasi kita artikan sebagai terbangunnya kesepakatan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya cara untuk menjalankan interaksi sosial dan politik, maka pertanyaannya sejauhmana dalam proses pemilu telah terindikasikan proses sosial dan politik yang demokratis.

Dalam literatur standar ilmu politik yang membahas tentang pemilu, ada beberapa persyaratan agar sebuah pemilu bisa dikatakan sebagau pemilu yang baik (Reynold., et all., 1997). Pertama, pemilu harus bisa menjamin terciptanya lembaga perwakilan rakyat yang representatif. Representasi ini bisa berupa representasi geografis maupun representasi fungsional. Dalam representasi geografis, setiap kesatuan wilayah yang berpenduduk, baik kota, kabupaten, provinsi maupun daerah pemilihan (elektoral distric) memiliki perwakilan di parlemen, sehingga para wakil rakyat ini sepenuhnya bertanggungjawab terhadap wilayah yang diwakilinya. Sementara itu, represtasi fungsional berupa perwakilan rakyat yang tercermin dalam parpol-parpol di parlemen yang biasanya mencerminkan variasi idiologi dalam bangsa yang bersangkutan. Apaun bentuk representasi yang dipilih, setiap kursi (seats) dikonversi dari suara (votes).

Oleh karena itu, prinsip OPOVOV (one person, one vote, one value) sebagai satu prinsip dasar representasi dalam pemilu. Kedua, pemilu yang baik haruslah pemilu bermakna (meaningful) serta membangun pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable). Regulasi dan sistem politik yang ada harus menjamin kekuasaan (power) yang dimilki loleh parlemen hasil pemilu ini akan menjadi penentu bagi bermakna tidaknya sebuah pemilu. Pemilu dianggap berhasil bila mampu melahirkan parlemen yang berpengaruh pada formasi dan pengambilan kebijakan pemerintah. Selain itu, pemilu harus mampu melahirkan pengendali pemerintah yang bertanggungjawab kepada

rakyat. Kehadiran oposisi dalam parlemen seringkali menjadi penting untuk membantu efektivitas kinerja anggota parlemen. Kekuatan oposisi memang tergantung pada banyak faktor selain sistem pemilu, namun ketika sistem pemilu mendorong terciptanya oposisi yang lemah, pemerintahan demokratis juga menjadi lemah.

Ketiga, pemilu diharapkan bisa memfasilitasi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan stabil serta memberikan insentif bagi konsiliasi yang bisa memediasi antar kepentingan yang bertarung. Kriteria ini dipandang perlu karena sistem politik tidak hanya ditempatkan sebagai cara membentuk pemerintahan, namun juga sebagai alat menejemen konflik dalam masyarakat. Selain ini terkait dengan apakah masyarakat mampu menerima hasil pemilu sebagai proses jujur dan adil serta terpercaya, pemilu seharusnya mendorong bagi terbentuknya parpol yang "cross-cutting" politik. Pemilu perlu mendorong lahirnya parpol yang didasarkan pada nilai-nilai dan ideologi politik terbuka, dan bukan didasarkan pada batasan-batasan askriptif seperti etnik, rasial, dan regional. Rentang ideologi antar parpol seharusnya juga semakin menyempit.

Terakhir, keempat, pemilu yang baik adalah yang bisa diakses oleh siapapun (accessible) dan diselenggarakan secara mudah dan murah (feasible). Kriteria ini menekankan pada pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat pemilih, termasuk kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran pemilih, kemudahan dalam memperoleh dan memahami kartu suara, kemudahan menjangkau lokasi tempat pemilihan. Kemudahan-kemudahan ini akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk mendukung proses pemilu. Pada saat yang sama, desain pemilu menghitung fasibilitas teknis, antara lain kapasitas administratif dan anggaran. Tanpa adanya kapasitas pelaksanaan bagi berlangsungnya pemilu, semua impian dalam membangun pemilu yang baik akan runtuh. Oleh karena itu, desin pemilu yang efisien menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan.

B. Partai-Partai Pemilu Tahun 2009

Partai Demokrat meraih suara terbanyak pada Pemilu 2009 dengan 21,703,137 dan 148 kursi di DPR. Kemudian posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 15,037,757 suara dan 106 kursi di DPR. Pada posisi ketiga ditempati PDI-P dengan 14,600,091 suara dan 94 kursi di DPR. Sedangkan untuk pemilihan presiden, pemungutan suara digelar pada 8 Juli 2009. Saat itu ada 3 pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang bersaing. Mereka

adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Yang menjadi pemenang Pilpres 2009 adalah pasangan SBY-Boediono dengan 73.874.562 suara. Pasangan Megawati-Prabowo mendapatkan 32.548.105, dan duet Jusuf Kalla-Wiranto meraih 15.081.814. Kubu JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilpres 2009. Namun, MK menolak seluruh gugatan pemohon pada 12 Agustus 2009. Enam hari kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009. Keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014 pada 20 Oktober 2009.

Selayang pandang Partai Politik Pemilu 2009

Partai Hati Nurani Rakyat

- Visi
  1) Kemandirian Bangsa
     Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
  2) Kesejahteraan Rakyat
     Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat ‘kesejahteraan rakyat Indonesia’, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.
- Misi

1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.

3) Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4) Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
5) Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
6) Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
7) Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Program
  Pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah yang memilki berpotensi dan berdedikasi, pendidikan dan kesehatan.
- Pengurus
  Ketua Umum : Jend. TNI (Purn) H. Wiranto, SH

Partai Karya Peduli Bangsa

Ketua Umum : HR. Hartono
Sekretaris Jendral :Ary Mardjono
Didirikan : Jakarta 9 September 2002
Dideklarasikan : Jakarta 3 Nopember 2002
Data Pendaftaran tahun : 2002
Pengesahan : SK. Menkehham NO. M.UM.06.08 - 270 Tgl. 23 Oktober 2002
Alamat : JL. CIMANDIRI NO. 30 GONDANGDIA JAKARTA PUSAT
Azas Partai : Pancasila

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) merupakan partai yang tertib dalam mentaati jadwal KPU dan merupakan partai pertama yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu 2004 di KPU. Gagasan mendirikan partai ini dicetuskan oleh Jendral (Purn) HR Hartono melalui suatu organisasi kemasyrakatan yang bernama Karya Peduli Bangsa sebagai

langkah dalam menyikapi perubahan politi yang terjadi pada saat ini yang dinilai telah mulai luntur dari tujuan reformasi.

Pilar kekuatan dari partai ini selain dari Ormas KPB, juga didapat dari Ormas Pemuda dan Ormas Wanita serta dari tokoh-tokoh purnawirawan TNI lain diantaranya Ary Mardjono dan H. Namuri Anoem S. Dalam Pemilu 2004 PKPB mencalonkan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Calon presiden.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

Ketua Umum : Daniel Hutapea

Sekretaris Jendral : Rudy Prayitno

Eksistensi Partai PPPI hingga kini berdasarkan Akte Pendirian Nomor 3/Tgl 12-12 2002 (Notaris H.Dana Sasmita SH, red), SK Menteri Kehakiman Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik Nomor M.UM 06.08-15 (16 Januari 2003, red) dan SK Menteri Kehakiman Pendaftaran Hak Cipta Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, Nomor 025510 (12 Maret 2003, red).

Partai PPPI dilahirkan bukan untuk kepentingan deklarator tapi untuk kepentingan pengusaha dan pekerja, khususnya di daerah-daerah, para gubernur, walikota juga bupati-bupati. Dan peran serta daerah, putera-puteri daerah di Partai PPPI diyakini mampu sebagai motivator dan solusi bagi kebuntuan selama ini.

Partai PPPI, partai politik yang tepat bagi para pengusaha dan para pekerja untuk saling duduk bersama, menentukan masa depan, selain bersama-sama pula memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerja itu sendiri. Dengan kata lain lahirnya partai ini menjembatani aspirasi para pekerja kepada para pengusaha sehingga tercipta iklim yang dinamis, kesejahteraan para keluarga pekerja dapat di jamin. Lahirlah win-win solutions antara pengusaha dan pekerja. Keuntungan dari kedua belah pihak pun dapat diperoleh. Kesejahteraan bangsa ini pun dapat diraih. Tak ada lagi aset-aset Negara yang harus tergadaikan pada bangsa lain alih-alih demi kesejahteraan rakyat.

Partai PPPI telah di daftarkan ke Departemen Kehakiman sebagai kesiapan Pemilu 2009 nanti. Pengurusnya partai ini merupakan gabungan dari berbagai asosiasi, terdiri dari mantan pengurus dan juga sebagian besar masih aktif di organisasinya seperti Kadin, Hipmi, Iwapi, Organda, Gapensi, Apindo, REI, Serikat-serikat Pekerja dan sebagainya. Sementara kepengurusanya di tingkat kecamatan pun mensinerjikan antara kekuatan para pengusaha menengah, kecil serta mikro seperti pedagang rokok, pedagang warteg, pengusaha tempe, tahu dan militansinya para pekerja di sektor formal serta

informal. Kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Daerah selalu bervariasi. Ketua Umumnya dari Pengusaha sementara Sekjen-nya dari Serikat Pekerja Pos Indonesia, Komposisi demikian, komposisi saling mengisi sehingga diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha, pekerja dan para profesional. Sehingga tidak ada lagi buruh demo ke perusahan karena pengusaha dan pekerja sudah menentukannya sendiri dan pemerintah tidak turut campur lagi.

Saatnya pengusaha dan pekerja bersatu untuk menyongsong Indonesia bermartabat. Selangkah lagi pengusaha jadi Presiden, selangkah lagi pekerja dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendahnya dengan Presiden yang pengusaha, Pengusaha yang menjadi Presiden. Lantaran antara pengusaha dan pekerja semakin terbuka dan tak perlu lagi ada jurang pemisah yang secara sadar atau tidak sadar kita ciptakan sendiri.

Partai Peduli Rakyat Nasional

Ketua Umum : Amelia Achmad Yani
Sekretaris Jenderal : H.V.T Albert Simanjuntak
Alamat : Kantor DPP PPRN, Jl. Pahlawan Revolusi No.148 Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Jakarta - Tanggal berdiri : 16 Februari 2006
Inisiator : Sutan Raja DL Sitorus
Pendiri : Sutan Raja DL Sitorus
Azas : Pancasila
Lambang Partai : Dua bintang, satu besar satu kecil saling menumpuk diagonal dengan background lingkaran hitam.

Sejarah Partai

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) didirikan oleh tokoh Tapanuli yang juga pengusaha kakap di Sumatera Utara, Sutan Raja DL Sitorus pada 16 Februari 2006. Pendiriannya didasari keprihatinan makin tipisnya kadar patriotisme di kalangan generasi muda. Dalam akte pendirian, DL Sitorus berposisi sebagai ketua dewan pembina.

Adapun ketua umum pertamanya adalah Tarida Sinambela, namun kepemimpinannya tak lama. Akibat tak stabilnya kinerja, dalam Kongres DPW PPRN se-Indonesia 27 November 2008, Tarida digantikan putri pahlawan revolusi, Amelia Achmad Yani. Sementara itu, DL Sitorus tak bisa ikut mendampingi operasional PPRN. Tahun 2008, MA menguatkan vonis 8

tahu penjara untuknya setelah terbukti melakukan perambahan hutan Padanglawas, Sumatera Utara.

- Visi
  Rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.
- Misi
  1) Meningkatkan pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
  2) Meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Partai Gerakan Indonesia Raya

Nama Lengkap: Partai Gerakan Indonesia Raya
Tempat Lahir: Indonesia
Tanggal Lahir: Rabu, 6 Februari 2008
Warga Negara: Indonesia

Partai Gerakan Indonesia Raya atau GERINDRA adalah partai politik yang menjagokan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia pada tahun 2014 mendatang. Partai yang digawangi oleh Ir. Suhardi M. Sc ini bermula dari suatu keprihatinan terhadap kemelaratan yang dialami oleh masyarakat Indonesia akibat permainan orang yang tidak memperdulikan kesejahteraan bangsa. Ketika November 2007, Fadli Zon dan pengusaha ternama Hashim Djohadikusumo membahas masalah politik yang menurut mereka mulai menjauhi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Perbincangan mengenai nasib bangsa ini kemudian menjadi gagasan berdiri partai Gerindra yang saat itu baru diwacanakan di kalangan Hashim dan Prabowo. Berdirinya partai ini pun juga mendapat penolakan dari beberapa orang yang tidak ingin terlibat dengan pembuatan parpol baru.

Perdebatan yang cukup panjang dan alot akhirnya menghasilkan manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat yang memiliki 6 prinsip dasar partai (Prinsip Disiplin, Prinsip Kedaulatan, Prinsip Kemandirian, Prinsip Persamaan Hak, Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong dan Prinsip Musyawarah) dan juga 16 pokok-pokok perjuangan partai Gerindra. Selain itu, pada bulan Desember 2007, di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di bendungan Hilir, berkumpullah sejumlah nama seperti Adli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe untuk membicarakan

masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. Dengan ini, partai Gerindra ingin mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945.

Namun, perjuangan Fadli yang setelah pertemuan itu sakit dan sempat merasa pesimis bahwa gagasan partai baru ini akan terus berlanjut, akhirnya tidak berakhir tragedi. Pada tanggal 6 Februari 2008, terbentuklah Partai Gerindra. Adanya partai ini diharapkan mampu mengabdi untuk menghadapi masalah sistem politik, perekonomian bangsa dan situasi sulit Indonesia dengan mengeratkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka dengan semangat kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat, Partai Gerindra memilih nama Gerakan Indonesia merdeka dan kepala Garuda sebagai perwujudan niat dan komitmen mereka terhadap manifesto Gerakan Indonesia Rayanya.

Partai Barisan Nasional

Ketua: Vence Rumangkang
Sekretaris jenderal: Dadang Garnida
Didirikan: 1 Oktober 2007
Kantor pusat: Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Ideologi: Pancasila

Partai Barisan Nasional (Barnas) adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 6. Partai ini berazas Pancasila. Partai Barnas didirikan pada 1 Oktober 2007 oleh inisiator Vence Rumangkang yang sekaligus membangun partai ini. Secara resmi Partai Barisan Nasional atau Barnas dideklarasikan pada 1 Oktober 2007. Barnas pada awalnya adalah suatu organisasi massa bernama Barisan Nasional Demokrat atau BND yang diketuai Vence Rumangkang. Sebelum diproduksi menjadi Ketua Umum Partai Barnas, Vence dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Simbol partai ini adalah bintang bersudut lima yang di tengahnya ada gelang rantai di dalam lingkaran merah putih serta hamparan peta merah putih yang membentang dari kiri ke kanan di atas warna landasan biru muda.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),[1] adalah sebuah partai politik di

Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKP pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKP bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala.

Ketua Umum PKP saat ini dijabat oleh Yussuf Solichien sejak 26 Mei 2021 menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri. Yussuf terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada bulan Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar. Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP, Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.

Pencapaian dalam pemilu legislatif

ada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi. Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai ini menentang International Monetary Fund dan privatisasi. Dukungan utama terhadap PKPI berasal dari Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai politik ini pertama kali dibentuk pada tanggal 20 April 2002 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak tahun 1967 yang dipelopori oleh Muhammad Natsir. Pada era Orde Baru tahun 1985, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa kala itu. Di saat itulah muncullah Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. Selanjutnya didirikanlah Lembaga

Dakwah Kampus yang dibentuk olah para anggota dari Jamaah Tarbitah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 1986 terbentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa Lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal seperti Darul Islam.

Kemudian saat mengadakan pertemuan FSLDK yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1998, tercetuslah sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini muncul dengan mengusung melawan reformasi dan rezim Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. KAMMI kemudian berubah menjadi sebuah partai Islam sejalan dengan lengsernya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998. Para tokoh KAMMI pun mulai mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Keadilan (PK). Kendati lahirnya PK erat kaitannya dengan KAMMI, namun keduanya tidak memiliki hubungan secara formal. Partai Keadilan kemudian secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 Juli 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pendeklarasian ini bersamaan dengan pengangkatan Nurmahmudi Ismail sebagai presiden PK yang pertama. Debut PK dalam pemilihan umum (Pemilu) dilakukan pada Pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara sebesar 1,36%. Namun PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% yang mengharuskan PK untuk berganti nama. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. PKS kemudian ikut serta dalam Pemilu 2004 dengan mendapatkan suara sebanyak 7,34%. Dengan ini, PKS menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 45.

PKS juga berkembang dengan menaungi beberapa organisasi seperti Garda Keadilan, Gema Keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS) serta beberapa kelompok publik yang bergabung secara formal maupun tidak formal seperti Serikat Pekerja Keadilan (SPK)[12] Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI),[12] Central for Indonesian Reform (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Institute for Economics Studies (INFES), Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS). Dalam sistem perekrutan kader, PKS menerapkan dua pola utama yakni pola rekrutmen individual (al-da'wah al-fardhiyyah) serta

pinstitusional (al-da'wah al'amma). Dalam pola pertama, calon kader akan didekati secara personal dan kemudian diajak berpartisipasi dalam berbagai forum yang diadakan PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Pola perekrutan seperti ini biasanya dilakukan oleh gerakan Islam yang ada di Mesir. Sedangkan dalam pola kedua, PKS akan bergabung dengan beberapa organisasi untuk menarik para calon kader untuk bergabung dengan partai. Sebagai anggota PKS diwajibkan untuk mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat.

Anggota PKS tercatat tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan juga datang dari negara Timur Tengah lainnya, seperti Mesir dan Palestina dengan kader total sebanyak 7,000 orang yang tersebar di 22 negara di dunia. Pada Pemilu 2009 lalu PKS telah berhasil meraup suara sebesar 8,204,946 atau sekitar 7,88%. Saat ini PKS dipimpin oleh Anis Matta.

Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional (disingkat: PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam (AD Bab II, Pasal 3). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Zulkifli Hasan.[5] Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Hatta Rajasa, sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Partai dijabat oleh Soetrisno Bachir.

Sejarah Partai

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet.

PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, , Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toeti Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian

berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa. Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional. Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014.

Kegiatan

Tanggal 5–7 Juli 1998, dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat Wilayah (provinsi). Dalam sidang komisi, mayoritas peserta menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru. Namun dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi parpol, juga tidak akan membidani lahirnya sebuah parpol. Tetapi warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan minat dan potensinya.

Tanggal 22 Juli 1998, Amien Rais menghadiri pertemuan MARA di hotel Borobudur. Hadir dalam acara membahas situasi politik terahir ini, antara lain: Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Dawam Raharjo, Ratna Sarumpaet, Zumrotin, dan Ismet Hadad. Dari hasil diskusi dan evaluasi kinerja MARA, Goenawan kemudian menyimpulkan bahwa disepakati perlunya MARA memersiapkan pembentukan partai, disamping fungsinya semula sebagai gerakan moral. Tim kecil yang diharapkan akan membidani lahirnya sebuah parpol kemudian dibentuk.

Partai Perjuangan Indonesia Baru

Jakarta - Tanggal berdiri : 23 September 2002
Inisiator : Dr Sjahrir
Pendiri : Dr Sjahrir, Rocky Gerung, M Chatib Basri
Azas : Pancasila

Lambang partai : Delapan anak panah keluar menandai kekuatan meraih dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Lambang padi dan kapas melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum : Nurmala Kartini Sjahrir
Sekretaris Jenderal : Edi Danggur
Alamat : Kantor DPP PPIB, Jl. Teuku Cik Ditiro No. 31 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta Indonesia 10310. Telp: 021-3107058 Fax: 021-3145584

SEJARAH

Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) didirikan dari rahim Ormas yang bernama Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Ormas ini dikomandani Dr Syahrir, ekonom terkemuka yang juga mantan aktivis Malari 1974. PIB memiliki titik berat memajukan kemakmuran bersama. Mengapa PPIB merasa perlu mendirikan parpol? Salah satu deklarator Partai Indonesia Baru, Rocky Gerung mengatakan perlunya memperjuangkan ide-ide PIB dalam tataran politik. "Kita tidak ingin gagasan-gagasan kita hanya jadi headline media massa. Kita ingin memperjuangkan itu untuk menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak," ungkapnya.

Namun dalam Pemilu 2004, PPIB relatif belum dikenal publik. Akibatnya, perolehan suaranya buruk dengan hanya mengantongi 0,59% suara pemilih Indonesia. Menghadapi Pemilu 2009, PIB kehilangan pendirinya. Dr Syahrir meninggal dunia di tahun 2008.

Visi dan Misi

Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) adalah Partai yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan majemuk.

Berkeadilan, berarti Negara harus menjamin.

1. Lapangan Kerja, agar masyarakat memiliki pendapatan untuk dapat hidup layak, sehat dan berpendidikan.
2. Perpajakan yang sehat, agar pembangunan dapat dilaksanakan merata dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran dan cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemberantasan Kemiskinan absolut dengan sesegera mungkin. Demokratis, berarti:
    a. Jaminan penuh bagi perlindungan dan pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dalam suatu masyarakat majemuk.

b. Kesamaan kedudukan semua orang didepan hukum.
c. Partisipasi aktif masyarakat didalam pembuatan kebijakan negara.
d. Pengawasan yang terbuka oleh masyarakat terhadap pemerintah parlemen dan lembaga peradilan.

Majemuk, berarti:

a. Negara menjamin keragaman budaya dan ekspresi bebas setiap kebudayaan.
b. Negara menjamin kehidupan golongan minoritas dan tidak menjalankan diskriminasi dalam segala bentuk.
c. Negara menjaga kerukunan dan menjamin kebebasan beragama dan keyakinan hidup setiap orang.

Pencapaian pada pemilu sebelumnya:

2004 = 669.835 suara atau 0,59% (0 kursi di DPR)

Partai Kedaulatan

Partai Kedaulatan adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 11.

Sejarah

Partai Kedaulatan didirikan oleh Ibrahim Basrah tanggal 4 Oktober 2006. Ibrahim Basrah adalah sosok politikus yang berpengalaman. Di awal reformasi, ia berhasil menjadi anggota DPRD Maluku Utara dari PPP. Menjelang Pemilu 2004, Basrah menjadi tokoh yang mempelopori keberadaan Partai Demokrat di Maluku Utara. Dan menghadapi Pemilu 2009 ini, Basrah sudah mendirikan partainya sendiri, Partai Kedaulatan (PK).

Menurut Basrah, pendirian PK ditujukan untuk mewujudkan negara dan rakyat Indonesia yang berdaulat, berwawasan religius dan nasional, kuat, aman, adil, makmur sejahtera, serta eksistensi negara yang setara dalam dunia internasional. Tak heran, slogan yang diusungnya pun tegas, “Saatnya Rakyat yang Berdaulat.”

Forum Persatuan Nasional

Tanggal berdiri: 4 Oktober 2006 Inisiator: Ibrahim Basrah Tokoh pendiri: Ibrahim Basrah Asas: Pancasila Lambang partai: Gambar sebuah bintang yang dilingkari padi dan kapas, berlatar segitiga biru dan warna merah putih di belakangnya.

Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.

Partai Pemuda Indonesia

Partai Pemuda Indonesia adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 14.

Ketua: Horas Sihombing

Sekretaris jenderal: Syarir Tambero

Kantor pusat: Casabalanka-Jakarta Selatan

Ideologi : Pancasila dan UUD 45 dan Partai Terbuka

Forum Persatuan Nasional

Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka. Beberapa pengurus dan anggota partai diatas kemudian melebur ke Partai Persatuan Nasional.

Partai Demokrasi Pembaruan

Ketua: Roy B.B. Janis, Petrus Selestinus (versi Laksamana)

Sekretaris jenderal: Didi Supriyanto (versi Roy), Robert Samosir:(versi Laksamana)

Didirikan: 2005

Kantor pusat: Jl. Sisingamangaraja No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (versi Laksamana), Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 29, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (versi Roy)

Ideologi: Pancasila

Pemilihan umum

Partai Demokrasi Pembaruan (disingkat PDP) yaitu salah satu partai politik di Indonesia. Pada Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 16. Partai ini

didirikan tahun 2005 oleh beberapa mantan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang pernah tidak jauh dengan Megawati Soekarnoputri. Masa ini, PDP terpecah menjadi 2 kubu yang keduanya mengaku sbg pimpinan partai yang sah.

Sejarah

Pada kongres PDI-P tahun 2005 terjadi perbedaan tajam dalam penentuan cara demokratis yang berlanjut di partai. Sekelompok orang, termasuk di dalamnya Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis, mengambil pandangan bahwa walaupun PDI-P yaitu partai politik yang modern namun sedang menggunakan cara lama otoriter, seperti memberikan hak istimewa mutlak kepada ketua partai dan hanya memiliki satu kandidat sbg posisi-posisi senior. Kumpulan ini akhir membangun Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang mengambil sistem kepemimpinan kolektif dengan 35 orang dalam pimpinan kolektif nasional.

Masa ini, PDP terpecah menjadi 2 kubu, sela kubu Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis, yang keduanya mengaku sbg pimpinan partai yang sah. Masing-masing kubu juga memiliki kantor dan situs web resminya sendiri.

Pengurus masa ini

Versi Laksamana Sukardi

Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional: Laksamana Sukardi
Ketua Pelaksana Harian: Petrus Selestinus
Sekretaris Pelaksana Harian: Robert Samosir

Versi Roy B.B. Janis

Ketua Pelaksana Harian: Roy B.B. Janis
Sekretaris Pelaksana Harian: Didi Supriyanto
Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional: Potsdam Hutasoit

Forum Persatuan Nasional

Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol ditengahnya Partai Persatuan Kawasan (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.

Partai Karya Perjuangan

Ketua: Jackson A. Kumaat
Sekretaris jenderal: Ambo Enre
Dibangun: 2007
Kantor pusat: DKI Jakarta
Ideologi : Pancasila

Pemilihan umum

Partai Karya Perjuangan yaitu salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 17. Direncanakan pada tahun 2014, Partai ini akan berubah nama menjadi Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD) yang di deklarasikan pada tanggal 7 November 2011, dikarenakan partai ini akan menjadi anggota dari organisasi sayap di dalam tubuh Partai Demokrat.

Profil Partai

Tanggal berdiri : 7 Juli 2007
Inisiator : M Yasin
Tokoh pendiri : Jackson Kumaat.
Azas : Pancasila
Lambang partai : Lambang Partai mempunyai bentuk segiempat, dasar biru, dengan kombinasi merah-putih melintang arah horizontal, disertai gambar pohon beringin berwarna merah di sisi kiri atas, dan tulisan PARTAI KARYA PERJUANGAN berwarna kuning di anggota bawah
Ketua Umum : M Yasin
Sekretaris Jenderal : Ambo Enre.

C. Partai-Partai Pemilu Tahun 2014

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai Nasional Demokrat atau Partai NasDem yaitu sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Partai ini, semula didukung oleh pengusaha media, Hary Tanoesoedibjo. Namun sebab perbedaan prinsip, penghabisannya Hary memilih bergabung ke Partai Hanura.

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elite partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem. Pada kongres Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi gerakan pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang bermula dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

Tokoh penting partai

Berikut ini yaitu daftar tokoh-tokoh penting Partai NasDem:

Ketua Umum : Surya Paloh
Ketua Bid Pemilihan Umum : Ferry Mursyidan Baldan
Ketua Bid Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi : Sugeng Suparwoto
Ketua Bid Media & Komunikasi Politik : Sri Sajekti Sudjunadi
Ketua Bid Pendidikan Politik & Hukum budaya istiadat : Dr. Silverius Sonny Y. Soeharso
Ketua Bid Politik dan Pemerintahan : Akbar Faizal
Ketua Bid Hukum, Advokasi & HAM : Taufik Basari
Ketua Bid Otonomi Daerah : Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Ketua Bid Pertanian & Maritim : Victor Laiskodat, SH, MH
Ketua Bid Pertahanan & Keamanan : Tedjo Edhy Purdijatno
Ketua Bid Energi, SDA & Sekitar yang terkait Hidup : Dr. Kurtubi
Ketua Bid Agama & Masyarakat Hukum budaya : Hasan Aminudin
Ketua Bid Hubungan Luar Negeri : Enggartiasto Lukita
Ketua Bid Ekonomi & Moneter : Dr. Anthony Budiawan
Ketua Bid Kesehatan, Perempuan & Anak : Irma Chaniago
Ketua Bid Industri, Perdagangan & Tenaga Kerja : Zulfan Lindan
Ketua Bid Olahraga, Pemuda & Mahasiswa : Martin Manurung, SE, MA
Sekretaris Jenderal : Patrice Rio Capella
Wasekjen Bid Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi : Willy Aditya, S.Fil, MDM

Wasekjen Bid Internal & Kesekretariatan : Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si
Wasekjen Bid Renlitbang : Dedy Ramanta, SH
Wasekjen Bid Eksternal : Siar Anggretta Siagian, MA
Bendahara Umum : Frankie Turtan
Waben Bid Penggalangan Dana : Guntur Santosa
Waben Bid Pengelolaan Aset : Joice Triatman
Ketua Mahkamah Partai : OC Kaligis
Ketua Dewan Pertimbangan Partai : Rachmawati Soekarnoputri
Ketua Dewan Pandai : Bachtiar Aly

Organisasi sayap

Partai NasDem memiliki beberapa organisasi sayap, di antaranya:
Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, diketuai oleh Taufik Basari (Pelaksana Tugas)
Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), diketuai oleh Irma Chaniago
Liga Mahasiswa Nasdem, diketuai oleh Willy Aditya
Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani NasDem)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir sebagai organisasi politik yang ingin mewadahi aspirasi masyarakat Nadhalatul Ulama, ketika rezim Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto baru saja runtuh pada Mei 1998.

PKB yang dilambangkan dengan lingkaran yang melingkupi wilayah nusantara dan dikelilingi sembilan bintang ini, dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh para kiai NU.

Cikal bakal Partai yang kini diketuai Muhaimin Iskandar ini, tak bisa lepas dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhlatul Ulama. Sehari setelah Soeharto mengakhiri masa kepemimpinan 32 tahun pada 21 Mei 1998, Pengurus Besar NU mendapat banyak usulan dari umat untuk pembentukan partai politik, dan juga rekomendasi nama-nama parpol. Saat itu yang paling banyak mengemuka adalah adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Namun, PBNU tidak dapat memungkiri hasil muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, yang menyatakan NU secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Sikap yang dipegang PBNU ternyata tidak memuaskan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat NU. Beberapa pengurus NU di daerah bahkan sudah ada

yang membuat parpol sendiri karena derasnya keinginan berpolitik dari warga NU.

PBNU, melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998 membentuk Tim Lima yang diketuai KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dan diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Pada 26 – 28 Juni 1998, Tim Lima dengan tim bantuan yang baru dibentuk Tim Asistensi, diketuai Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), mengadakan pertemuan di Cipanas, Jawa Barat untuk menyusun rancangan pembentukan parpol.

Secara keseluruhan, pertemuan itu menghasilkan pokok-pokok Pikiran NU. Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Pertemuan membahas Partai Politik berlanjut pada 4 Juli 1998 di Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan di Bandung itu juga diputuskan dengan mengusung nama Partai Kebangkitan Bangsa. Proses konsolidasi hasil pertemuan itu dengan pihak PBNU memutuskan lima kiai menjadi deklarator PKB yakni KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat, KH Muchid Muzadi dan KH. A. Mustofa Bisri serta KH Abddurahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Sejak saat itu, PKB lahir sebagai partai politik yang sangat lekat dengan organisasi Islam NU dan juga masyarakat Nahdliyin.

Pada pemilu 1999, tampil sebagai debutan, tak membuat raihan suara PKB jeblok. Perolehan suara PKB justru melejit di urutan ke-tiga setelah PDI Perjuangan dan Golkar, dengan raihan 12,6 persen suara.

PKB juga memperlihatkan semangat partai Islam ketika mewujudkan koalisi poros tengah dari partai-partai Islam dan berhasil membawa tokoh PKB, Abdurrahman Wahid ke kursi Presiden RI ke-empat pada Pemilu 1999, meskipun akhirnya dilengserkan pada 2001. Perpecahan melanda PKB pada awal dekade 2000. Muktamar PKB pada 2005 di Semarang, Jawa Tengah, menjadi salah satu puncak gejolak perselisihan di internal PKLB.

Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur yang memimpin PKB saat itu bersama Muhaimin Iskandar menghadapi pertentangan dengan para kiai. PKB pun perlahan kehilangan basis pendukung tradisionalnya di pesantren-pesantren di Jawa. Hal itu yang mengakibatkan, pada Pemilu 2009, suara PKB jeblok dengan penurunan 50 persen dibanding 2004. PKB hanya mendapat 5.146.122 suara atau 4,9 persen pada 2009.

Menjelang Pemilu 2014, PKB menyiapkan tiga kandidat bakal calon Presiden yang masih bersaing untuk meraih tiket ke Pemilihan Presiden, Juli 2014 dan membawa PKB agar lolos syarat ambang batas pencalonan pada Pemilu Legislatif, April mendatang.

Ketiga kandidat itu adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Politisi senior Golkar dan juga Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Penyanyi dangdut senior Rhoma Irama.

PKB juga memberikan kursi Wakil Ketua Umumnya kepada Direktur Umum Maskapai Penerbangan Lion Air, Rusdi Kirana, Januari 2014 lalu.

Pengurus

Ketua Dewan Syuro: KH Abdul Aziz Mansyur.

Ketua Umum: Ketua Umum Muhaimin Iskandar

Sekretaris Jenderal: Imam Nachrowi

Bendahara Umum: Bachrudin Nasori

- Visi
  1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual,
  3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
- Misi
  1) **Bidang Ekonomi**: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
  2) **Bidang Hukum**: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
  3) **Bidang Sosial Budaya**: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  4) **Bidang Pendidikan**: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

5) **Bidang Pertahanan**: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai politik ini pertama kali dibentuk pada tanggal 20 April 2002 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak tahun 1967 yang dipelopori oleh Muhammad Natsir. Pada era Orde Baru tahun 1985, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa kala itu. Di saat itulah muncullah Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. Selanjutnya didirikanlah Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk olah para anggota dari Jamaah Tarbitah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 1986 terbentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa Lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal seperti Darul Islam.

Kemudian saat mengadakan pertemuan FSLDK yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1998, tercetuslah sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini muncul dengan mengusung melawan reformasi dan rezim Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. KAMMI kemudian berubah menjadi sebuah partai Islam sejalan dengan lengsernya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998. Para tokoh KAMMI pun mulai mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Keadilan (PK). Kendati lahirnya PK erat kaitannya dengan KAMMI, namun keduanya tidak memiliki hubungan secara formal. Partai Keadilan kemudian secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 Juli 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pendeklarasian ini bersamaan dengan pengangkatan Nurmahmudi Ismail sebagai presiden PK yang pertama. Debut PK dalam pemilihan umum (Pemilu) dilakukan pada Pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara sebesar 1,36%. Namun PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% yang mengharuskan

PK untuk berganti nama. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. PKS kemudian ikut serta dalam Pemilu 2004 dengan mendapatkan suara sebanyak 7,34%. Dengan ini, PKS menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 45.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang pernah menjadi kontestan Pemilu. PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Partai IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Latar Belakang

Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI pada zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.

Perkembangan

Dengan berkembangya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan "Proklamator dan juga pencetus Pancasila" maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987 PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Sukarnois (PNI) dan terutama juga golongan pemilih muda pemula.

Perpecahan

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya 2-6 Desember 1993, Megawati terpilih dengan suara terbanyak (meraih 256 dari 305 suara cabang) sebagai Ketua Umum PDI mengalahkan Budi Hardjono. Namun, pemerintahan Soeharto tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel

dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Pada tanggal 27 Juli 1996, Peristiwa 27 Juli, kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI dari pendukung Megawati, sehingga pada pemilu 1997 pemilih PDI menjadi kecil karena sebagian besar massanya berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih dikenal sebagai "Mega Bintang".

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat. Sekber Golkar merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan politik tertentu.

Sekber Golkar nyatanya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan anggotanya yang semakin meningkat. Dengan ideologi yang menegakkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Sekber Golkar kemudian dibagi dalam 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.

Ketua Umum

Djuhartono (1964–1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)

Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014–2016)
Setya Novanto (2016–2017)
Airlangga Hartarto (2017–2019) (2019–sekarang)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya atau GERINDRA adalah partai politik yang menjagokan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia pada tahun 2014 mendatang. Partai yang digawangi oleh Ir. Suhardi M. Sc ini bermula dari suatu keprihatinan terhadap kemelaratan yang dialami oleh masyarakat Indonesia akibat permainan orang yang tidak memperdulikan kesejahteraan bangsa. Ketika November 2007, Fadli Zon dan pengusaha ternama Hashim Djohadikusumo membahas masalah politik yang menurut mereka mulai menjauhi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Perbincangan mengenai nasib bangsa ini kemudian menjadi gagasan berdiri partai Gerindra yang saat itu baru diwacanakan di kalangan Hashim dan Prabowo. Berdirinya partai ini pun juga mendapat penolakan dari beberapa orang yang tidak ingin terlibat dengan pembuatan parpol baru.

Perdebatan yang cukup panjang dan alot akhirnya menghasilkan manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat yang memiliki 6 prinsip dasar partai (Prinsip Disiplin, Prinsip Kedaulatan, Prinsip Kemandirian, Prinsip Persamaan Hak, Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong dan Prinsip Musyawarah) dan juga 16 pokok-pokok perjuangan partai Gerindra. Selain itu, pada bulan Desember 2007, di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di bendungan Hilir, berkumpullah sejumlah nama seperti Adli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe untuk membicarakan masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. Dengan ini, partai Gerindra ingin mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945.

Namun, perjuangan Fadli yang setelah pertemuan itu sakit dan sempat merasa pesimis bahwa gagasan partai baru ini akan terus berlanjut, akhirnya tidak berakhir tragedi. Pada tanggal 6 Februari 2008, terbentuklah Partai Gerindra. Adanya partai ini diharapkan mampu mengabdi untuk menghadapi masalah sistem politik, perekonomian bangsa dan situasi sulit Indonesia dengan mengeratkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka dengan semangat kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat, Partai Gerindra memilih nama Gerakan Indonesia merdeka dan kepala Garuda sebagai perwujudan niat dan komitmen mereka terhadap manifesto Gerakan Indonesia Rayanya.

Partai Demokrat

Partai Demokrat adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai berlambang mercy ini didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 September 2001 yang kemudian disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini terilhami oleh kekalahan terhormat SBY dalam pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001.

Karena popularitas SBY saat itu cukup tinggi, maka sebagai tokoh terpanggil untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa masa mendatang. Akhirnya beberapa orang seperti Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Partai Demokrat mempunyai tujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita- cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bersama masyarakat, Demokrat berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang merdeka. Menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan internasionalisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan.

Partai ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ketika pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004, Demokrat meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dari perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat kelima Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini makin meningkat seiring banyaknya masyarakat yang mengagumi sosok SBY. Kemenangan tersebut membawa SBY menjadi Presiden RI pada dua periode yakni 2004 dan 2009.

Pada Maret 2013, SBY yang awalnya menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat akhirnya ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum.

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional adalah partai politik Indonesia yang diketuai oleh Hatta Rajasa. Partai ini berdiri sejak 3 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta. Partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB).

Partai politik ini adalah salah satu partai yang manjadikan sebagai landasan asas berpolitiknya, yaitu "Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam". Menurut PAN Agama adalah landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini bersifat terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri.

Visi PAN adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misinya adalah mewujudkan kader yang berkualitas; mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur; mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis Perjuangan Partai : partai dan pemenangan pemilu; perkaderan yang handal; partai yang dicintai rakyat; membangun organisasi PAN yang modern.

Pada periode 2010-2015, PAN memiliki struktur kepengurusan yaitu : Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan, Badan Komunikasi Politik, Badan Litbang, Badan Advokasi, Badan Perkaderan, Badan Luar Negeri, Badan Perempuan, Badan Kebijakkan Publik, Bakokal, Badan Ekonomi dan Bappilu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan atau biasa dikenal dengan PPP merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai ini pertama kali didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Haji Anwar Tjokroaminoto, Haji Rusli Halil, dan Haji Mayskur yang merupakan pimpinan empat partai Islam Peserta Pemilu 1971 tersebut. Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam.

Pada mula-nya PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah. Namun sejak tahun 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam perjalannya, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak tumbang-nya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir tahun 1998. PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai menggunakan asas Islam.

PPP melantik ketua umumnya yang pertama pada periode 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Ketua umum pertama partai yakni H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH. Hingga selanjutnya ketua umum partai secara berturut-turut antara lain H. Jailani Naro, SH, H. Ismail Hasan Metareum, SH, H. Hamzah Haz dan yang terbaru adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih melalui Muktamar VI yang diadakan pada tahun 2007. Dengan visi partai "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta

menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman".

PPP mempunyai platform yang dibagi dalam beberapa bidang, yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan. Dalam bidang agama, PPP mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini diwujudkan dengan sikap saling toleransi antar umat beragama. Dalam bidang politik, PPP terfokus dalam aspek penguatan ke-lembangaan, mekanisme dan budaya politik yang ber-demokratis dan ber-akhlaqul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, PPP lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan. Menegakkan supremasi hukum akan selalu dijunjung tinggi oleh PPP dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), penguatan institusi dan instrumen penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.

Dalam sektor sosial, PPP selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya. Kemudian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, PPP ikut membantu demi terbentuknya manusia yang berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan. Dalam Pemilu 2009 lalu, PPP berhasil mendapatkan total 37 kursi di DPR dengan persentase suara sebanyak 5,3%.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai Hati Nurani Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Partai Hanura merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Awal berdiri-nya partai ini tak lepas dari gagasan Jend. TNI (Purn) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lain. Gagasan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Dalam pertemuan ini dihasilkan 8 kesepakatan yang menjadi tonggak berdirinya partai. Dalam 8 kesepakatan tersebut dibahas mengenai berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada pendeklarasian tanggal 21 Desember

2006 kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dalam partai politik yang kemudian diberi nama Partai Hati Nurani Rakyat atau biasa disingkat menjadi Partai Hanura. Adapun nama-nama dewan pendiri Partai Hanura antara lain Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS. Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan beberapa tokoh lainnya.

Partai Hanura mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam visi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri lagi dengan banyaknya campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kehidupan bangsa sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali demi menciptakan sebuah bangsa yang mandiri serta selalu menanamkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Partai Hanura terus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar partai yang antara meliputi ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

Dalam keikutsertaan partai dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, Partai Hanura menjalani debut pertama-nya dengan tampil dalam Pemilu 2009. Dalam Pemilu 2009 lalu Partai Hanura mampu mendapat suara sebanyak 3.922.870 suara atau sekitar 3,8%. Selain itu, pendiri partai Wiranto juga ikut mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilu 2009 lalu. Dengan menggandeng mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Wiranto maju menjadi kandidat presiden Republik Indonesia. Melalui nomor urut 3 Wiranto dan Jusuf Kalla hanya mampu berada di peringkat ke 3 dengan perolehan 15.081.814 suara sah atau 12,41%. Menatap Pemilu 2014 mendatang, Wiranto berencana untuk maju kembali sebagai kandidat Presiden. Kali ini, Wiranto menggandeng CEO MNC Group yang merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo. Hal ini disampaikan dalam Deklarasi Capres Cawapres Partai Hanura yang diselenggarakan pada Juli 2013 ini. Dengan ini diharapkan mampu memberi perubahan bagi bangsa Indonesia menjadi lebih makmur melalui sosok pemimpin yang adil dan berhati nurani.

Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam. Partai ini berdiri sejak tanggal 17 Juli 1998 i Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta dan pernah mengikuti pemilu sebanyak tiga kali yaitu di tahun 1999, 2004, dan 2009. Selama pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI sedangkan pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% dan dengan system parliamentary threshold 2,5% .

Partai ini pernah dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada periode 21 Oktober 2004-8 Mei 2007. Kini, partai ini diketuai oleh M.S. Kaban yang menjabat menjadi Menteri Kehutanan RI yang ke-9 hingga kini.

Berdirinya partai ini didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan banyak lagi.

Visi dari partai politik ini adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dengan misinya untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Januari 1999. Diawali dari krisis multi dimensi yang terjadi pada tahun 1998, kondisi Indonesia telah mendesak sekelompok putra-putra bangsa untuk bertindak, meluruskan dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Desakan untuk mencari jalan keluar ini akhirnya melahirkan partai Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang merupakan gerakan moral.

Gerakan ini dimotori oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno, Tatto S. Pradjamanggala, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Udju S. Dinata dan David Napitupulu. Kemudian GKPB disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Dalam waktu yang relatif singkat GKPB telah tersebar dan dideklarasikan di sebagian besar wilayah Tanah Air Indonesia.

Dalam perjalanannya, Indonesia membuka peluang dengan berdirinya banyak parpol (multi partai). Sebagian dari para penggagas GKPB yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman menganggap perlu membentuk suatu partai politik untuk menajamkan perjuangan GKPB dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengikuti pemilihan umum 1999. Sementara pendiri GKP yang lain yaitu Siswono Yudhohusodo, David Navitupulu dan Sarwono Kusumaatmadja melanjutkan perjuangan melalui GKPB, dengan tetap memberikan dukungan terhadap partai politik yang akan dibentuk.

Penyusunan Panitia Pembentukan Partai Politik yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center dengan ketua Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Pada bulan 15 Januari 1999, diselenggarakan Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

PKP INDONESIA dipimpin oleh Ketua Umum Edi Sudradjat dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta Swasono, Anton J. Supit, John Pieris, Sutradara Gintings, serta Udju S. Dinata. PKP kemudian lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan visi dan misi yang jelas, yaitu membangun kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan dan bersatu dalam suatu kesatuan makna dan napas perjuangan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dengan misi untuk mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan, mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat dan berwibawa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.

D. Partai-Partai Pemilu Tahun 2019

Tujuan dilakukan pemilu legislatif dan pilpres serentak pada 2019 adalah demi menekan pengeluaran dan meminimalkan politik transaksional, meredam potensi konflik antarpendukung dan pemilih, dan meningkatkan jumlah pemilih. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 tercatat sebesar Rp 24,9 triliun.

Pertama adalah pasangan calon presiden dan wakil peresiden petahana Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan nomor urut 01. Yang kedua adalah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan nomor urut 02. Baca juga: Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. Mereka dinyatakan mendapatkan suara 85.607.362 (55,5 persen). Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara 68.650.239 (44,5 persen).

Kubu Prabowo-Sandiaga menuding ada kecurangan dalam pilpres 2019. Prabowo juga menolak hasil pilpres dan menempuh jalur hukum. Namun, setelah dilakukan sidang, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan tim sukses Prabowo pada 27 Juni 2019.

Selayang pandang Partai Pemilu Tahun 2019.

Partai Golongan Karya

Sejalan dengan cita-cita Para Bapak Pendiri Negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh

bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena negara kita adalah hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Di bidang ekonomilah visi Partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai GOLKAR menginginkan di masa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat,

perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil, dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan.

Dibidang sosial budaya, Partai GOLKAR mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Partai GOLKAR memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembataninya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antara kota-desa, antara Jawa-luar Jawa, dan antara pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antarumat beragama menjadi kepedulian Partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antara warga negara.

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejateraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik moderen, yaitu:

Pertama: mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
Kedua: melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Ketiga: meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

- Pengurus
  Ketua Umum : H. Aburizal Bakrie
  Wakil Ketua Umum : Theo L. Sambuaga
  Wakil Ketua Umum : H.R. Agung Laksono
  Wakil Ketua Umum : Sharif Cicip Sutarjo
  Wakil Ketua Umum : Fadel Muhammad

Partai Nasdem

- **Visi**

  Mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

- **Misi**

  Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia.

Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Visi dan misi di atas disusun berdasarkan Manifesto Partai NasDem saat pendeklarasian partai ini pada 26 Juli 2011. Isi lengkap Manifesto Partai NasDem adalah sebagai berikut.
“Negara diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Mandat untuk menjadikan manusia Indonesa

yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat.

Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar, namun tidak pernah mewujud. Di sinilah Negara Indonesia yang merdeka, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut berbangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun, pada saat yang sama, reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas ke mana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi berjalan tanpa bimbingan. Ideologi politik tanpa program politik yang konsisten dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstiusionalnya. Kami menolak demokrasi yang sekadar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya melahirkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun satu negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjujung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem lahir sebagai keharusan sejarah. Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas

kekosongan politik gagasan pascareformasi. Kami berdiri tegak dengan semangat kebangsaan yang kuat, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat melalui Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional.

Pengurus

Ketua Majelis Tinggi: Surya Paloh
Ketua Umum: Patrice Rio Capella
Wakil Ketua: Sugeng Suparwoto
Sekretaris Jenderal: Ahmad Rofiq
Bendahara Umum: Medini Subroto
Ketua Dewan Pakar: Hary Tanoesoedibjo
Ketua Bid Organisasi dan Keanggotaan: Ferry Musrsyidan Baldan
Ketua Pembina: Djafar Assegaf
Sekretaris Majelis Nasional: Jeffrie Geovanie

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda (bahasa Inggris: Garuda Party), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Garuda dideklarasikan pada tanggal 16 April 2015. Ahmad Ridha Sabana menjabat sebagai Ketua Umum partai. Pada tahun 2015, melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Partai Garuda mendapatkan ketetapan hukum dan resmi menjadi partai politik.

Ketua Umum: Ahmad Ridha Sabana (1972)

Sejarah Pendirian partai

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) ini merupakan perubahan nama partai yang didirikan oleh seorang menteri dan ketua MPR/DPR periode 1997-1999 di zaman Orde Baru, Harmoko yakni Partai Kerakyatan Nasional. Partai Kerakyatan Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2007, lalu pada 5 April 2008 disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. M. HH-25.AH.11.01 tahun 2008. Deklarasi Partai Kerakyatan Nasional dilaksanakan pada tanggal 19 April 2008 di Gedung Joang, Jakarta.

Di partai berlambang beringin hijau itu Harmoko menjadi Ketua Parampara/penasihat partai (pembina). Sementara Ketua Umum DPP Partai Kerakyatan Nasional (PKN) dijabat oleh Soebiantoro Soemantoro dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Jemmy Setiawan. Tak banyak pesohor atau figur publik yang menjadi pengurus partai ini. Satu-satunya figur pengurus yang dikenal luas oleh publik adalah artis Jamal Mirdad, yang duduk sebagai Deputi I Bidang Internal. Partai ini digaungkan akan mengikuti Pemilu 2009. Namun pada tanggal 30 Mei 2008 Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang diusung mantan Ketua Umum Golkar itu tidak lolos verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PKN bersama 12 partai politik baru lainnya, diumumkan KPU tidak memenuhi syarat administrasi. Partai ini kemudian tak lagi terdengar suaranya.

Delapan tahun kemudian tepatnya tanggal 3 April 2015, Partai Kerakyatan Nasional menggelar kongres perdana di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta. Salah satu keputusan dalam kongres itu mengubah nama partai menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia, disingkat Partai Garuda. Dengan cara tersebut, Partai Garuda tidak butuh verifikasi dari Kemenkum HAM, cukup laporan perubahan. Harmoko absen dalam kongres tersebut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dirombak. Kepemimpinan partai diserahkan secara simbolik dari Soebiantoro Soemantoro kepada Ahmad Ridha Sabana. Dilansir dari tirto.id, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan Partai PKN sudah tidak aktif dan Pak Harmoko sudah tidak mau berpolitik. Mansuri mengatakan nyaris tak ada seorang pengurus PKN yang terlibat dalam Partai Garuda.

Pada 2 September 2015, Partai Garuda mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-16.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dari Kemenkum HAM. Sedangkan untuk perubahan AD/ART dari Partai PKN ke Partai Garuda (diajukan oleh DPP PKN pada 17 September 2015) disahkan oleh Kemenkum HAM pada 2 Desember 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-21.AH.11.01 tahun 2015. Pada tanggal 23 Maret 2017, Partai Garuda kembali merombak kepengurusan. Kepengurusan Partai Garuda yang baru itu disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 tahun 2017 pada 27 April 2017.

Pemilu 2019

Partai Garuda mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum 2019 pada tanggal 15 Oktober 2017Garuda merupakan partai politik ke-13 yang mendaftar di KPU untuk pemilu 2019. Ahmad Ridha Sabana mengklaim bahwa Garuda sudah mencapai angka 98 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Ia memperhitungkan terdapat sekitar 400 ribu anggota partai di seluruh daerah. Ahmad menambahkan bahwa Garuda dibentuk sebagai salah satu partai politik yang mengakomodasi anak muda, dengan memberikan wadah kepada para pemuda Indonesia yang memiliki minat untuk berpolitik untuk memenuhinya melalui mekanisme bergabung dengan partai politik, dalam hal ini Partai Garuda. Pada 14 Desember 2017, KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi perbaikan parpol calon peserta Pemilu 2019. Dalam pengumuman hasil tersebut di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sebanyak dua belas parpol lolos ke tahap berikutnya, yakni tahap verifikasi faktual. Partai Garuda bersama Partai Berkarya dinyatakan tidak lolos dalam tahap persyaratan administrasi. Komisioner KPU Hasyim Azhari mengatakan, Partai Berkarya dan Partai Garuda dinyatakan tidak lanjut karena tidak bisa memenuhi syarat dokumen berupa daftar keanggotaan di kabupaten/kota yang tidak bisa memenuhi batas minimal.

Kemudian pada 19 Desember 2017 Partai Garuda bersama Partai Berkarya mengajukan gugatan kepada KPU lewat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Lalu pada 23 Desember 2017, Partai Garuda memenangkan gugatan melawan KPU berdasarkan amar putusan sidang Bawaslu. Atas hasil gugatan tersebut, Partai Garuda berhasil untuk lanjut dalam tahapan selanjutnya (tahap verifikasi faktual). Dalam hasil tahap verifikasi faktual yang diumumkan pada 17 Februari 2018, Partai Garuda menjadi salah satu partai dari empat belas partai yang dinyatakan lolos dan berhak ikut menjadi peserta Pemilu 2019. Hasil verifikasi tersebut disampaikan di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat. Esoknya pada 18 Februari 2018, jam 19.00 WIB; keempat belas partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut partai politik. Pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 ini bertempat di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Partai Garuda dalam pengundian dan penetapan nomor urut partai tersebut mendapat nomor urut enam. Dalam pengundian dan penetapan nomor urut partai peserta Pemilu 2019 itu, Partai Garuda diwakili oleh Ketua

Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana didampingi Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansyuri.

Di luar politik, Ahmad Ridha Sabana adalah Presiden Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) sejak 2014. Pada Februari 2018, Ridha mengatakan kepada wartawan bahwa dia bukan lagi Presiden Direktur TPI. Di sisi lain, Abdullah Mansuri merupakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Selain diisukan dekat dengan keluarga Cendana terkait dengan Siti Hardijanti Rukmana (sebagai pemilik TPI), partai ini juga diisukan sebagai sempalan ataupun berafiliasi dengan Partai Gerindra. Isu miring mengenai hubungan Partai Garuda dengan Partai Gerindra ini terkait dengan hubungan keluarga dan politik Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. Ahmad Ridha Sabana merupakan adik dari Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Riza Patria. Patria merupakan kader Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019. Selain itu, Ahmad Ridha Sabana juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2014 dari Partai Gerindra. Mengantongi nomor urut 2 dari Dapil DKI Jakarta V, Ridha hanya mendapatkan 3.691 suara dan ia tidak lolos.

Tuduhan lain yang menerpa Partai Garuda adalah terkait lambang dan warna partai. Masih seperti isu sebelumnya, yakni dikaitkan dengan Partai Gerindra karena kesamaan lambang dan warna partai. Isu termutakhir, Partai Garuda disebut-sebut sebagai reinkarnasi Partai Komunis Indonesia. Semua isu-isu tersebut langsung tegas dibantah oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana. Dilansir dari Tribunnews.com, Ahmad Ridha Sabana mengatakan: "Kami adalah partai baru yang sebagian besar kader adalah anak muda yang berkomitmen berjuang secara politik demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik,".

Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional Pileg DPR RI 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Ruang Sidang Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB, Partai Garuda adalah salah satu dari tujuh partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen. Partai Garuda hanya mampu meraup suara sebanyak 702.536 atau sebesar 0,50% dari total jumlah suara sah nasional. Rapat dipimpin Ketua KPU RI Arief Budiman dan hasil rekapitulasi ini ditetapkan melalui

Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Meski tak berhasil melenggang ke Senayan, Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana memprediksi partainya mendapat sekitar 50 kursi untuk tingkat DPRD provisi dan kabupaten/kota. Walaupun begitu, Partai Garuda akan tetap mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencana gugatan tersebut, menurut Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana lantaran ada dugaan suara partainya hilang di tingkatan kabupaten/kota dan provinsi.

Perolehan Kursi Pemilu 2019

Pemilihan umum 2019 menjadi pemilu pertama bagi Partai Garuda. Ditingkat nasional, Partai Garuda berhasil mendapatkan 702.536 suara atau 0,50% dari suara sah nasional. Ia menempati posisi kedua terbawah. Sebagai pendatang baru, perolehan suara Partai Garuda masih lebih banyak dibanding Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang telah berulang kali mengikuti pemilu dan pernah menempatkan wakilnya sebagai anggota DPR RI. Bersama 6 partai politik peserta Pemilu 2019 lainnya, Partai Garuda gagal mendapatkan kesempatan untuk diikutkan dalam perhitungan kursi DPR RI.

Ditingkat provinsi, Partai Garuda berhasil menempatkan 2 wakilnya di 2 DPRD Provinsi berbeda, yaitu DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Mukmina Yasin dan DPR Papua atas nama Alfred Fredy Anouw. Perolehan tersebut sama dengan PKPI yang juga hanya berhasil menempatkan 2 wakilnya ditingkat DPRD Provinsi.

Ditingkat kabupaten/kota, Partai Garuda berhasil menempatkan 33 orang kadernya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 7 provinsi dan 21 kabupaten. Partai Garuda paling banyak menempatkan wakilnya di kabupaten di Provinsi Papua, yaitu 24 orang. Bahkan Partai Garuda berhasil menempati posisi ketiga di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yalimo, Papua, sehingga berhak menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua II DPRD Nduga dan DPRD Yalimo.

Partai Berkarya

Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Pembentukan Partai Berkarya merupakan

penggabungan dari Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik (Nasrep). Awal berdiri Menurut informasi yang dikutip dari situs resmi, Partai Berkarya tercatat pada akta notaris didirikan pada 2 Mei 2016. Lantas pada 13 Oktober 2016 terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan penggabungan Partai Berkarya dan Partai Nasrep. Ketua Umum Partai Berkarya yang pertama adalah Neneng Anjarwati Tuty. Dia menjabat pada periode 2016-2018. Kepemimpinan Neneng kemudian digantikan oleh Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto. Tommy menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya periode 2018-2020. Baca juga: Kasasi Dikabulkan, Kubu Muchdi Pr: Kepastian Hukum Partai Berkarya Hadapi Pemilu 2024 Jabatan Tommy kemudian digantikan oleh mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr mulai dari 2020. Lambang Partai Berkarya adalah pohon beringin berlatar warna kuning yang dikelilingi oleh rantai, dan kemudian dibawahnya terdapat pita bertuliskan Beringin Karya. Logo itu mulanya dinilai mirip dengan lambang Partai Golkar. Namun, menurut Tuty hal itu hanya kesamaan semata-mata dan bukan upaya untuk meniru Partai Golkar. Perolehan suara Partai Berkarya menjadi salah satu peserta pada Pemilu 2019. Pada saat itu, Partai Berkarya mendapatkan 2.902.495 suara (2,09 persen). Dengan perolehan suara itu, Partai Berkarya tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, ada 10 kader Partai Berkarya yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu periode 2019. Rinciannya adalah: Papua: 3 kursi. Nusa Tenggara Barat: 2 kursi. Maluku: 1 kursi. Maluku Utara: 2 kursi. Jambi: 1 kursi. Banten: 1 kursi. Baca juga: Sengkarut Internal Partai Berkarya yang Berlarut-larut Konflik internal Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Berkarya bermula ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Surat Keputusan terkait Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya 2020-2025. Dalam surat itu Kemenkumham mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muchdi PR. Tommy Soeharto lantas menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta, gugatannya dikabulkan pada 16 Februari 2021. Tak terima, Kemenkumham dan Partai Berkarya di bawah kepengurusan Muchdi PR mengajukan banding. Tapi, dalam putusannya 1 September 2021, majelis hakim PT TUN Jakarta tetap menyatakan kepengurusan Partai Berkarya di bawah Tommy merupakan kepengurusan

yang sah. Kemenkumham dan Mucdi PR terus melanjutkan proses peradilan ke tingkat kasasi hingga akhirnya menang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung pada 22 Maret 2022 lalu. Adapun putusan itu bernomor 182/G/2020/PTUN.JKT. Kubu Tommy menyatakan akan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam sengketa kepengurusan Partai Berkarya. Visi-Misi Partai Berkarya Visi Partai Berkarya bersama dengan masyarakat luas berperan mewujudkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang yang berorientasi pada stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Membangun karakter bangsa, tata kelola pemerintahan dan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermartabat, berkeadilan, berkesetaraan, aman, dan sejahtera. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja seluas-luasnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta berkeadilan, berwawasan kelingkungan dan kemaritiman. Baca juga: Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Targetkan 7 Persen Suara pada Pemilu 2024.

Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
Dewan Pembina

1. Ketua : Juanda Setia Kiai Demak

2. Sekretaris : Herry Tousa
3. Anggota : KH. Anwar Sanusi
4. Anggota : Drs. Yockie M. Hutagalung, M.M.
5. Anggota : Diaz Baskara Dewantoro

Dewan Kehormatan
1. Ketua : Mayjen TNI (Purn.) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Masban, S.Sos.
3. Anggota : Nazarudin, S.H.
4. Anggota : Benny Haryanto, S.H.
5. Anggota : Dr. Budi Santoso

Dewan Pakar 1. Ketua : Iwan Ridwan Empon Wikarta
2. Sekretaris : Fikram, S.H.
3. Anggota : Suyono Ramli
4. Anggota : Hotman Samosir
5. Anggota : Muhammad Marlis Pohan

Mahkamah Partai

1. Ketua : A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua : Yuliana Putri, S.H, MH.
3. Sekretaris : Kurniadi Nur, S.H.
4. Anggota : Muhammad Bolly, S.H.
5. Anggota : Imran Nating, S.H., M.H

Partai Persatuan Indonesia

Partai Persatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha dan pemilik perusahaan konglomerat multinasional MNC Group. Perindo dideklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pada acara deklarasi tersebut, dihadiri oleh beberapa petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz. Selain itu juga hadir Wiranto, Ketua Umum Hanura. Awalnya Perindo adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Partai Perindo mendukung seluruh pelestarian Adat dan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing, asalkan tidak melakukan peyimpangan dari ajaran-ajaran agama yang telah ada di Indonesia sebelum

Indonesia merdeka pada tahun 1945. Partai Perindo hadir untuk Indonesia Sejahtera.
Ketua Umum: Hary Tanoesoedibjo
Sekretaris Jenderal: Ahmad Rofiq
Bendahara Umum: Henry Suparman

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik di Indonesia yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973. PPP merupakan fusi atau penyederhanaan dari empat partai keagamaan yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi. Penggabungan empat partai keagamaan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilu Orde Baru tahun 1973. Baca juga: IGGI, Program Bantuan Dana untuk Indonesia di Era Orde Baru Sejarah berdirinya PPP Sejak tahun 1950 hingga 1959, Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Hal ini terjadi karena banyaknya partai yang ada di Indonesia serta tuntutan-tuntutan yang mereka layangkan. Guna mencegah masalah tersebut, Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin pada 1959. Pada 1960, jumlah partai di Indonesia dikurangi dari 40 menjadi 12, kemudian sisa 10. Masih di tahun yang sama, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan karena terlibat dalam Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dengan bubarnya Masyumi, maka aspirasi yang disampaikan oleh kelompok Islam lewat partai pun berkurang. Partai Islam yang masih tersisa saat itu adalah NU, Perti, PSII, dan Parmusi. Selain partai politik Islam, tahun 1964, berbagai organisasi golongan fungsional memutuskan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Golongan ini meliputi berbagai macam kelompok yang dibagi berdasarkan fungsi kekaryaannya, seperti buruh, guru, tani, atau pemuda. Baca juga: Partai Fretilin: Sejarah dan Pemimpinnya Dua tahun kemudian, yakni tahun 1966, Angkatan Darat mengadakan pertemuan dan menghasilkan usulan fusi partai ke dalam lima golongan, yaitu Islam, Kristen-Katolik, Nasionalis, Sosialis Pancasila, dan Golkar. Kemudian, pada Mei 1967, Soeharto mengusulkan fusi partai-partai yang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menekankan pembangunan material, dan yang satu menekan pembangunan spiritiual. Keinginan Soeharto untuk melakukan fusi partai dikemukakan lewat pidato di Kongres XII Partai Nasional Indonesia, 11 April 1970. Sayangnya, usulan Soeharto ditolak oleh Ketua

Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Idham Chalid. Chalid mengatakan bahwa NU tidak pernah memiliki keinginan untuk memfusikan diri dengan partai-partai Islam lainnya. Baca juga: Partai APODETI: Sejarah, Anggota, dan Pembubaran Setelah Pemilu 1971 dilangsungkan, Golkar mendapat perolehan suara sebesar 62,8 persen. Sedangkan dari empat partai Islam, hanya NU yang memperoleh suara terbanyak, yakni sebesar 18,6 persen. Dari hasil Pemilu 1971, pemerintah memutuskan untuk membagi partai ke dalam empat kelompok, yaitu Angkatan Bersenjata, Golkar, golongan demokrasi pembangunan, dan persatuan pembangunan. Dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada empat partai haluan Islam di dalamnya, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi. Sehingga, PPP merupakan fusi dari partai-partai Islam yang ada saat itu, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi. PPP dideklarasikan pada 5 Januari 1973, dengan Mohammad Syafa'at sebagai ketuanya. Baca juga: Sejarah Nahdlatul Wathan Anggota Tokoh-tokoh yang sempat menjabat di PPP adalah: Ketua Umum Mohammad Syafa'at Mintaredja (1973-1978) Djaelani Naro (1978-1984 dan 1984-1989) Ismail Hassan Metareum (1989-1994 dan 1994-1999) Hamzah Haz (1998-2003 dan 2003-2007) Suryadharma Ali (2007-2011 dan 2011-2014) Muhammad Romahurmuziy (2016-2019 dan 2019-2020) Suharso Monoarfa (2019-2020 dan 2020-sekarang) Sekretaris Jenderal Mardinsyah (1984-1989) Matori Abdul Djalil (1989-1994) Tosari Widjaja (1994-1998) Alimarwan Hanan (1998-2007) Irgan Chairul Mahfiz (2007-2011) Muhammad Romahurmuziy (2011-2014) Arsul Sani (2016-2021) Muhamad Arwani Thomafi (2021-sekarang)

Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh Giring Ganesha sejak 16 November 2021. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama.

Dewan Pimpinan Pusat 2019-2024

Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie
Wakil Ketua Dewan Pembina: Grace Natalie
Sekretaris Dewan Pembina: Raja Juli Antoni
Ketua Umum: Giring Ganesha
Ketua DPP: Isyana Bagoes Oka
Ketua DPP: Tsamara Amany

Ketua DPP: Sumardy
Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti
Wakil Sekretaris Jenderal: Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jenderal: Danik Eka Rahmaningtiyas
Bendahara Umum: Suci Mayang Sari
Wakil Bendahara Umum: Lila Zuhara

Sejarah

Partai ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014. Pada Pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.

Program dan agenda

Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial Twitter dan Facebook secara aktif untuk mengajak warga muda dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dengan menciptakan hash tag pada jejaring sosial seperti #Merdeka100Persen saat HUT RI ke 70 dan #KepoinPilkada saat Pilkada serentak pada Desember 2015 yang lalu.

Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015.

Pandangan

PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen. Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apapun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2020. “5+ Jenis-Jenis Sistem Politik Menurut Para Ahli dan Secara Umum”, https://belajargiat.id/macam-macam-sistem-politik/.

Aggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: Cv.Pusataka Setia.

Bill Azmy, Adilan. 2021. “Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli & Ciri-ciri Umumnya”, https://tirto.id/pengertian-sistem-politik-menurut-para-ahli-ciri-ciri-umumnya-gjHF.

Budiardjo, Miriam. 2004. (Cetakan ke-26). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.Tower Sargent, Liman. 1986. Ideologi Politik Kontemporer. Jakarta: Bina Aksara.

H. / Rahman A. 2007, sistem politik indonesia graha ilmu, yogyakarta .

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/15005531/sejarah-pemilu-1999-pesta-demokrasi-dengan-partai-peserta-terbanyak?page=all

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/10460721/sejarah-pemilu-dan-pilpres-2019-dari-peserta-hingga-hasil?page=all

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/sejarah-pemilu-dan-pilpres-2009-dari-peserta-hingga-hasil

Ismail, Faisal. (2017). *PANORAMA SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Kabar. 2021. “Ciri-ciri Sistem Politik dan Pengertiannya”, https://kumparan.com/kabar-harian/ciri-ciri-sistem-politik-dan-pengertiannya-1wkArnvdk9R/full.

KantaPrawira Rujdi, 2004, sistem politik indonesia, suatu model pengantar, sinar baru agensindo bandung Rahman, A Syahrial, MA, DKK, 2000 sosiologi dan politik, ghalia indonesia, jakarta

KBBI Daring. 2021. “Sistem Politik", https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Krisnawati, Ega. 2021. “Fungsi Sistem Politik dan Pengertiannya Menurut Para Ahli”, https://tirto.id/fungsi-sistem-politik-dan-pengertiannya-menurut- para-ahli-gkis.

Litalia. 2021. “Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli, KBBI danUmum”, https://www.jurnalponsel.com/pengertian-sistem politik/#Pengertian_Sistem_Politik_Menurut_KBBI.

M. Hum, Jainuddin. (2019). Islam dan Politik Orde Lama; "Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno", 3(2)

Mas’oed Mohter dan Andrew Mac Colin, 2000, pembandingan sistem politik, gajah mada university press, yogyakarta.

Saputra, Ali Thaufan Dwi. (2019). *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sjamrudin Nazarudin, 1993, dinamika sistem politik Indonesia, gramedia pusaka utama, jakarta.

Subekti, Valina Singka., & Hanta Yuda A. R. (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontrestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite Valina Singka Subekti*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudarso, H. 2003. *Dinamika Politik Indonesia*. Yogyakarta : Mata Bangsa Edisi 1 Juli 2003.

Syachrir. 1999. *Struktur Sistim Politik*. Jakarta : Airlangga.

Yoewono, Djoko. (1987). *KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN BARU*. Skripsi, Fakultas Hujum, Airlangga.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang

Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

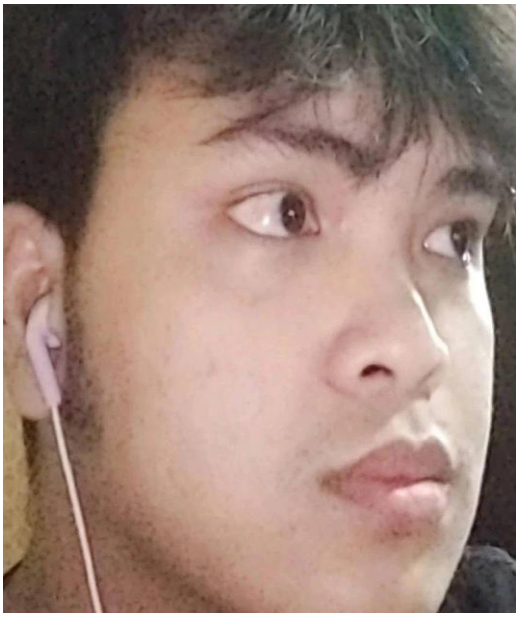

Nama lengkap penulis yaitu Aditya Tirta Lukmana, lahir di Bogor pada 11 Januari 2001, anak pertama dari tiga bersaudara. Ketika menulis buku ini, sedang mengenyam pendidikan di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Hobinya adalah Membaca buku, Menulis dan Menonton tayangan yang bersifat mendidik. Cita-cita ingin berkecimpung dalam pemberdayaan media massa penyiaran seperti Televisi atau Channel Youtube (Pergeseran definisi media massa yang bersifat digitalisasi dewasa ini).

Hidup sebagai seorang Mahasiswa S1 Komunikasi yang gemar membaca, menulis dan menonton tayangan mendidik dan berdiskusi tentang Filsafat, Teologi, Agama, Pluralitas Aliran Kepercayaan, Psikologi, Konspirasi, Kejadian atau Fenomena yang ada di Dunia, Tokoh paling berpengaruh di Dunia, dan politik. Tapi juga berkompeten dalam dunia Broadcasting. Keahliannya yaitu menulis berita opini dan produksi video berita. Tulisannya pernah dimuat di media online Media Indonesia, Pernah magang kerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat pada bidang Jurnalistik.Ini adalah karya tulis buku pertamanya, semoga bermanfaat.

Namanya ialah Ahmad Alwi Ray, lahir di Jakarta, 12 Juli 2001, ia adalah anak semata wayang (anak satu-satunya), anak ganteng yang berasal pasangan Himsar Rangkuty dan Risma Harahap. Ray adalah panggilan kesehariannya, dia terlahir di lingkungan dan keluarga dengan keadaan yang sangat sederhana.

Ayahnya adalah seorang wiraswasta di daerah Citayam, sedangkan Ibunya menjadi ibu rumah tangga di rumah tercintanya (sendiri). Sedari kecil Ray selalu diberikan nasehat oleh sang ayahnya agar Ray selalu rajin beribadah, amanah dan baik kepada semua orang.

Ketika Ray berumur 6 tahun, Ray memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pabuaran, kemudian setelah lulus beliau melanjutkan pendidikannya di SMPN 4 Cibinong di tahun 2012. Selepas lulus dari Sekolah Menengah Pertama di tahun 2015, dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor.

Ketika Ray menginjak kelas X MAN tersebut, Ray masuk eskul basket lalu mengikuti turnamen antar sekolah se-kabupaten Bogor, Ray dan setimnya menjadi juara ke 3 pada perlombaan tersebut. Pastinya saja hal tersebut dapat membuat hatinya menjadi senang dan semakin bersemangat untuk mengembangkan bakatnya. Baginya olahraga merupakan satu aspek penting pada kehidupan karena bisa membentuk jiwa insan bertenaga dan sehat.

Saat ini Ray masih menjalani kuliahnya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di salah satu Universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis bernama lengkap Andiani Eka Destianti tempat lahir Bandung, 25 Desember 2001, ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini kesibukannya yakni sebagai mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis Bernama lengkap Annisaa Nuur Fitriani, lahir di Bandung pada 16 Februari 2001, ia adalah anak pertama dari empat bersaudara. Saat ini kesibukannya adalah sebagai mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 di Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis bernama lengkap Ariansah Nur Fajar tempat lahir Garut 05 Februari 2001, ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini kesibukannya yakni sebagai mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai mahasiswa, ia pun aktif dalam berbagai organisasi salah satunya yaitu FOSDAI (Forum Silaturahmi Da'I Al-Ihsan) dan menjabat sebagai ketua umum, kemudian di organisasi LEBAH (Lingkar Barudak Khitobah) yang menjadi salah satu UKM di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN SGD Bandung dan menjabat sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan.

Penulis bernama lengkap Arif Ramadhan, tempat lahir Bandung 15 Desember 1999, ia adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, saat ini kesibukannya adalah sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri dibandung yaitu UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG semester 6. Selain sebagai mahasiswa, iapun aktif dibeberapa organisasi.

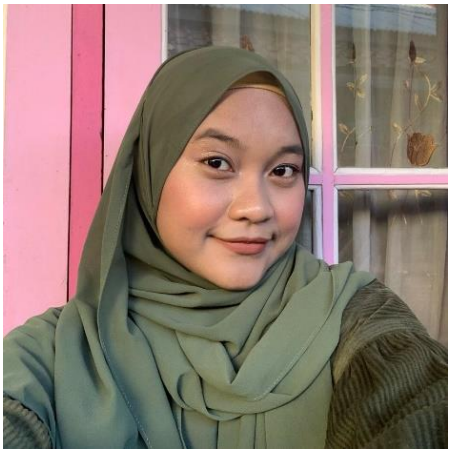

Penulis bernama lengkap Arina Marjany, tempat tanggal lahir Bandung, 24 September 2001. Ia adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara. Saat ini dirinya mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai mahasiswi ia pun aktif dalam berbagai organisasi salah satunya yaitu di Organisasi Pemudi Persatuan Islam. Pernah bersekolah SD di SDN Cilampeni 1, MTs Persis Katapang dan lulusan dari MA Persis Katapang. Memiliki hobi fotografi dan membaca novel.

Penulis bernama lengkap Atrasina Kiyasatina, tempat lahir Lebak 8 Juli 1999, ia adalah anak pertama dari lima bersaudara. Saat ini kesibukannya yakni sebagai mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai mahasiswi ia pun aktif dalam berbagai organisasi salah satunya yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada departemen pengembangan minat dan bakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

SELAYANG PANDANG
PARTAI POLITIK

ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ISBN 978-623-88132-5-4 (PDF)